



BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN
KABUPATEN CIANJUR
2022-2037

GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN CIANJUR
2022-2037

LAPORAN AKHIR



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
2021

Kata Pengantar

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karuniaNya kepada kita semua sehingga pada tahun 2021 ini telah tersusun perencanaan pembangunan penduduk dari berbagai aspek kependudukan dengan judul *Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur 2022-2037*. Perencanaan dalam bentuk *Grand Design* ini disusun melalui proses yang cukup panjang dengan melibatkan berbagai komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta pemerintah pusat di daerah. Keterlibatan dinas di Kabupaten Cianjur antara lain Dinas DPPKBP3A, Bappeda Kabupaten Cianjur, Sekretaris Daerah kabupaten Cianjur, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disdukcapil, Dinas LH dan PUPR serta beberapa Camat dan kepala desa/kelurahan di Kabupaten Cianjur yang memiliki keterwakilan problem utama kependudukan. Adapun keterlibatan pemerintah pusat di daerah antara lain Kancab Kemenag RI, POLRI, TNI dan BPS Kabupaten Cianjur. Masyarakat yang dilibatkan juga cukup banyak, antara lain MUI, Muslimat NU, Aisyiah, Kampung KB, PIKR dan lain sebagainya. Adapun fasilitator, narasumber dan penyusun hasil kegiatan dikerjakan oleh CEDS (*central Economic Development Strategis*) Universitas Padjadjaran.

Keterlibatan berbagai komponen di daerah dimaksudkan untuk menyamakan perencanaan yang terkait dengan pembangunan kependudukan, meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, arah mobilitas penduduk, dan sinergitas data informasi kependudukan. Pembangunan daerah pada aspek pengendalian kuantitas penduduk diarahkan agar TFR dikendalikan untuk mendapatkan LPP yang stabil. Hal ini membutuhkan arah mobilitas penduduk (migrasi) yang bijaksana dalam mengkonstruksi persebaran penduduk di Kabupaten Cianjur dengan kolaborasi program lintas sektor yang mampu membangkitkan sumber ekonomi di wilayah kosong di Cianjur bagian selatan dan barat daya. Pada arah peningkatan kualitas penduduk, maka Kabupaten Cianjur bertekad meningkatkan indeks pembangunan manusia dari aspek indikator kinerja kesehatan, pangan, pendidikan, sosial dan peningkatan kesejahteraan

ekonomi melalui peningkatan kualitas perdesaan dan aspek lingkungan hidup. Hal ini dimulai dari pembangunan keluarga berkelanjutan dengan regulasi data informasi yang tersinergi atas komponen kualitas dan kuantitas penduduk tersebut.

Konstruksi regulasi dalam suatu perencanaan kependudukan di atas dibangun melalui kegiatan penelitian yang tahapannya dimulai dari inventarisasi data sekunder, *focus grup discussion* (FGD) dengan melibatkan lintas komponen pembangunan, observasi wilayah dan penyusunan laporan secara bertahap. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti disebut di atas, atas segala aspirasi, apresiasi dan partisipasinya dalam kegiatan penyusunan *Grand Design* ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada fasilitator dan nara sumber antara lain BKKBN Jawa Barat, Koalisi kependudukan Indonesia (KKI) Jawa Barat dan nara sumber lain yang terlibat selama proses penelitian ini.

Produk *grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur 2022-2037* ini disusun dengan memperhatikan tahapan pembangunan yang menyesuaikan diri dengan arah dan indikator pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Terkait dan program kegiatan oleh kekuatan social kemasyarakatan. Oleh karena itu produk perencanaan ini sangat terbuka bagi kritik, revisi atau perbaikan, evaluasi dan kontrol bersama untuk mendapatkan rencana aksi yang strategis dan efisien. Bersama dengan ini kami membuka diri kepada semua pihak atas telaah kritis konstruktif demi kesempurnaan perencanaan ini. Akhirnya kami mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam sajian materi yang terdapat dalam buku ini, seiring ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat. Semoga amal ibadah bapak dan ibu diterima di sisi Tuhan YME. Amiin.

Cianjur, November 2021

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cianjur

H. Dedi Supriadi
NIP.

Daftar Isi

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	i
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel.....	ix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	11
1.3 Visi dan Misi.....	14
1.4. Arah Kebijakan.....	17
1.5 Tujuan.....	19
1.6 Sasaran (Kegunaan).....	20
1.7 Ruang Lingkup.....	20
1.8 Pengertian Umum.....	21
1.9 Penjelasan Indikator.....	23
1.10 Metode Pengkajian.....	28

BAB II KONDISI UMUM KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR..	38
2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Cianjur.....	38
2.2 Aspek Kuantitas Penduduk Kabupaten Cianjur.....	48
2.2.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya di Kabupaten Cianjur	48
2.2.2. Struktur Populasi dan Piramida Penduduk Kabupaten Cianjur	61
2.2.3. Aspek Natalitas dan Migrasi Penduduk di Kabupaten Cianjur.....	<u>73</u>
2.2.4. Gambaran Angka Kematian Penduduk (Mortality)	<u>75</u>
2.3 Aspek KualitasPenduduk	78
2.3.1 Aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur	78
2.3.2 Aspek Pembangunan Kesehatan Kabupaten Cianjur.....	80
2.3.3 Aspek Pembangunan Pendidikan Kabupaten Cianjur	84
2.3.4. Aspek Pembangunan Ekonomi Ketenagakerjaan.....	85

2.4 Pembangunan Keluarga.....	102
2.5. Mobilitas Penduduk Kabupaten Cianjur	107
2.6 Data dan Informasi Kependudukan.....	111

BAB III ORIENTASI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020-2045	118
3.1 Kondisi Harapan Kuantitas dan Kualitas Penduduk.....	118
3.1.1. Kuantitas Penduduk	118
3.1.2. Kualitas Penduduk	122
3.1.3. Persebaran Dan Mobilitas Penduduk.....	123
3.1.4. Pembangunan Keluarga	124
3.1.5. Data Dan Informasi Kependudukan	125
3.2. Analisis Pembangunan Kependudukan.....	125
3.2.1. Analisis Kuantitas Penduduk.....	125
3.2.2. Analisis Distribusi, Struktur dan Transisi Demografi.....	129
3.2.3. Analisis Kualitas Penduduk	133
3.2.4. Analisis SWOT Menghadapi Bonus Demografi	136
3.2.5. Analisis Pembangunan Keluarga	138

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020-2045 DALAM SINKRONISASI DENGAN RPJMD 2016-2021

4.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	141
4.2 Peningkatan Kualitas Penduduk.....	147
4.3 Pembangunan Keluarga.....	156
4.4 Mobilitas Dan Pesebaran Penduduk	159
4.5 Sistem Administrasi Kependudukan.....	160

BAB V ROADMAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR

5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	165
5.2 Peningkatan Kualitas Penduduk.....	171
5.3 GNI per Kapita (Purchasing Power Parity/PPP)	174
5.4 Pembangunan Keluarga.....	175
5.5 Pengarahan Mobilitas Penduduk.....	177

5.6	Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan	184
5.7	Implikasi Kebijakan	188
5.8	Kebijakan Pembiayaan	188
5.9	Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan.....	189
5.10	Peningkatan Pendidikan Perempuan.....	190
5.11	Kebijakan Keluarga Berencana Sebagai Basis Pembangunan Keluarga.....	191

BAB VI ROADMAP KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR 2020-2045193

6.1	Pendahuluan	193
6.2	Analisis Matrik Kontekst Sebagai Dasar Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan di Cianjur.....	204
6.3	Roadmap Kegiatan Pembangunan Kependudukan 2020-2045	231
6.3.1	Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	231
6.3.2	Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Mortality).....	241
6.3.3	Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Kesehatan)	244
6.3.4	Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Ekonomi Ketenagakerjaan)	247
6.3.5	Aspek Kualitas Penduduk (Aspek Pendidikan)	250
6.3.6	Aspek Kewilayahan di Kabupaten Cianjur.....	251
6.3.7	Aspek Ketahanan Keluarga di Kabupaten Cianjur	252
6.3.8	Aspek Kesesuaian Road Map dengan Indikator Pembangunan Kabupaten Cianjur	257

BAB VII PENUTUP DAN REKOMENDASI.....269

Daftar Pustaka.....273

Daftar Gambar

Judul	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan kegiatan.....	30
Gambar 2.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Cianjur	41
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Cianjur	44
Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk	48
Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota 2010-2018.....	49
Gambar 2.5 Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur.....	54
Gambar 2.6 Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur.....	55
Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020	64
Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten 2020.....	64
Gambar 2.11 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kecamatan.....	65
Gambar 2.12 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2018	65
Gambar 2.13 Rasio Jenis Kelamin Empat Tahun Terakhir	66
Gambar 2.14 <i>Sex Ratio</i> di Kabupaten Cianjur Tahun 20	67
Gambar 2.15 Piramida Penduduk di Kabupaten Cianjur	69
Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk (orang/km ²) Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020	56
Gambar 2.8 Kepadatan Penduduk KabupatenCianjurTahun 2015-2018	57
Gambar 2.16 Trend Angka Kelahirann Bayi di Kabupaten Cianjur	72

Gambar 2.17	Prosentase Mortalitas Penduduk.....	76
Gambar 2.18	Peningkatan indeks Pembangunan Manusia	78
Gambar 2.19	Angka Harapan Hidup Tahun 2017 – 2020.....	79
Gambar 2.20	Angka Partisipasi Kasar dan Murni tahun 2020.....	83
Gambar 2.21	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur	85
Gambar 2.22	Dinamika Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur	86
Gambar 2.23	Dinamika Prosentase Penduduk Miskin di Kab. Cianjur	87
Gambar 2.24	Dinamika Prosentase Angkatan Kerja Kabupaten Cianjur	88
Gambar 2.25	Dinamika Tingkat pengangguran terbuka Kab. Cianjur.....	89
Gambar 2.26	Dinamika Angka Ketergantungan Kabupaten Cianjur	90
Gambar 2.27	Jumlah Pengangguran dan Prosentase Bekerja Berdasarkan Pendidikan	92
Gambar 2.28	Status Pendidikan Lapangan Kerja Cianjur.....	94
Gambar 2.29	Prosentase Sektor Pekerjaan Dari Penduduk Bekerja 2020	95
Gambar 2.30	Kemiskinan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2020.....	102
Gambar 2.31	Orang keluar Di Jawa Barat tahun 2020.....	107
Gambar 2.32	Skema Alur Data Dan Informasi Kependudukan Terintegrasi.....	144
Gambar 3.1	TFR Penduduk Kabupaten Cianjur	118
Gambar 3.2	Asumsi Mortalitas	118
Gambar 3.3	IPM Kabupaten Cianjur (Tahun 2012-2020.....	132
Gambar 3.4	Dependency Ratio KabupatenCianjur (2015-2020)	134
Gambar 4.1.	Perbandingan RLS antar wilayah tahun 2015-2018.....	146
Gambar 4.2.	Perkembangan APK KabupatenCianjur Tahun 2011-2019	147
Gambar 4.3.	Perkembangan APM Kabupaten Cianjur Th 2011-2019.....	148
Gambar 5.1.	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 2025-2045	167
Gambar 6.1	Road Map Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur 2019-2035	202
Gambar 6.2	Capaian Road Map Program Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur 2020-2035	203

Daftar Tabel

Judul	Halaman
Tabel 1.1 Jadwal kegiatan yang akan dilanjutkan Tahun 2019.....	32
Tabel 1.2 Format FGD GD Pembangunan Kependudukan.....	33
Tabel 1.1 Peserta FGD	36
Tabel 2.1 Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Cianjur.....	42
Table 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur	50
Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan 2018.....	51
Tabel 2.4 Penduduk Kabupaten Cianjur Berdasarkan Jenis Kelamin 2018.....	52
Tabel 2.5 Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tinggi di Kabupaten Cianjur Tahun 2018.....	58
Tabel 2.6 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	73
Tabel 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur 2010-201	76
Tabel 2.8 Angka Kesakitan Kabupaten Cianjur Tahun 2019	80
Tabel 2.8.1. Sarana Kesehatan Kabupaten Cianjur 2021	81
Tabel 2.9 Rasio Tenaga Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Penduduk di Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2018	82
Tabel 2.10 Jenis Kelamin Dan Lapangan Kerja Kabupaten Cianjur	91
Tabel 2.11 Status Pekerjaan Dan Lapangan Kerja Kab.Cianjur	93
Tabel 2.12 Status Pendidikan Lapangan Kerja Kab. Cianjur.....	94
Tabel 2.13 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Cianjur 2015-2018.....	96
Tabel 2.14 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Cianjur 2014-2018.....	99

Tabel 2.15 Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan Kemiskinan dan GiniRatio di Kabupaten Cianjur, 2010–2018.....	101
Tabel 2.16 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur, 2010–2018.....	105
Tabel 3.1 ASNMR Penduduk Kabupaten Cianjur	119
Tabel 3.2 Dependency ratio dan AKH	120
Tabel 3.3 Pertumbuhan Penduduk.....	124
Tabel 3.4 SWOT.....	126
Tabel 3.5 SWOT Demografi	134
Tabel 5. 1 Perbandingan LPE dan LPP Kabupaten Cianjur Tahun 2019.....	164
Tabel 5.2 Proyeksi Penduduk dalamUsia Kabupaten Cianjur 2020-2025	166
Tabel 5.3. Proyeksi Penduduk dalam Usia Kabupaten Cianjur 2030-2035	165
Tabel 5.4 Roadmap Kondisi Kuantitas Kependudukan yang Diinginkan.....	167
Tabel 5.5 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2035.....	169
Tabel 5.6 Roadmap Kondisi Kualitas Penduduk yang Diinginkan.....	170
Tabel 5.7 Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS)	171
Tabel 5.8. Scenario Asimtot APM	171
Tabel 5.9. Perkiraan Angka Harapan Hidup 2015-2035	172
Tabel 5. 10. Perkiraan GNI per Kapita Indonesia 2011-2035.....	172
Tabel 5. 11 Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Cianjur 2010-2035.....	173
Tabel 5.12 Roadmap Pembangunan Keluarga	174
Tabel 5. 13 Parameter Pembangunan Keluarga Kabupaten Cianjur 2010-2035 ...	174
Tabel 5.14 Roadmap Kondisi Penataan Persebaran dan Mobilitas KependudukanYang Diinginkan Kabupaten Cianjur 2011-2035	175
Tabel 5.15. Road Map Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur.....	175
Tabel 5.16. Road Map Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur.....	178
Tabel 5.17 Roadmap Pembangunan Database Kependudukan.....	182

Tabel 5.18 Kondisi yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Database Kependudukan Kabupaten Cianjur 2020-2045.....	183
Tabel 6.1 Proyeksi Kependudukan Kabupaten Cianjur Tahun 2020-2035.....	201
Tabel 6.2 Aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk (Aspek pengendalian kelahiran/ Natality)	204
Tabel 6.3 Aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Jumlah, LPP dan kepadatan).....	210
Tabel 6.4 Aspek Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Mortality)	213
Tabel 6.5 Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Kesehatan)	217
Tabel 6.6 Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Ekonomi Ketenagakerjaan)	222
Tabel 6.7 Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Pendidikan)	226
Tabel 6.8 Aspek Kewilayahan di Kabupaten Cianjur	227
Tabel 6.9 Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur.....	228
Tabel 6.10 Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Pengendalian Mortalitas Penduduk di Kabupaten Cianjur	239
Tabel 6.11 Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Kesehatan)	241
Tabel 6.12 Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Ekonomi Ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur.....	245
Tabel 6.13 Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Pendidikan di Kabupaten Cianjur	247
Tabel 6.14 Peningkatan Kualitas Kewilayahan di Kabupaten Cianjur	249
Tabel 6.15 Rantai Pasok Pangan Di Kabupaten Cianjur	250
Tabel 6.16 Penurunan Kriminalitas Di Kabupaten Cianjur	251
Tabel 6.17 Kesesuaian Road Map dengan RPJMD Kabupaten Cianjur	253

Bab I

PENDAHULU AN

1.1. Latar Belakang

Penduduk dalam pengertian umum merupakan suatu populasi yang terkumpul dalam batasan masyarakat berisi umat manusia dalam unit-unit kecil disebut individu dan keluarga. Sekelompok masyarakat dalam suatu penduduk mempunyai keinginan yang sama, yakni mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seperti rasa aman, harmonis, tercukupinya kebutuhan pokok sebagai makhluk hidup seperti makan, minum, melanjutkan keturunan, mendapatkan lingkungan yang sehat secara psikis dan fisik serta berbagai kebutuhan jasmani rohani lainnya yang diperoleh tanpa resiko konflik antar umat manusia.

Keluarga merupakan bagian dari unit kecil yang paling dinamis dalam kehidupan sosial umat manusia sepanjang zaman. Oleh karena itu segala proses pemenuhan hak dan kewajiban memberikan hak orang lain terjadi dalam keluarga, konsep ini yang menjadikan dalam keluarga terdapat struktur sosial dari kepala keluarga sampai anggota dalam keluarga. Lintas keluarga dalam suatu wilayah tertentu akan berhubungan secara sosial dengan antar dan intra unit kecil lainnya. Menurut Arifin (2020) bahwa konsep ini yang telah membangun sistem nilai



sampai terbentuk budaya dalam penduduk yang membedakan satu penduduk dengan penduduk lainnya dengan aturan kenegaraan berupa administrasi kewilayahan. Menurut Arifin, dkk (2019) bahwa orientasi sosial dalam bermasyarakat di suatu wilayah adalah ingin mencapai kesejahteraan, kenyamanan dan keamanan bersama, sehingga dalam konteks kemasyarakatan terbangun aturan hukum yang dibuat bersama, berlaku dan mengikat warga masyarakat untuk mencapai tujuan secara bersama-sama tanpa ada diskriminasi antar umat manusia.

Penduduk dalam perspektif kewarganegaraan adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku) memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga masyarakat di Kabupaten Cianjur memiliki peran yang sama dalam mewujudkan hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga masyarakat dan warga negara. Negara dibentuk untuk menjamin warganya memiliki pertahanan hidup dan kehidupannya, membentuk keluarga, dan mengembangkan diri dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang diatur oleh negara dalam bentuk peraturan perundangan.

Perwujudan pengembangan diri dan kebutuhan dasar warga masyarakat dilakukan melalui ikhtiar kolektif dalam kegiatan bersama bernama pembangunan (Arifin, dkk 2019). Oleh karena itu pembangunan merupakan bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya keadilan sosial, terciptanya kehidupan masyarakat yang selaras dan keberlanjutan pada berbagai aspek seperti yang dijelaskan dalam tujuan akhir konsensus negara (Undang-Undang Dasar 1945). Kondisi ini menjadikan pelaku (subyek) pembangunan adalah manusia dan

sasaran (obyek) pembangunan adalah manusia juga serta dinikmati bersama secara merata bagi penduduk seluruh Indonesia secara berkeadilan.

Kesejahteraan penduduk secara kolektif dalam berbagai aspek pelaku dan obyek diupayakan secara kolektif merupakan definisi sederhana dari **pembangunan penduduk**. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian dari ikhtiar kolektif berbagai indikator untuk mencapai kemakmuran lahiriah dan batiniah dengan berpijak pada kondisi penduduk. Berangkat dari penduduk tersebut maka terdapat dua permasalahan utama dalam pembangunan, yaitu bagaimana penduduk Kabupaten Cianjur akan dibangun dan berapa jumlah anggota penduduk (dalam berbagai perspektif demografis) dapat menikmati dan terlibat dalam pembangunan tersebut.

Upaya pembangunan penduduk dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan manusia, sumberdaya alam, modal (*capital* dan *social*) dan penguasaan atas teknologi serta kekuatan kelembagaan masyarakat bersama pemerintah secara sinergis dalam satu orientasi. Adapun sasaran pembangunan adalah manusia, artinya, proses membangun sasaran pembangunan adalah memanfaatkan, mengelola, dan mengatur berbagai sumberdaya yang dimiliki, antara lain sumberdaya manusia, sumberdaya alam, teknologi dan seni dengan pelaku manusia sebagai bagian dari penduduk yang ada di Kabupaten Cianjur. Atas dasar ini maka suatu pemerintahan (termasuk di tingkat kabupaten) memerlukan rancangan pembangunan manusia yang tepat, agar menghasilkan generasi yang kuat, berdaya juang tinggi dan mampu menjalin keselarasan untuk mewujudkan hak manusia secara bersama tanpa ada dominasi.

Pembangunan manusia dirancang dalam berbagai variabel, salah satunya pembangunan kependudukan. Pembangunan kependudukan dilakukan agar manusia dapat melahirkan generasi yang kuat dan berdaya saing dalam kesejahteraan yang berkeadilan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Manusia yang kuat (jasmaniah dan rohaniah) akan menciptakan subyek pengelola yang arif, cerdas dan sehat dalam menggunakan sumberdaya alam dan teknologi untuk pembangunan yang berorientasi pada masa depan (*sustainability*). Oleh karena itu manusia sebagai komponen kependudukan perlu direkayasa secara arif agar tercipta pelaku pembangunan yang kuat dan cerdas.

Proses pembentukan penduduk di Kabupaten Cianjur dibagi menjadi dua, *pertama* terbentuk dengan tidak disengaja akibat migrasi penduduk ke dalam wilayah yang memiliki daya dukung tinggi dalam mencukupi kebutuhan hidup dibandingkan dengan daerah asalnya. Kondisi pembentuk penduduk model pertama ini banyak menyebar di wilayah yang memiliki sumberdaya dan daya dukung untuk mencari sumber ekonomi kategori tinggi, biasanya terbentuk di wilayah sekitar industri, wilayah kosong dengan kesuburan lahan dan air cukup, perpindahan penduduk ke tempat tertentu akibat alih fungsi kawasan dan lain-lain. Proses pembentukan penduduk yang *kedua* adalah pembentukan penduduk yang terjadi dari dulu (asalnya) sebelum adanya pembentukan Kabupaten Cianjur secara yuridis.

Kabupaten Cianjur merupakan wilayah *buffer zone* ibu kota provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang diandalkan dapat mensuplay berbagai kebutuhan masyarakat ibu kota seperti sumber daya manusia, bahan baku pangan, air dan



sebagainya. Pada aspek eksternal, peran ganda ibu kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan nasional menjadikan wilayah Kabupaten Cianjur sangat strategis dalam pengembangan industri, kawasan wisata dan perdagangan yang cukup handal. Industrialisasi manufaktur di wilayah Kabupaten Cianjur terbukti dapat meningkatkan daya dukung ekonomi wilayah. Dampak peningkatan daya dukung ekonomi adalah dijadikannya wilayah Cianjur sebagai wilayah strategis bagi kaum migran untuk bekerja. Para migran kemudian menempati ruang-ruang di sekitar lokasi industri sepanjang Kecamatan Ciranjang sampai Warungkondang. Dampak mobilisasi masuk penduduk dari luar Kabupaten Cianjur menjadikan wilayah industri menjadi wilayah padat penduduk.

Proses pembentukan penduduk dalam kategori *Kedua*, adalah penduduk yang terbentuk dengan sengaja melalui regulasi negara dalam pembentukan wilayah baru untuk perluasan, kawasan pemerintahan, kawasan industri dan sebagainya. Proses perkembangan penduduk di Kabupaten Cianjur masuk dalam kategori ini. Kabupaten Cianjur dahulunya adalah termasuk kedalam wilayah Kerajaan Pajajaran. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kepercayaan masyarakat Cianjur yang sama dengan masyarakat pada jaman kerajaan pajajaran yang banyak mengenal kebudayaan hindu.

Cianjur pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wiratma yang merupakan putra R.A. Wangsa Goparana Dalem Sagara Herang pada tanggal 12 Juli 1677. Pada pertengahan abad ke-17 terjadi perpindahan rakyat dari Talaga ke Sagara Herang yang dipimpin oleh Aria wangsa Goparana. Ia adalah keturunan Kerajaan Talaga, yang terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk Islam, sedangkan para

Sunan Talaga waktu itu masih kuat memeluk Hindu. Dia mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan Agama Islam ke daerah sekitarnya. Bersama dengan Pangeran Girilaya, dia mendirikan pesantren. Kota Cianjur menjadi Kota Keresidenan Priangan pada masa Raden Kusumah Diningrat dengan wilayah meliputi Pelabuhan Ratu sebelah barat, Sungai Citanduy dengan barisan Gunung Halimun, Mega Mendung, Tangkuban Perahu sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah selatan.

Pada masa Bupati R.A.A Prawiradiredja wilayah Cianjur mengalami perubahan menjadi Cikole sebelah barat, Sukabumi sekarang, Bandung dan Tasikmalaya dengan Ibukota Keresidenan dipindahkan ke Bandung. Perjalanan sejarah panjang wilayah Cianjur sebagai pusat kota Kerajaan Padjadjaran kembali menguat setelah runtuhnya Wilayah Galuh Pasundan. Pada tanggal 3 Juni tahun 1482 Mahesi Prabu Siliwangi dinobatkan sebagai Raja Padjadjaran. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Jawa Barat dan sebagian Sumatera. Deskripsi ini menggambarkan bahwa sejak lama wilayah Kabupaten Cianjur telah menjadi pusat berkerumunnya manusia sampai kerajaan tersebut hancur pasca distorsi oleh kerajaan Islam di Jawa Barat.

Pada zaman Beland, wilayah Cianjur dibangun secara masif sehingga padatahun 1745 Cianjur berdiri dengan lima distrik. Sejak abad 19 pemerintah Kolonial Belanda menjadikan wilayah Cianjur sebagai pusat pengembangan pertanian dan perkebunan. Pertanian yang berkembang didukung oleh kesuburan lahan dan hidrologis yang mapan dari aliran sungai Citarum, Cikundul dan Cilaku.

Pertanian di wilayah ini masih berkembang baik walaupun harus beriringan dengan industrialisasi kawasan kota dan pinggiran kota yang cukup masif.

Faktor migrasi penduduk dan jumlah kelahiran yang tinggi menjadikan kabupaten Cianjur memiliki laju pertumbuhan sebesar 1,29 pada tahun 2020 (BPS Kabupaten Cianjur, 2021). Jumlah penduduk yang cukup besar menjadikan isu kependudukan di wilayah Kabupaten Cianjur sangat strategis. Pembangunan Kabupaten Cianjur harus dapat menciptakan sumberdaya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pengembangan diri manusia secara berkelanjutan dari generasi ke generasi dalam arus maupun *density* penduduk yang tinggi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 yang memberi makna kontekstual setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, dengan mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan dan bagaimana pembangunan kependudukan itu sendiri akan dicapai menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang selaras antara kuantitas dan kualitas penduduk. Perwujudan pembangunan kependudukan dikonstruksi melalui regulasi yang terstruktur dalam mengelola natalitas, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya

yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang wawasan kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Cianjur.

Perencanaan kependudukan pada era otonomi daerah memerlukan orientasi nilai dan tujuan yang jelas, informasi yang terbuka dan saling terintegrasi dalam kemerdekaan berpendapat. Pembangunan kependudukan juga menganut prinsip desentralisasi berkoridor demokrasi *civil society* dalam model *button up*. Strategi yang diupayakan untuk bisa memberikan nafas pembangunan kependudukan dalam kontek pembangunan daerah salah satunya adalah dengan menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan. Banyak variabel yang diperhitungkan sesuai asumsi perkembangan sosiologis yang sangat dinamis di masa milenial. Namun demikian perancangan pembangunan kependudukan akan dikaji dalam 5 (lima) aspek pokok kependudukan, yakni (i) *pengendalian kuantitas penduduk*; (ii) *peningkatan kualitas penduduk*; (iii) *pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk*; (iv) *pembangunan keluarga*; (v) *integrasi data dan informasi kependudukan* dalam pembangunan secara umum di Kabupaten Cianjur.

Kuantitas penduduk merupakan dinamika populasi suatu wilayah yang terbangun atas rangkaian banyaknya kelahiran penduduk (*fertility*), kematian penduduk (*mortality*), dan mobilitas penduduk (*immigration and emigration*). Dari sisi kuantitas penduduk Kabupaten Cianjur memiliki kepadatan yang tidak begitu tinggi. Penduduk di Kabupaten Cianjur menurut BPS tahun 2021 sebanyak 2.477.560 jiwa atau sebesar 5,10 persen dari jumlah penduduk Jawa barat pada tahun 2020 yaitu 48.270.389 jiwa. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah

penduduk tahun 2017 penduduk Cianjur mengalami pertumbuhan yang cukup besar di saat penduduk Jawa Barat mengalami penurunan dari proyeksi sebelumnya.

Kuantitas penduduk berpengaruh langsung terhadap kepadatan penduduk. Angka kepadatan penduduk menjadi dasar bagi pengelola pembangunan untuk menetapkan daya tampung wilayah, jumlah rumah hunian, tingkat kualitas lingkungan fisik dan sosial, pengelolaan pendidikan seperti jumlah sekolah (termasuk guru dan fasilitas infrastrukturnya), pelayanan kesehatan seperti jumlah layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan, ketahanan pangan seperti jumlah pasokan bahan makanan pokok dan kemampuan wilayah dalam mensuplay pangan dari hasil pertaniannya, dan faktor-faktor lainnya yang berpengaruh langsung terhadap capaian kualitas penduduk dan pembangunan keluarga.

Faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas penduduk berikutnya adalah tingkat angka kematian. Kematian dikendalikan oleh pola hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh seluruh warga masyarakat. Angka kematian ibu, anak, dan orang dewasa menggambarkan pola hidup yang dibangun dalam keluarga, meliputi keberlanjutan kecukupan gizi keluarga, pola hidup sehat individu dan sosial serta pemahaman masyarakat dalam aspek kesehatan fisik dan lingkungan serta psikososial lainnya.

Satu indikator kemajuan bangsa selain jumlah pengeluaran bidang rekreasi, juga tingkat mobilitas penduduk. Dengan demikian, mobilitas adalah harga yang harus dibayar dari suatu proses pembangunan. Tantangan pembangunan kependudukan di Kabupaten Cianjur hari ini dan ke depan salah satunya masalah *imigration* (orang masuk) di wilayah padat penduduk. Di sisi lain, terjadi stagnasi



migrasi di wilayah kosong, kering dan terjal khususnya wilayah selatan dan barat daya. Akselerasi pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah padat, terpicu oleh berbagai sebab dan akibat yang pada gilirannya dapat mengusik beban pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan ilustrasi di atas maka pembangunan kependudukan harus menfokuskan diri dalam menata beberapa indikator penting yang menjadi perhatian serius dalam pembangunan kependudukan. Secara objektif kondisi indikator kependudukan di Kabupaten Cianjur selain laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah rata-rata kelahiran anak di beberapa kecamatan yang masih tinggi, usia perkawinan pertama yang tinggi dalam angka perceraian yang tinggi pula, MJP yang harus ditingkatkan karena data keluarga prasejahtera dan sejahtera masih rendah dengan desa tertinggal yang tersebar di banyak kecamatan wilayah kering. Demikian juga pada aspek mobilitas, regulasi dan arah migrasi penduduk serta peningkatkan kualitas desa dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, atau maju bahkan mandiri. Kondisi yang beririsan, terdapat wilayah kering dan terjal dengan infrastruktur yang jelek serta memiliki kerawanan terhadap bencana longsor dan kekeringan. Kondisi geografis dan demografis ini memicu variasi nilai komponen indikator pembangunan daerah.

Berdasarkan ilustrasi di atas maka perlu disusun *grand design* pembangunan kependudukan di Kabupaten Cianjur untuk melengkapi dokumen perencanaan pembangunan yang ada. *Grand design* pembangunan kependudukan ini disusun berdasarkan lima variabel pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga,

pengarahan mobilitas penduduk dan integrasi data informasi kependudukan secara komprehensif. *Grand design* pembangunan kependudukan ini akan dijadikan sebagai referensi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan pembangunan kependudukan di Kabupaten Cianjur secara integratif.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan ***Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur*** antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)

- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614)
- g. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
- h. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

- i. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- j. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- k. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- l. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- m. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- n. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata.
- o. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- p. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1.3. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 pada jangka menengah, yaitu:

Cianjur Lebih Maju dan Agamis

Adapun Visi dari pembuatan *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Cianjur adalah terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup baik berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan sehingga kualitas penduduk dan mobilitasnya dapat ditingkatkan, hal ini dimulai dari pembangunan keluarga dalam tatanan data dan informasi yang terintegrasi. Hal sejalan dengan arah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur yang ingin ***Memantapkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas melalui Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.***

Perwujudan visi Kabupaten Cianjur dijabarkan dalam Misi Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

1. Peningkatan pembangunan Infrastruktur

Peningkatan pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur berkaitan dengan pelayanan dasar berupa sarana pendidikan, kesehatan ,sarana penunjang perekonomian

masyarakat sehingga menjadikan kabupaten terdepan dalam upaya mensejahterakan rakyatnya

2. Peningkatan pembangunan religius Keagamaan

Pembangunan religious keagamaan dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, kelaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan *pelayanan public*. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan budaya kerja. Reformasi diarahkan pada upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), dan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.

3. Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui Pembangunan Bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi

Komitmen pertama yang dijabarkan dalam misi ketiga ini adalah pertama harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang diberikan pada peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan peringkat kelulusan semua jenjang pendidikan. Komitmen kedua dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan. Komitmen ketiga Hal ini merupakan upaya meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Tingkat kehidupan

yang layak dimaksud diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Power Parity Purchase, dalam rupiah) Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 , isu strategis prioritas pembangunan Kabupaten Cianjur diarahkan pada :

1. Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Sosial
4. Pembangunan Prasarana Wilayah
5. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
6. Penerapan Reformasi Birokrasi
7. Pembangunan Kewilayahan

Perwujudan misi tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) mempunyai arah misi yang dibangun meliputi:

1. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan meningkatkan peran serta masyarakat melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan.
2. Membina ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
3. Menyediakan data keluarga yang berkualitas untuk pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, kesejahteraan, pemenuhan hak dan perlindungan anak serta perempuan.
5. Peningkatkan promosi, advokasi dan pengembangan jejaring kemitraan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

1.4. Arah Kebijakan

Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur diarahkan untuk menyusun arah kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur, antara lain:

1. Pembangunan penduduk melalui pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Cianjur perlu dirancang dalam suatu desain pembangunan yang dapat dijalankan oleh semua pihak baik pemerintah maupun elemen masyarakat secara sistematis dan efektif dalam mengendalikan jumlah penduduk dan persebarannya sampai di tingkat desa.
2. Pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas penduduk, merupakan bagian dari tujuan pembangunan yang dalam implementasinya mempengaruhi indeks pembangunan manusia, seperti tingkat kesehatan, pendidikan (jumlah lulusan pada berbagai tingkat pendidikan, fasilitas pendidikan, serapan tenaga kerja berdasarkan lulusan pendidikan dan lain-lain), tenaga kerja, dan daya beli masyarakat secara kolektif, kedaulatan pangan atau ketahanan pangan daerah, pengelolaan kualitas lingkungan yang sehat dan

meningkatkan indeks desa membangun sehingga mampu menurunkan persoalan sosial di Kabupaten Cianjur.

3. Persebaran penduduk yang tidak merata dan terkonsentrasi di daerah industri dan sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Cianjur berimplikasi pada kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan, yang pada akhirnya suatu saat akan menimbulkan permasalahan lingkungan hidup, pasokan pangan dan masalah sosial. Arah persebaran penduduk harus diperbaiki dengan membangun infrastruktur dan penataan hidrologi wilayah yang mampu mendistribusi industri dalam suatu wilayah yang tetap nyaman bagi investasi. Konsep ini mampu meningkatkan mobilitas penduduk di kabupaten Cianjur dalam rangka menghadapi bonus demografi 2030-2045.
4. Kesadaran pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dimulai dari tata kelola keluarga yang nyaman, aman dan dinamis. Pembangunan keluarga menjadi *starting point* dalam mewujudkan kualitas SDM di Kabupaten Cianjur.
5. Pembangunan penduduk berkelanjutan membutuhkan data dan informasi penduduk yang akurat, *akuntable* dan dinamis sesuai perkembangan wilayah, integrasi data dan informasi penduduk menjadi tolok ukur dalam perencanaan, penyusunan program pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk, mobilitas dalam ketahanan keluarga yang mapan.

Berkaitan dengan arah kebijakan tersebut maka pembangunan kependudukan di konsentrasikan pada lima aspek yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk dan mobilitas penduduk, pembangunan keluarga dan data

informasi kependudukan terintegrasi di mana selama ini belum ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan secara umum adalah Menyajikan Grand Desain Kependudukan Kabupaten Cianjur Tahun 2022 - 2037, sebagai salah satu informasi dalam penentuan kebijakan, perencanaan pembangunan serta evaluasi hasil pembangunan antara lain :

1. Memberikan arah kebijakan bagi pelaksanaan pengendalian penduduk di Kabupaten Cianjur untuk tahun 2022 – 2037
2. Menyusun arah pembangunan berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan serta persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Cianjur agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan,
3. Merumuskan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kualitas penduduk sehingga Kabupaten Cianjur lebih siap dalam menyambut bonus demografi. Kesiapan tersebut ditinjau dari aspek seperti lingkungan yang aman secara fisik dan sosial, generasi yang sehat lahir dan batin dengan kondisi daya tampung yang layak dalam suplay pangan. Dengan demikian maka peningkatan aspek pendidikan, pembangunan desa, lingkungan

hidup dan ekonomi lainnya dapat ditingkatkan untuk menciptakan generasi yang kuat lahir dan batin.

4. Menyusun desain program kegiatan untuk peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga untuk mendapatkan generasi yang memiliki mobilitas tinggi dalam peran pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas data serta informasi keluarga yang sinergis dengan pembangunan manusia secara integrative dengan sektor lainnya.

1.6. Sasaran dan Kegunaan

Sasaran dalam kajian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak, yaitu pemerintah Kabupaten Cianjur, penduduk Kabupaten Cianjur dan masyarakat atau *stakeholder* yang berhubungan dengan aspek kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Cianjur.

1.7. Ruang Lingkup

1. Kuantitas penduduk, meliputi komposisi dan persebaran penduduk.
2. Kualitas penduduk, meliputi kesehatan, pendidikan, dan daya beli atau ekonomi penduduk.
3. Pembangunan keluarga, meliputi tingkat perceraian, pernikahan anak, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kawasan layak anak, penanganan tuna wisma dan pengemis serta PMKS serta penyerapan tenaga kerja yang berkontribusi langsung terhadap tanggungan keluarga

dan ekonomi daerah.

4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, meliputi kepadatan penduduk pada tiap kecamatan dan struktur usia produktif di masing-masing kecamatan dan berbagai faktor penyebabnya untuk mencegah terjadinya bencana *habitat III*.
5. Kebijakan pembangunan kependudukan dan penataan administrasinya.

1.8. Pengertian Umum

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk secara sah bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006)
2. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006).
3. Data kependudukan adalah data perorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006)
4. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang-undang Nomor 10 tahun 1992)
5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik

serta ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian dan layak.(Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009)

6. Grand Desain Perkembangan Penduduk adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas serta peramalannya yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang dengan membangun keluarga dalam system data dan informasi yang terintegrasi lintas sektoral.
7. Persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (Undang-undang Nomor 10 tahun 1992).
8. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-undang no. 23 tahun 2006).
9. Perkembangan kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup.

1.9. Penjelasan Indikator

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Untuk menghitung jumlah penduduk dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P_t = P_o + (B-D) + (M_i-M_o)$$

Dimana:

P_t	= jumlah penduduk pada tahun t
P_o	= jumlah penduduk pada tahun dasar (0)
B(Birth)	= jumlah kelahiran selama periode 0-t
D(Death)	= jumlah kematian selama periode 0-t
M_i	= jumlah migrasi masuk selama periode 0-t
M_o	= jumlah migrasi keluar selama periode 0-t

2. Kepadatan Penduduk

Rasiokepadatan pendudukdapatdihitungdengan menggunakan rumus:

$$D = \frac{P}{A}$$

Dimana:

D = rasio kepadatan penduduk (jiwa/Km²)

P = jumlah penduduk (jiwa)

A = Luas Wilayah (Km²)

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$P_t = P_0 e^{rt}$$

Dimana:

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

P_0 = jumlah penduduk pada tahun dasar (0)

r = angka pertumbuhan penduduk

t = periode waktu antara tahun dasar dan tahun t

e = fungsi eksponensial = 2,718281

4. Rasio Ketergantungan

Data yang dipergunakan untuk menghitung rasio ketergantungan adalah jumlah usia 0-14 tahun 54 tahun. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$RK_{muda} = \frac{P_-}{P_+}$$

$$RK_{tua} = \frac{P_+}{P_-}$$

$$RK_{total} = \frac{P_- + P_+}{P_-}$$

Dimana:

RK_{total} = Rasio Ketergantungan penduduk Usia muda dan tua

RK_{muda} = Rasio Ketergantungan penduduk usia muda

RK_{tua} = Rasio Ketergantungan penduduk usia tua

Po-14	= Jumlah penduduk usia muda (0-14)
P65+	= Jumlah penduduk usia produktif (65tahun ke atas)
P15-64	= Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun)

5. Rasio Jenis Kelamin

Data yang diperlukan untuk menghitung rasio jenis kelamin adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur lima tahunan pada suatu tahun tertentu. Rasio jenis kelamin dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$SR = \frac{P_L}{P_p} \times 100$$

Dimana:

SR = rasio jenis kelamin

$\sum L$ = jumlah penduduk laki-laki

$\sum P$ = jumlah penduduk perempuan

XK = konstanta = 100 penduduk perempuan

6. Angka Perkawinan Kasar

Data yang digunakan dalam menghitung angka perkawinan kasar adalah jumlah perkawinan dalam satu tahun dan jumlah penduduk awal tahun dan akhir yang sama. Angka perkawinan kasar dengan menggunakan rumus;

$$M = \frac{M}{P} \times 1000$$

Dimana :

M = angka perkawinan kasar

M = jumlah perkawinan dalam satu tahun

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama

K = konstanta= 1000

7. Angka Perkawinan Umum

Data yang diperlukan untuk menghitung angka perkawinan umum adalah jumlah perkawinan 15 tahun ke atas. Angka umum ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$M = \frac{M}{P_{15}} \times 1000$$

Dimana:

Mu = angka rasio perkawinan kasar

M = jumlah perkawinan dalam satu tahun

P15 = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas

K = konstanta 1000

8. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Untuk menghitung Angka Perkawinan Spesifik (Angka Perkawinan Menurut kelompok Umur) menggunakan rumus :

$$m_i^s = \frac{M_i^s}{P_i^s} \times 1000$$

Dimana:

m_i^s = Angka perkawinan menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s)

M_i^s = Jumlah perkawinan menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s)

padat tahun tertentu

P_i^S = Jumlah penduduk menurut kelompok umur (i) dan jenis kelamin (s) pada pertengahan tahun yang sama.

9. Angka Perceraian Umum

Angka perceraian umum lebih cermat dibandingkan dengan angka perceraian kasar. Angka perceraian umum ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$d = \frac{Dv}{P_{15}} \times 1000$$

Dimana:

d = angka perceraian umum

Dv = jumlah perceraian dalam satu tahun

P₁₅ = jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun

K = konstanta = 1000

10. Angka Perceraian Kasar

Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$d = \frac{D_v}{P_{15}} \times 1000$$

Dimana:

d = Angka Perceraian Kasar

Dv = jumlah perceraian dalam satu tahun

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun

K = konstanta-1000

11. Rasio Anak dan Perempuan

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak dibawah lima tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan pendudukusia 15-49 tahun.

Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indicator fertilitas penduduk apabila tidak ada dat kelahiran dan data registrasi. Untuk menghitung rasio anak dan perempuan digunakanrumus:

$$CWR = \frac{C_{0-4}}{W_{15-19}} \times k$$

Dimana:

CWR = rasio anak dan perempuan

P0-4 = jumlah penduduk di bawah 5 tahun (0-4tahun)

P15-49 = jumlah penduduk perempuan umur15–49 tahun

K = Konstanta 100

1.10. Metode Pengkajian

Pengkajian penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat bersifat multidisiplin dan mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed method approach*). Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, Focus Group Discussion, pengambilan data sekunder serta penelusuran pustaka. Wawancara yang dilakukan meliputi

wawancara dengan masyarakat (*face-to-face interview*), *key informant interview* (termasuk *expert interview*) dan *Focus Group Discussions* (FGD).

Secara umum kegiatan ini meliputi tiga kegiatan besar yang terdiri atas:

1. Inventarisasi/Karakterisasi

Karakterisasi meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi, deskripsi kuantitatif dan kualitatif, dan dokumentasi dari populasi penduduk yang tersebar di Kabupaten Cianjur. Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemetaan potensi wilayah, kependudukan yang meliputi kualitas, kuantitas, ketahanan keluarga dan data kependudukan sebagai bagian dari pembangunan komprehensif dalam pemerataan ekonomi atau sumberdaya lainnya dengan memanfaatkan daya dukung wilayahnya. Tahap inventarisasi ini menjadi dasar bagi kegiatan tahap pengembangan. Metode yang dapat digunakan dalam hal ini adalah metode *descriptive exploratif*.

2. Strategi dan Pengembangan/pemanfaatan

Kegiatan pada tahap pemanfaatan disesuaikan dengan informasi yang diperoleh pada tahap karakterisasi. *Social mapping* digunakan dalam mengeksplorasi kegiatan strategi dan pengembangan.

Pada tahap ini perlu dilakukan formulasi model pengembangan kawasan kependudukan dengan mengidentifikasi intervensi teknis yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat secara berkelanjutan. Selain itu, studi pustaka, *key informant interview* dan FGD

serta observasi diperlukan untuk mendukung model. Pada tahap ini penerapan model bisa mulai dilakukan.

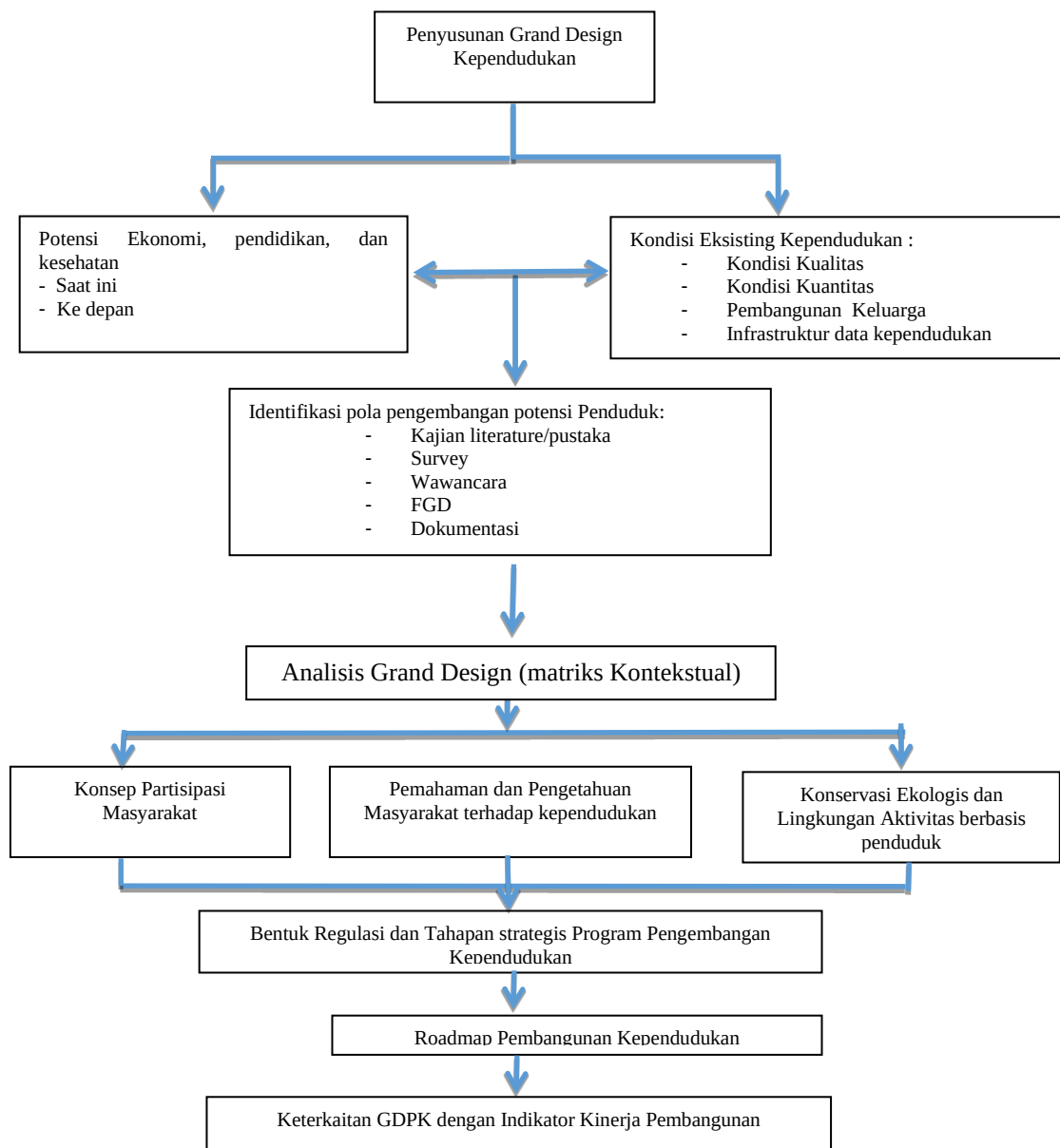
3. Analisis Desain dan Strategi

Analisis ini diperlukan untuk menyusun pola regulasi dalam mengkonstruksi tahapan pembangunan kependudukan. Analisis ini terdiri dari:

- a. Analisis situasi desa dan kota secara obyektif mampu menggambarkan aspek-aspek kependudukan dan potensi bonus demografinya
- b. Evaluasi dan pendalaman struktur perencanaan pembangunan daerah dari provinsi hingga ke desa-desa yang berpihak pada pembangunan penduduk
- c. Analisis *social mapping* untuk mencari bentuk pemberdayaan masyarakat yang tepat bagi pengendalian penduduk dan peningkatan kualitasnya
- d. Penyusunan tahapan prioritas program dan para pelakunya serta sinergitas multi pihak dalam membangun penduduk di Kabupaten Cianjur
- e. Diseminasi kegiatan untuk mencari imbal balik dari desain yang telah disusun dalam *draft* dokumen .

e.1. Tahapan Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.



Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Penyusunan GDPK

e.2. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan kajian Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Bulan pertama adalah tahap persiapan yang meliputi: penyelesaian administrasi, rekrutmen tenaga ahli, rekrutmen tenaga lapangan, penyusunan proposal dan rapat tim persiapan teknis lapangan.
- b. Bulan kedua adalah pengumpulan data sekunder berupa FGD: *desk study*, workshop penyiapan instrumen lapangan, dan paparan laporan pendahuluan.
- c. Bulan ketiga adalah pengumpulan data primer dengan melakukan survei/pengumpulan data lapangan, wawancara mendalam, FGD.
- d. Bulan keempat adalah tahap pengolahan data primer dan sekunder dan analisis kajian, serta kegiatan paparan rancangan laporan akhir.

Jadwal pelaksanaan beserta waktu yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan yang Akan Dilanjutkan Tahun 2019

Kegiatan	September				Oktober				November				Desember			
Persiapan																
Survey data sekunder dan literatur																
Persiapan laporan pendahuluan																
FGD 1, 2, dan 3																
Pengolahan data																
FGD 4, 5, dan 6																
Penyusunan laporan perkembangan																
FGD 7, 8, dan 9																
Penyusunan laporan akhir																
Presentasi Akhir dan sosialisasi																

4. TOR Focus Group Discussion Grand Desain Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur 2022-2037

Tabel 1.2 Format FGD GD Pembangunan Kependudukan

JUMLAH FGD	:	8 (enam) Kali
TEMA	:	Kondisi Kuantitas, Kualitas Penduduk, Pembangunan Keluarga, Mobilitas dan Data Kependudukan di Kabupaten Cianjur
SUB TEMA	:	1. Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk, Piramida Penduduk, Natalitas, Mortalitas, dan Progres Program KB 2. Pendidikan, ketenagakerjaan, pengangguran terbuka, tingkat ketergantungan, kesehatan dan pangan serta kualitas lingkungan hidup 3. Ketahanan keluarga, rumah tangga miskin, pernikahan dini dan PUS 4. Pendataan penduduk terintegrasi 5. Regulasi mobilitas penduduk
Tempat	:	Bappeda Kabupaten Cianjur
Nara Sumber 1. Perguruan Tinggi 2. Konsultan 3. Government	: : :	1. Dr. Ferry Hadiyanto, SE, MA. 2. Dr. Johar Arifin, MP KKI Jawa Barat 1. Bappeda Kabupaten Cianjur 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Cianjur 3. <i>Stake holder</i> vertical dan horizontal
Pelaksana Kegiatan	:	Bappeda Kabupaten Cianjur
Obyek Kajian	:	1. Analisis Kuantitas Kependudukan Kabupaten Cianjur 2. Analisis Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur 3. Analisis Persebaran dan mobilitas Penduduk Kab. Cianjur 4. Potensi pembangunan Keluarga Kab. Cianjur 5. Analisis Data dan Informasi Kependudukan Kab. Cianjur

Adapun tujuan diselenggarakannya FGD penyusunan *grand design pembangunan kependudukan di Kabupaten Cianjur* antara lain :

1. Mempertemukan *multi pihak multi* yang terkait dengan pembangunan kependudukan baik kualitas maupun kuantitas serta terlibat langsung dalam tanggungjawab peningkatan indeks pembangunan manusia
2. Menyusun deskripsi langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh *multi pihak* secara sinergis dalam mengelola penduduk dengan percepatan konektivitas lintas SKPD di lingkungan Kabupaten Cianjur.
3. Memberi masukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang tahapan kajian dalam membangun kependudukan yang berorientasi pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian kuantitasnya .
4. Menyusun aksi *multi pihak* yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, koalisi kependudukan dan perguruan tinggi untuk percepatan pembangunan kependudukan di Kabupaten Cianjur

Subyek yang terlibat dalam kegiatan ini adalah

1. BAPPEDA Kabupaten Cianjur
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cianjur
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
4. Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur

- 
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
 7. Badan Litbang Daerah Kabupaten Cianjur
 8. Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
 9. Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cianjur
 11. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur
 12. Unsur Kecamatan (10 Kecamatan)
 13. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kabupaten Cianjur
 14. Koordinator PLKB Kabupaten Cianjur
 15. Unsur Masyarakat (Aisyiah Muhammadiyah, Muslimat Persis, Ketua Muslimat NU Kabupaten Cianjur)

Adapun jumlah peserta FGD adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Peserta FGD

No	Instansi	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	BAPPEDA Cianjur	2	Bidang dan staf
2.	Dinas P2KBP3A Kabupaten Cianjur	10	Kadis, Sekdis, 3 (tiga) Kabid, 4 (empat) Kasi, 2 (dua) staf
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur	2	Bidang Data Kependudukan dan Kasi
4	Koalisi Kependudukan Provinsi Jawa Barat	2	Ketua dan Kabid Regulasi
5	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur	2	Bidang Ketahanan Pangan
6	Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur	3	Bidang Perencanaan, 2 Kasi
7	Badan Litbang Daerah Kabupaten Cianjur	2	Kepala dan staf
8	Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur	4	2 (dua) Bidang kesehatan masyarakat 2 (dua) Bidang KIA
9	Dinas Sosial Kabupaten Cianjur	2	Bidang Kemiskinan dan staf
10	Koordinator PLKB Kabupaten Cianjur	2	Koordinator dan wakil
11	Unsur Masyarakat	2	Ketua dan staf Muslimat NU Kabupaten Cianjur
12	Kecamatan	5	Camat
Jumlah		38 orang	

Bab II

KONDISI UMUM KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR

2.1. Gambaran Umum Geografis Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur merupakan wilayah legendaris yang dikenal dunia sejak zaman kerajaan pertama di tanah Jawa yaitu Kerajaan Tarumanegara dengan Raja pertama bernama Prabu Purnawarman. Wilayah Cianjur sebagai basis pertanian, pusat arkeologi kerajaan kuno dan geografis yang indah juga terbangun kembali pada zaman pra kolonial yaitu bagian penting dari kerajaan Galuh Pasundan dan Kerajaan Pajajaran. Wilayah Cianjur pada masa Kolonial tercatat sebagai kabupaten, Adipati atau distrik dari dinamika kerajaan Hindia-Belanda.

Pembangunan wilayah Cianjur pada masa kolonial dilakukan seiring dengan selesainya pembangunan infrastruktur aksesibilitas Tatar Pasundan oleh Gubernur Daendels. Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain Jalan Bogor-Bandung,

Jalan Bandung-Jakarta. Pembangunan yang terlihat belum selesai adalah wilayah selatan pesisir pantai menghubungkan Kabupaten Cianjur ke distrik lainnya. Keseluruhan pembangunan jalan tersebut dilakukan sebagai upaya mengintegrasikan aksesibilitas jalan antar wilayah kabupaten dan provinsi. Pembangunan pada masa awal kemerdekaan lebih terfokus pada konsolidasi pasca perang agresi militer Belanda. Pada awal kemerdekaan, Kabupaten Cianjur menjadi bagian penting dari perang kemerdekaan. Pasca perang kemerdekaan, Kabupaten Cianjur dibangun kembali secara gotong royong dan kegiatan ekonomi pertanian, perkebunan dan pariwisata mulai bergerak secara masif sampai sekarang.

Pada dekade terakhir, pembangunan Kabupaten Cianjur berkembang kearah perkantoran, perdagangan, pabrik, manufaktur dan perumahan. Bertambahnya sarana ekonomi, lapangan kerja dan hiburan serta diiringi pembangunan infrastruktur aksesibilitas maka Kabupaten Cianjur menjadi wilayah yang padat namun tidak merata. Wilayah industrialisasi disebelah utara telah merubah persawahan, pekarangan dan ruang terbuka menjadi pemukiman, bangunan pabrik, gudang dan sarananya. Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak antara 106° 42' - 107° 25' Bujur Timur dan 6° 21' - 7° 25' Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah daerah meliputi :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut

- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha. Secara geografis, Kabupaten Cianjur dibedakan dalam tiga Wilayah Pembangunan yakni Wilayah Utara (meliputi 16 Kecamatan, antara lain : Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet dan Haurwangi). Wilayah Tengah (meliputi 9 Kecamatan, antara lain : Sukanagara, Takokak, Campaka, Campakamulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati dan Kadupandak) dan Wilayah Selatan (meliputi 7 Kecamatan, antara lain : Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu dan Pasirkuda).

Dari Luas Wilayah yang dimiliki Kabupaten Cianjur, distribusi pemanfaatannya meliputi: 83.034 Ha (23,71%) berupa hutan produktif dan konservasi dengan luas 58,101 Ha(16,59%), pertanian lahan basah dengan luas 97,227 Ha (27,76 %), lahan pertanian kering dan tegalan dengan luas 57,735 Ha (16,49 %) berupa tanah perkebunan; 3.500 Ha (0,10 %) berupa tanah dan pengembalan/pekarangan; 1.239 Ha (0,035 %) berupa tambak/kolam; 25.261 Ha (7,20 %) berupa pemukiman/pekarangan; dan 22.483 Ha (6,42 %) berupa pegunungan lain-lain.

bagian pinggir sehingga membentuk mangkok raksasa. Berikut disajikan klasifikasi morfologi dalam topografi wilayah Kabupaten Cianjur

Tabel 2.1 Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan (%)	Topografi
Agrabinta	7 - 600	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Leles	7 - 600	0 - 25	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Sindangbarang	7 - 500	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit
Cidaun	7 - 500	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit
Naringgul	800 - 2.300	15 - 40	Bukit, Terjal
Cibinong	141 - 800	3 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Cikadu	141 - 950	15 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Tanggeng	350 - 1.200	3 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Pasirkuda	350 - 1.200	3 - 40	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Kadupandak	350 - 1.200	0 - 25	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Cijati	350 - 1.200	0 - 25	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Takokak	800 - 2.100	15 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Sukanagara	700 - 1.010	15 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Pagelaran	350 - 1.200	15 - 40	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Campaka	475 - 700	15 - 40	Dataran, Lereng, Bukit
Campaka mulya	475 - 700	15 - 40	Dataran, Lereng, Bukit
Cibeber	200 - 1.250	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Warungkondang	300 - 900	0 - 40	Dataran, Bukit, Terjal
Gekbrong	300 - 900	0 - 40	Dataran, Bukit, Terjal
Cilaku	436 - 675	0 - 30	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Sukaluyu	200 - 316	0 - 30	Lereng, Bukit
Bojongpicung	200 - 450	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit
Haurwangi	200 - 450	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit
Kecamatan	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan (%)	Topografi
Ciranjang	200 - 316	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit

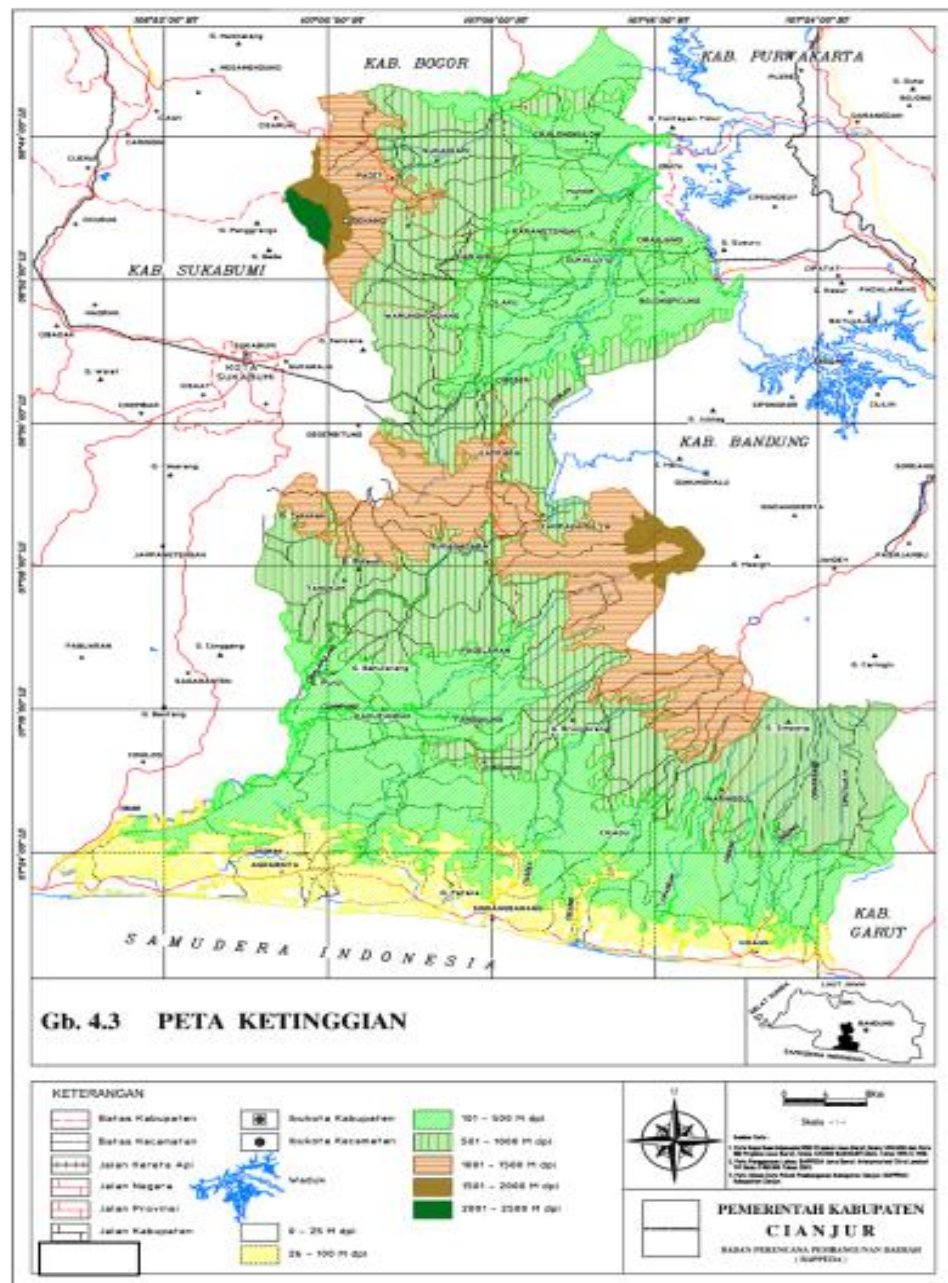
Mande	250 - 500	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit
Karangtengah	350 - 375	0 - 30	Dataran, Lereng, Bukit
Cianjur	436 - 675	0 - 25	Dataran, Lereng, Bukit
Cugenang	300 - 1.035	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal
Pacet	1.080 - 2.962	3 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Cipanas	1.080 - 2.962	3 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Sukaesmi	1.080 - 1.450	3 - 40	Lereng, Bukit, Terjal
Cikalongkulon	225 - 500	0 - 40	Lereng, Bukit
Kabupaten Cianjur	7 - 2.962	0 - 40	Dataran, Lereng, Bukit, Terjal

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2021 diolah)

Berdasarkan gambaran topografis Kabupaten Cianjur di atas, wilayah Kabupaten Cianjur didominasi kontur yang berbukit dan terjal dengan kemiringan maksimal 40 persen kecuali di puncak gunung yang mencapai >60 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Cianjur merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan yang memiliki panorama indah. Namun dibalik panorama perbukitan dan pegunungan tersimpan problem utama dalam persebaran penduduk, yakni infrastruktur yang belum baik secara merata akibat kondisi medan dan kondisi hidrologis yang kering di wilayah selatan.

Modus persebaran penduduk adalah wilayah datar atau berbukit dengan kondisi suplay air yang cukup sepanjang tahun untuk kebutuhan hidup, makan dan minum serta kebutuhan pertaniannya. Pada wilayah dengan hidrologis yang rendah memiliki problem utama lingkungan yang terkait langsung dengan kependudukan,

yakni kerawanan bencana longsor di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Untuk lebih jelasnya sebaran topografis Kabupaten Cianjur dapat dilihat dalam peta berikut ini.



Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Cianjur

Sumber: Perda Nomor 12 tahun 2017 tentang RTRW

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa wilayah Cianjur secara umum merupakan dataran tinggi (ketinggian di atas 754 meter dpl) dengan kondisi lahan datar sebesar 43 persen dan lahan pegunungan 57 persen. Ruang datar berada di areal lembah cekungan yang berbatasan dengan Kota Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat, sebagian kecil Wilayah selatan Kabupaten Garut dan Sukabumi. Adapun areal tinggi berada di lereng dan puncak Cianjur yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, Bandung, dan Bandung Barat. Kondisi topografis yang datar sebenarnya potensi bagi pengembangan pertanian tanaman pangan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah Kabupaten Cianjur pada masa lalu di mana hampir semua wilayah datar merupakan lahan sawah yang subur dengan irigasi konvensional yang bagus dan air mengalir sepanjang tahun dengan hidrologis utama adalah Sungai Citarum.

Iklim Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab, dingin dan sejuk. Selama tahun 2020 tercatat suhu tertinggi di Kabupaten Cianjur mencapai 27,4°C yang terjadi di bulan September dan Oktober, Suhu Terendah di Kabupaten Cianjur adalah 15,0°C yaitu pada bulan Agustus. Curah hujan tertinggi di Kota Cianjur tahun 2019 sebesar 12.398,5 mm di Bulan April, sementara curah hujan terendah sebesar 1190,1mm di Bulan Juli. Intensitas penyinaran matahari tertinggi pada Bulan Juli sebanyak 19 persen, sedangkan terendah di bulan desember sebesar 14 persen. Berdasarkan karakteristik klimatologis umum tersebut maka wilayah Kabupaten Cianjur sangat layak dijadikan sebagai wilayah agraris dengan komoditas pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang paling

lengkap dibandingkan dengan wilayah kabupaten lainnya.

Pada aspek pembangunan ekonomi, Kabupaten Cianjur gencar membangun infrastruktur dan pewilayahan industri dan perdagangan. Hal ini dilihat dari maraknya industri seperti pabrik, gudang dan sarana perdagangan yang maju di wilayah Ciranjang, Haurwangi, Cikalong, kota Cianjur sampai Warungkondang. Keuntungan yang diperoleh dari industrialisasi antara lain kemudahan membangun infrastruktur jalan, bangunan pabrik dan aksesibilitas, namun kerugiannya terdapat pada aspek penurunan daya dukung tanaman pangan, hortikultura dan palawija serta tanaman pakan ternak bagi kecukupan pangan warga Kabupaten Cianjur.

Efisiensi aksesibilitas wilayah merupakan bonus topografi wilayah bagi pembangunan bangsa Indonesia. Pada saat ini Kabupaten Cianjur menjadi wilayah kawasan industri dan perdagangan yang cukup padat dan dinamis. Namun demikian, dampak pembangunan secara langsung tertuju pada penduduk Kabupaten Cianjur khususnya di wilayah utara dan kota.

Penduduk di Kabupaten Cianjur merupakan gambaran wilayah *multi ethnic* dengan dominasi penduduk dimiliki oleh Suku Sunda atau disebut pasundan. Beberapa etnis yang menjadi bagian dari warga Kabupaten Cianjur antara lain masyarakat lokal *Pituin* Sunda (Pasundan), Suku Jawa, etnis China, Arabian dan suku-suku lainnya di Indonesia yang migrasi di wilayah ini. Kondisi ini apabila ditinjau dari aspek konstitusi maka berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan penduduk didefinisikan sebagai orang



lokal dan pendatang yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dengan mendapatkan hak-hak yang sama sebagai warga bangsa.

Kondisi kependudukan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah menjamin kenyamanan, keamanan, keselarasan dan kesamaan hak warga negara (penduduk) dalam memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan kemanusiaan. Landasan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan jasmani dan rohani. Secara jasmani pemerintah kabupaten harus menjamin terpenuhinya pasokan pangan, kesehatan, tempat tinggal, lingkungan sehat dan lain-lain yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Cianjur.

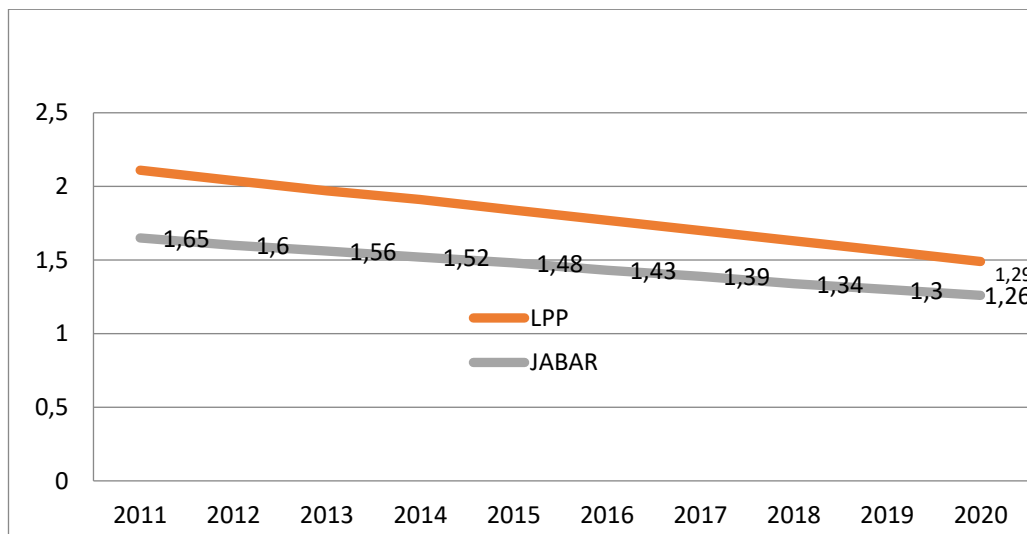
Secara rohani, pemerintah menjamin kehidupan masyarakat yang harmonis, selaras, aman dan memperoleh akses pendidikan serta ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kedua kebutuhan tersebut perlu dirancang dari kondisi yang paling mendasar yakni penduduk. Berapapun program dan fasilitas akses kehidupan yang dibangun pemerintah akan berujung pada kepuasan. Tingkat kepuasan tergantung pada kemudahan, kemudahan diperoleh apabila terdapat keseimbangan antara fasilitas pembangunan dengan kuantitas penduduknya. Oleh karena itu data penduduk dan kependudukan yang stabil dan dimanis menjadi modal utama dalam merancang pelaku dan pemanfaat pembangunan di Kabupaten Cianjur.

2.2. Aspek Kuantitas Penduduk Kabupaten Cianjur

2.2.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhannya di Kabupaten Cianjur

Penduduk di Kabupaten Cianjur menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur tahun 2021 sebesar 2.477.560 jiwa yang terdiri atas 1.271.458 jiwa penduduk laki-laki dan 1.206.102 jiwa penduduk perempuan. Angka ini meningkat dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2017 sebanyak 2.246.663 jiwa. Prosentase jumlah penduduk ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 0,92. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Cianjur sebanyak 173.265 jiwa atau sekitar 7,08 persen dari total penduduk Kabupaten Cianjur, sedangkan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Leles yaitu 31.595 jiwa atau sekitar 1,29 persen dari total penduduk Kabupaten Cianjur.

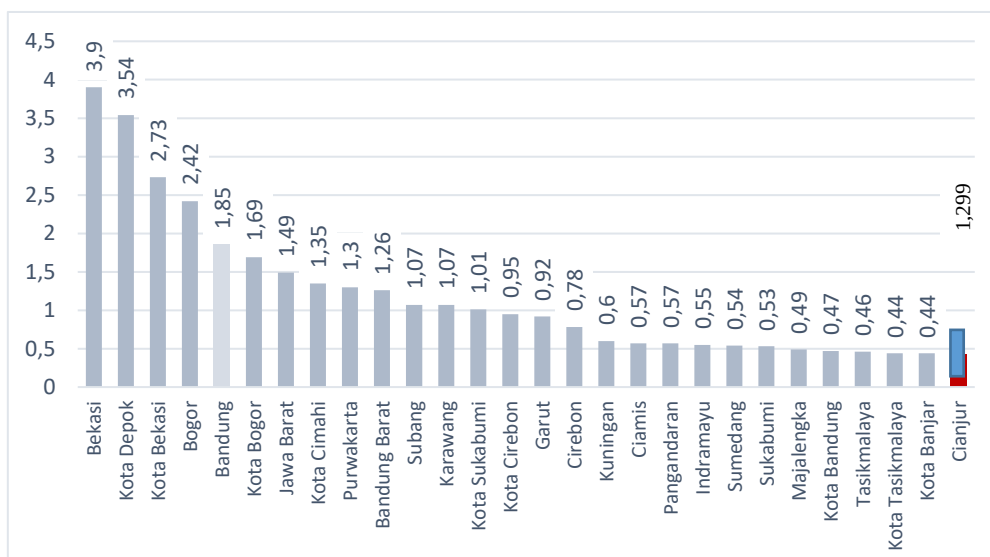
Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur secara umum meningkat selama delapan belas tahun terakhir (tahun 2010-2020), walaupun pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasikan kecenderungan besarnya penduduk pada waktu yang akan datang.



Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur dan Jawa Barat 2011-2020

(Sumber : BPS Jawa Barat , 2012 - 2021)

Berdasarkan grafik di atas menggambarkan bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk cukup di wilayah Kabupaten Cianjur dibandingkan dengan wilayah lain. Dinamika populasi ini dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota 2021

karena adanya faktor utama populasi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi atau mobilitas penduduk. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah sebesar 1,299 persen pertahun, di atas target yang ingin dicapai pada target Nasional yaitu 1,1 persen. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penduduk ditengah penurunan jumlah penduduk secara kumulatif di Jawa Barat.

Adapun pergerakan laju pertumbuhan penduduk antar wilayah di Jawa Barat dijelaskan dalam gambar 2.4 di atas.

Table 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur

Tahun Year	Jumlah Penduduk Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (persen)
2011	2.201.003	1,89
2012	2.213.889	0,94
2013	2.225.313	1,05
2014	2.235.418	1,00
2015	2.243.904	1,00
2016	2.250.977	0,99
2017	2.256.589	0,99
2018	2.260.620	1,00
2019	2,285,971	1,11
2020	2.477.560	1,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2018 (proyeksi) dan BPS Kabupaten Cianjur 2021

Beberapa variabel yang menunjukkan gejala penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur adalah daya tampung wilayah untuk perumahan, regulasi kawasan pemukiman akibat kepadatan tinggi dan harga tanah untuk hunian yang semakin mahal bagi pendatang baru (migrasi penduduk). Kesadaran tentang batasan kesempatan tinggal di Kabupaten Cianjur membuat masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pembatasan kelahiran, peningkatan kualitas hidup dan sebagainya, hal ini akan dianalisis pada bab berikutnya.

Kondisi demikian tidak sejalan dengan fenomena tahun 2020, kenaikan jumlah penduduk cukup tajam, hampir 300 ribu penduduk bertambah di Kabupaten Cianjur, hal ini diduga oleh faktor migrasi masuk akibat PHK pada awal pandemi Covid 19. Namun demikian perlu dianalisis lebih lanjut tentang kenaikan penduduk di luar faktor migrasi masuk.

Gejala kenaikan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari data tahun 2020 di setiap kecamatan. Data tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2020

Kecamatan	LPP
Agrabinta	0,95
Leles	-0,1
Sindangbarang	1,19
Cidaun	0,78
Naringgul	0,59
Cibinong	1,01
Cikadu	0,64
Tanggeng	1,21

Pasirkuda	0,97
Kadupandak	0,8
Cijati	0,5
Takokak	0,22
Sukanagara	1,31
Pagelaran	1,02
Campaka	0,86
Campaka mulya	0,11
Cibeber	1,4
Warungkondang	1,77
Gekbrong	1,73
Cilaku	1,9
Sukaluyu	2,4
Bojongpicung	1,58
Haurwangi	1,69
Ciranjang	1,72
Mande	1,61
Karangtengah	1,97
Cianjur	0,89
Cugenang	1,58
Pacet	1,54
Cipanas	0,87
Sukaresmi	1,29
Cikalongkulon	1,31
Kabupaten Cianjur	1,29

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2021)

Berdasarkan data di atas terdapat penduduk dengan LPP yang masih cukup rendah, antara lain Kecamatan Leles, Campakamulya dan Campaka. Sedangkan kecamatan yang masih tinggi LPP berturut-turut yaitu Kecamatan Sukaluyu,

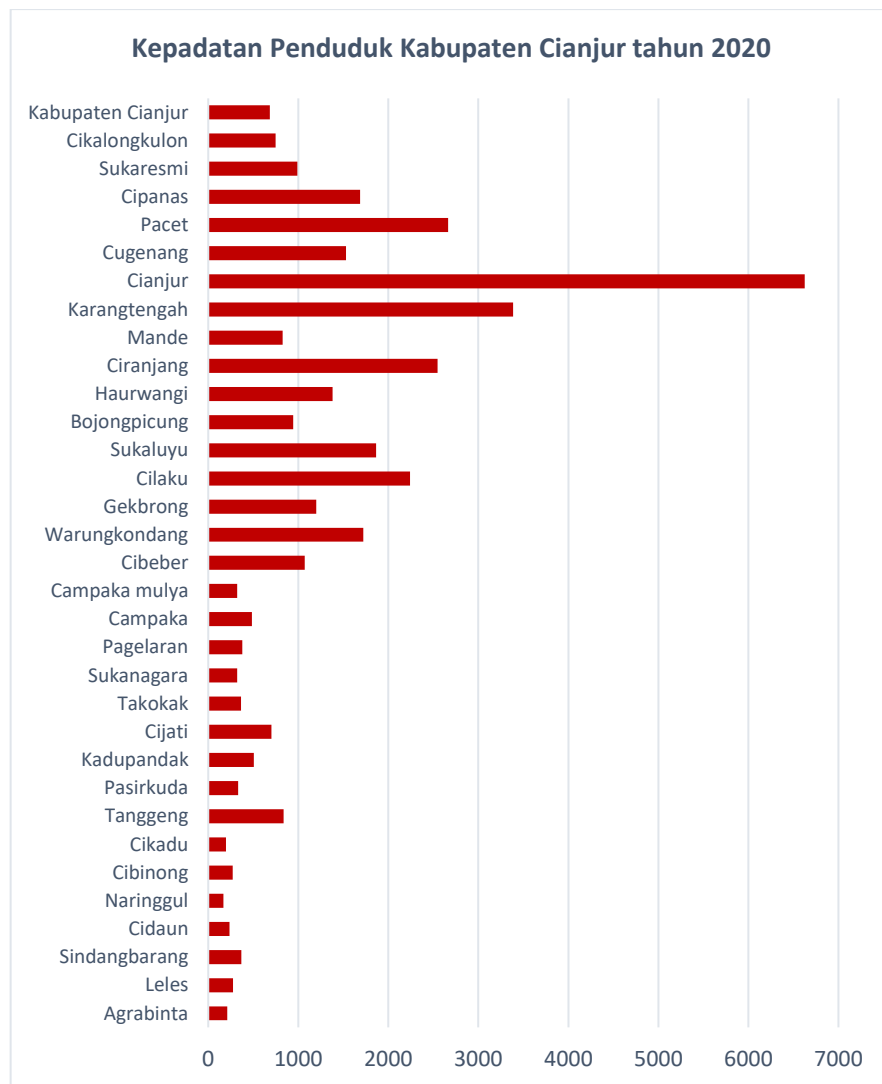
Karangtengah dan Cilaku. Kondisi di atas (LPP) berkorelasi dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Cianjur.

Sumbangan kepadatan Tinggi di Kabupaten Cianjur antara lain kecamatan Cianjur dan Karangtengah sudah masuk *habitat III*. Habitat III merupakan kondisi di mana jumlah penduduk dalam satu kilometer persegi dihuni oleh lebih dari 1000 jiwa. Kondisi ini akan menyebabkan berbagai persoalan penting, yaitu persoalan lingkungan fisik dan lingkungan social. Lingkungan fisik paling utama adalah pencemaran udara, air dan tanah, kompetisi penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan ketersediaan ruang terbuka hijau yang rendah. Adapun lingkungan social adalah munculnya kerawanan seperti pengangguran, gejala kompetisi hidup yang tidak sehat dan kerawanan kriminalitas akibat kesumpekan dari hunian dan tempat tinggal yang kurang nyaman serta distribusi pangan bagi wilayah tingkat kabupaten yang tidak seimbang.

Adapun sumbangan kepadatan rendah diperoleh pada kecamatan Naringgul, Cidaun, Leles, Campakamulya, Campaka, Pasirkuda, Pagelaran dan Cikadu. Wilayah-wilayah ini didominasi oleh perkebunan, kehutanan dan lahan pertanian tegalan (lahan kering). Topografi wilayah ini didominasi perbukitan dan pegunungan sehingga aksesibilitas hidrologis sangat rendah. Beberapa wilayah yang memiliki infrastruktur jalan sangat buruk adalah Kecamatan Cikadu, Pasirkuda dan Leles.

Infrastruktur jalan dan jembatan yang buruk menghambat mobilitas penduduk, pergerakan arus barang hasil bumi dan ritel serta layanan kesehatan.

Adapun aksesibilitas di kecamatan rendah penduduk lainnya cenderung sempit dan curam. Hal ini cukup menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi penduduk, kondisi demikian menjadikan generasi muda melakukan migrasi ke kota.

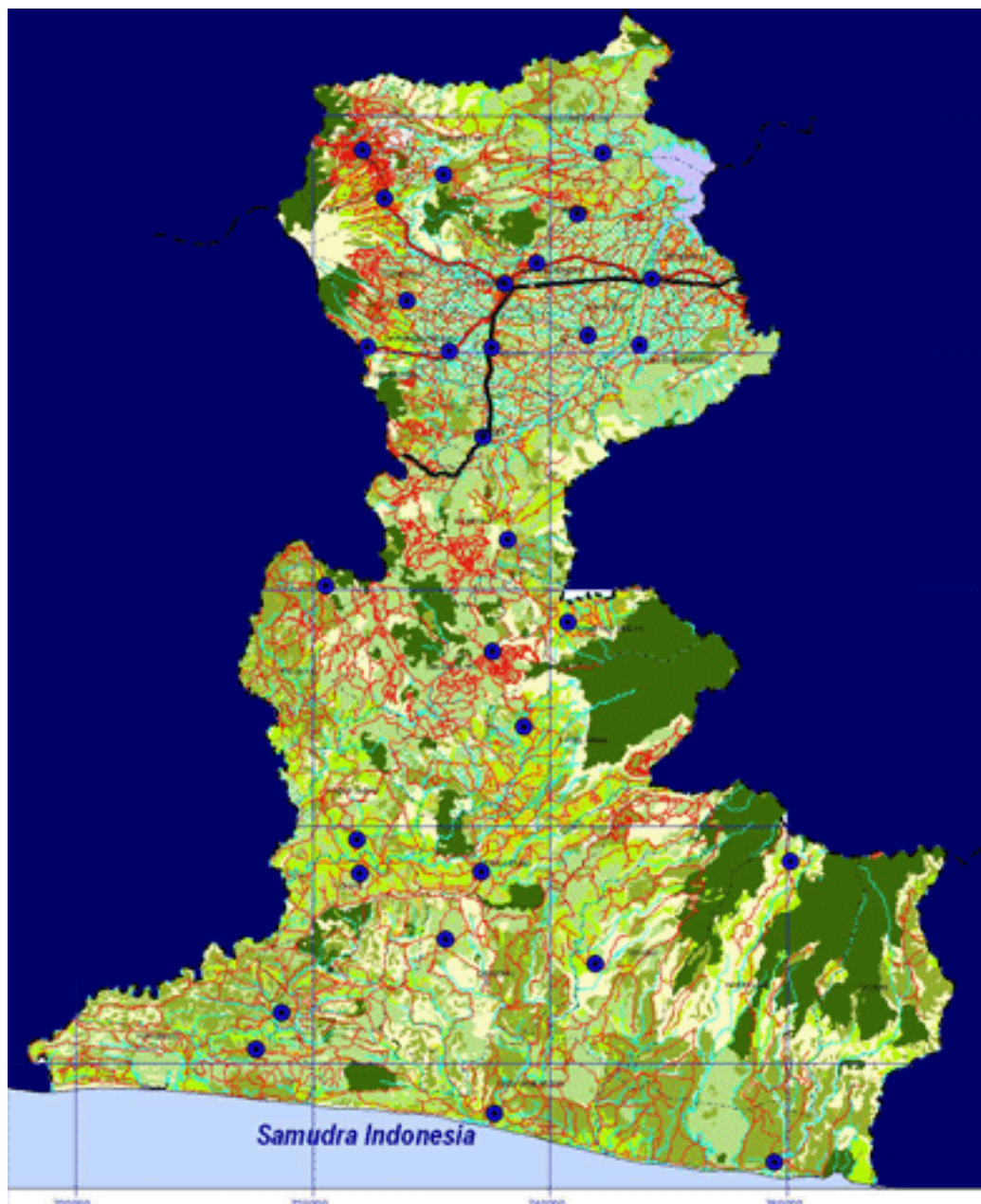


Gambar 2.5 Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur

(Sumber : Kabupaten Cianjur dalam Angka 2021)

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Agrabinta. Padahal wilayah ini cukup indah atas fenomena pantai

dan bukit. Namun aksesibilitas yang rendah antar desa menuju jalur utama selatan Jawa Barat menjadikan pergerakan ekomi mengalami stagnasi dan berdampak pada sektor ekonomi.

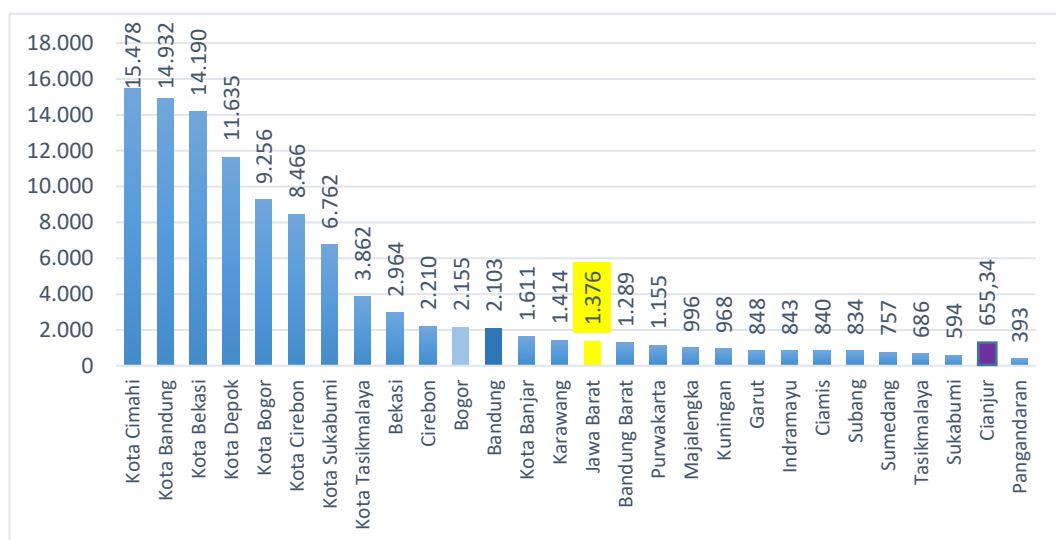


Gambar 2.6 Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur

(Sumber: RTRW Kabupaten Cianjur Tahun 2007-2027, BAPPEDA)

Wilayah yang perlu dieksplorasi secara fundamental dalam pembangunan adalah dengan menyusun distribusi penduduk minimal tiap kecamatan. Distribusi ini dapat bermanfaat bagi perencanaan pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta standar layanan publik yang perlu diterapkan seiring dengan bagaimana mengatur kebutuhan dasar penduduk seperti kecukupan pangan, tempat tinggal dan rekreasi.

kepadatan penduduk berdasarkan laporan basis data Bappeda Kabupaten Cianjur tahun 2020 menggunakan *Geographic Information System*.



Gambar 2.7 Kepadatan Penduduk (orang/km²) Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

(Sumber: BPS Jawa Barat 2021)

Perbandingan kepadatan penduduk antar kabupaten di Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur memiliki kepadatan paling rendah nomor dua setelah Kabupaten Pangandaran. Kepadatan yang rendah ini diperoleh dari ruang hijau yang tinggi di wilayah tengah bagian timur dan wilayah selatan. Wilayah hijau tersebut relatif memiliki topografi yang terjal dengan vegetasi utama

hutan dan perkebunan. Wilayah kosong memiliki infrastruktur dan medan yang jelek, hidrologi yang rendah dan rawan bencana. Kondisi inilah yang membuat kepadatan penduduk di sepuluh kecamatan sangat rendah. Namun di sisi lain terdapat wilayah datar, medan dan infrastruktur yang baik dan hidrologi yang tinggi menjadi wilayah yang sangat padat.



Gambar 2.8 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur 2015-2020

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur)

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa penduduk di semua kecamatan di Kabupaten Cianjur termasuk dalam kategori rendah apabila dilihat dari luasan kecamatannya. Kondisi ini tentunya akan dikaji pada modus tiap kelurahan atau desa di setiap kecamatan yang tidak seimbang dalam kepadatan. Pengendalian laju penduduk merupakan program penting bagi Kabupaten Cianjur untuk mengatasi permasalahan pokok akibat jumlah penduduk yang terlalu tinggi. Wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi di wilayah tertentu berpengaruh terhadap kepadatan penduduk yang tinggi pula.

Kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan wilayah dalam menyediakan ruang hijau, lahan pertanian untuk mensuplay pangan bagi penduduknya dan indikator lingkungan lain yang secara langsung atau tidak langsung memberi kontribusi terhadap kualitas penduduknya. Penggunaan lahan di Kabupaten Cianjur adalah 7,4 persen digunakan sebagai perumahan dan dari luas lahan perumahan dimiliki secara syah oleh penduduk Cianjur sebesar 63,8 persen dan sisanya mengontrak (sewa rumah). Kondisi ini terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, yaitu 8,2 persen lahan di gunakan untuk pemukiman, infrastruktur dan manufaktur (BPS Kabupaten Cianjur, 2021).

Berdasarkan ilustrasi di atas maka dapat digambarkan bahwa wilayah yang memiliki kepadatan tinggi akan berdampak pada permasalahan sulitnya memiliki rumah tinggal. Berdasarkan gambar di atas maka dapat diilustrasikan wilayah dengan jumlah penduduk yang memiliki kepadatan tinggi secara berturut-turut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.5 Wilayah Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tinggi di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

No	Wilayah Kecamatan	Prosentase Penduduk (persen)	Kepadatan orang/Km ²
1	Warungkondang	3,14	1721
2	Cilaku	4,75	2239
3	Cranjang	3,8	2549
4	Karangtengah	6,63	3386
5	Cianjur	6,69	6625
6	Pacet	4,48	2663

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2021)

Wilayah dengan jumlah penduduk paling tinggi tersebut dipengaruhi oleh tingginya natalitas dan orang datang (*in-migrasi*). Namun demikian seluruh kecamatan di Kabupaten Cianjur memiliki kepadatan yang relative rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wilayah Cianjur termasuk dalam kategori *habitat III* dalam *warning of population* hanya di enam kecamatan, sedangkan kecamatan lainnya dalam kondisi aman..

Konsensus *habitat III* telah menetapkan bahwa kepadatan penduduk ideal adalah 1000 jiwa per km², hal ini dilakukan untuk mengurangi atau mengendalikan dampak penduduk yang padat. Penduduk yang sangat padat memberikan dampak negatif bagi lingkungan fisik dan social. Dampak negatif dari lingkungan fisik pada *habitat III* antara lain :

1. Kemampuan lingkungan dalam suplay oksigen sebagai bahan utama kehidupan makhluk hidup terganggu akibat ketidakseimbangan kapasitas oksigen dengan konsumennya yaitu penduduk.
2. Sulitnya lahan untuk sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan karena padatnya pemukiman penduduk. Kondisi ini menyumbang pencemaran air limbah dan sampah domestik, pencemaran udara dan tanah sangat tinggi ditambah dengan adanya limbah industri yang turut berkontribusi dalam berbagai pencemaran tersebut.
3. Kondisi drainase dalam lingkungan pemukiman terkendala oleh ketidakseimbangan antara kapasitas drainase dengan ruang terbuka hijau. Drainase yang buruk juga rawan menimbulkan pencemaran hebat, antara lain

paparan logam berat, pertumbuhan mikroba berbahaya di sekitar lingkungan pemukiman sehingga kawasan menjadi tidak sehat, genangan limbah yang menyebabkan produksi nyamuk dan serangga vector penyakit meningkat serta polusi lingkungan kawasan pemukiman.

4. Pengendalian dan pencegahan Polusi air, udara dan tanah serta penyediaan ruang hijau (RTH) untuk masyarakat dalam kebutuhan harmonisasi antar manusia dan lingkungan.
5. Dampak *habitat III* bagi penduduk yang sangat padat adalah langsung menyentuh pada manusia baik fisik (kesehatan manusia, pengendalian penyakit menular, suplay oksigen untuk metabolisme tubuh dan sebagainya)

Dampak negatif dari lingkungan sosial atas penduduk *habitat III* antara lain :

1. Terjadi kerawanan gangguan psikis (tensi psikososial akibat lingkungan yang panas dan lembab, dampak pengangguran dan kerawanan social lainnya).
2. Aksesibilitas ruang terbuka hijau, arena bermain anak, sarana olah raga dan peribadatan serta harmonisasi social sangat terbatas, kondisi ini dapat menyebabkan tingginya tingkat stress yang berujung pada tingginya angka kriminalitas, kesulitan hubungan social dan aksesibilitas sarana seni dan apresiasi diri.

Kabupaten Cianjur yang memiliki kepadatan penduduk tinggi tersebar dalam topografi wilayah yang relatif tidak seragam seragam. Namun demikian terdapat ciri yang sama sebagai wilayah baru dalam industri, perkantoran, pengolahan dan perdagangan. Kedatangan penduduk (*in-migration*) di Kabupaten

Cianjur di seluruh wilayah terjadi sejak wilayah ini menjadi basis industrialisasi Jawa Barat bahkan nasional. Secara umum Tenaga kerja terampil dan setengah terampil dari luar daerah biasanya direkrut oleh pihak industri, rekrutmen ini menjadikan kondisi Kabupaten Cianjur di wilayah tertentu semakin padat.

2.2.2. Struktur Populasi dan Piramida Penduduk Kabupaten Cianjur

Struktur populasi penduduk di Kabupaten Cianjur dapat menggambarkan sebaran umur penduduk saat ini. Penyusunan data struktur populasi berdasarkan jenis kelamin, umur dan piramida penduduknya sangat bermanfaat bagi perencanaan berbagai program pembangunan. Manfaat umumnya adalah mengestimasi jumlah kelahiran pada tahun-tahun yang akan datang, penentuan masa bonus demografi dan penyusunan program peningkatan berbagai fasilitas dasar manusia yang mudah diakses seiring kebutuhan masyarakat sesuai distribusi umurnya.

Penyusunan dan analisis struktur populasi berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) pada distribusi umurnya dapat menggambarkan siklus hidup manusia di Kabupaten Cianjur, memprediksi jumlah kelahiran dengan membandingkan struktur umur produktif dengan angka kelahiran berjalan, memprediksi bonus demografi untuk menentukan jenis dan pola lapangan kerja yang disiapkan, menyusun berbagai perencanaan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan ekonomi).

Penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang. Rasio jenis kelamin pada data di atas menunjukkan angka 105.41, namun demikian angka

ini menjadi pijakan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor publik harus diberikan ruang yang adil. Struktur penduduk Kabupaten Cianjur dalam perspektif perbandingan laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) adalah 102.74 pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 102.63, hal ini menunjukkan bahwa setiap jumlah 100 perempuan terdapat sekitar 102 laki-laki. *Sex ratio* yang tinggi terjadi kecamatan Cikadu, Naringgul, Campakamulya dan Cidaun yang memiliki *sex ratio* di atas rata-rata Kabupaten Cianjur.

Berikut disajikan data struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020

Tabel 2.6 Penduduk Kabupaten Cianjur berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Agrabinta	104,4
Leles	109,9
Sindangbarang	102,9
Cidaun	109,5
Naringgul	110,8
Cibinong	105,5
Cikadu	111,7
Tanggeng	103,2
Pasirkuda	109,3
Kadupandak	104,9
Cijati	102,7
Takokak	104,9
Sukanagara	104
Pagelaran	104,6
Campaka	106,3

Campaka mulya	111,6
Cibeber	104,4
Warungkondang	105
Gekbrong	107,6
Cilaku	102,8
Sukaluyu	105,1
Bojongpicung	103,2
Haurwangi	106,7
Ciranjang	102,5
Mande	105,7
Karangtengah	102,7
Cianjur	101,9
Cugenang	107,1
Pacet	108
Cipanas	109,4
Sukaesmi	108
Cikalongkulon	105,3
Kabupaten Cianjur	105,41

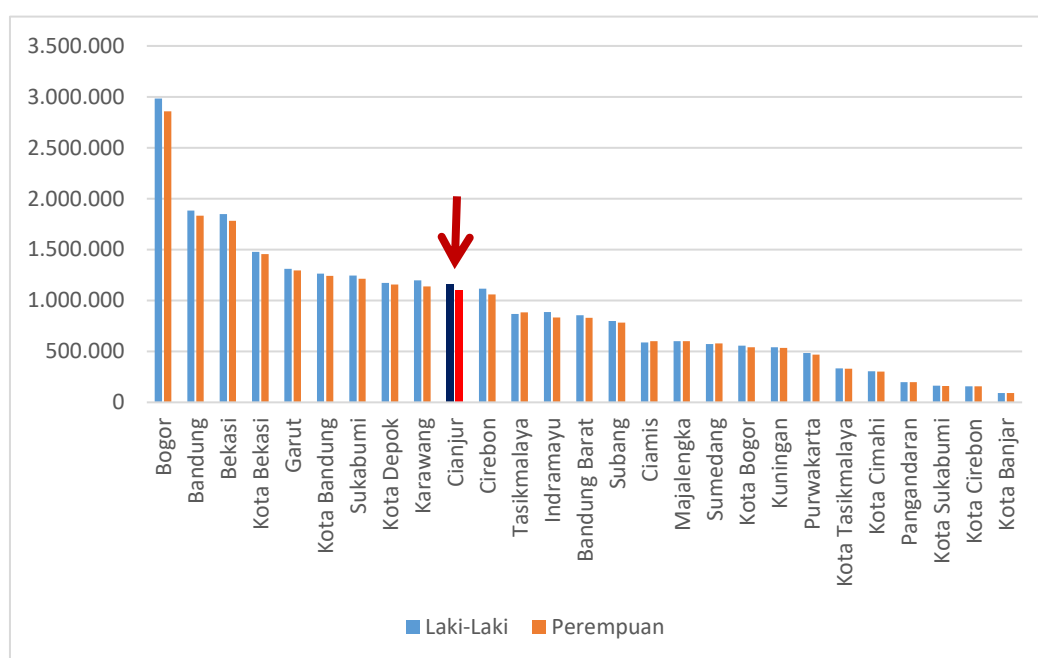
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2018 dan BPS Kabupaten Cianjur 2021

Ketersediaan pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk didasari juga atas kemampuan wilayah dalam menyediakan suplay umur produktif yang dapat mengisi sektor-sektor ekonomi. Suplay tersebut dapat dilihat dari struktur umur penduduk berdasarkan piramida penduduknya.

Struktur penduduk berikutnya adalah jenis kelamin, struktur ini akan menentukan rasio jenis kelamin yang penting bagi perencanaan pembangunan penduduk. Imbangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah

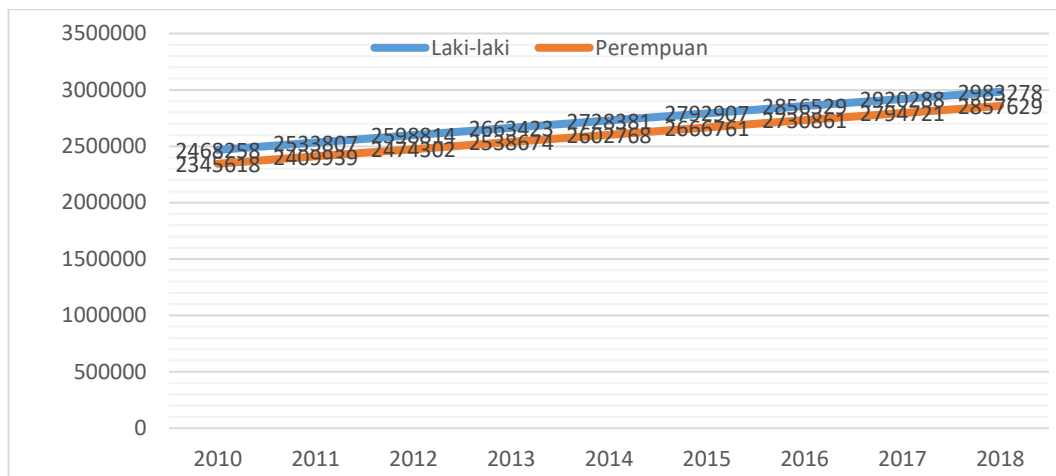
kecamatan menggambarkan distribusi produktivitas tenaga kerja dalam jenis kemalin dan faktor yang mempengaruhinya.

Keseimbangan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan memberikan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi penduduk produktif perempuan. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Jawa Barat pada tahun 2020 disajikan sebagai berikut.



Gambar 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020

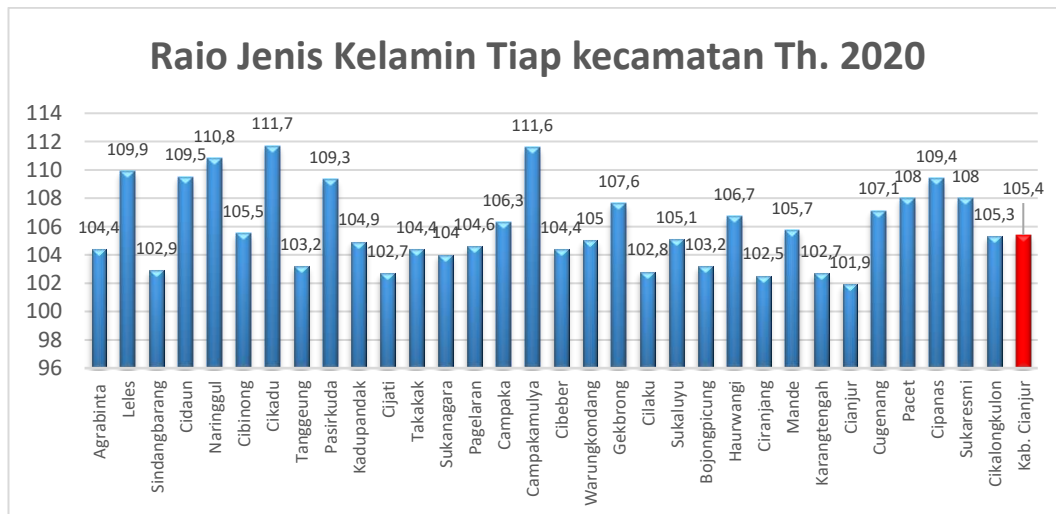
(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat 2021)



Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Cianjur tahun 2020

(Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2021)

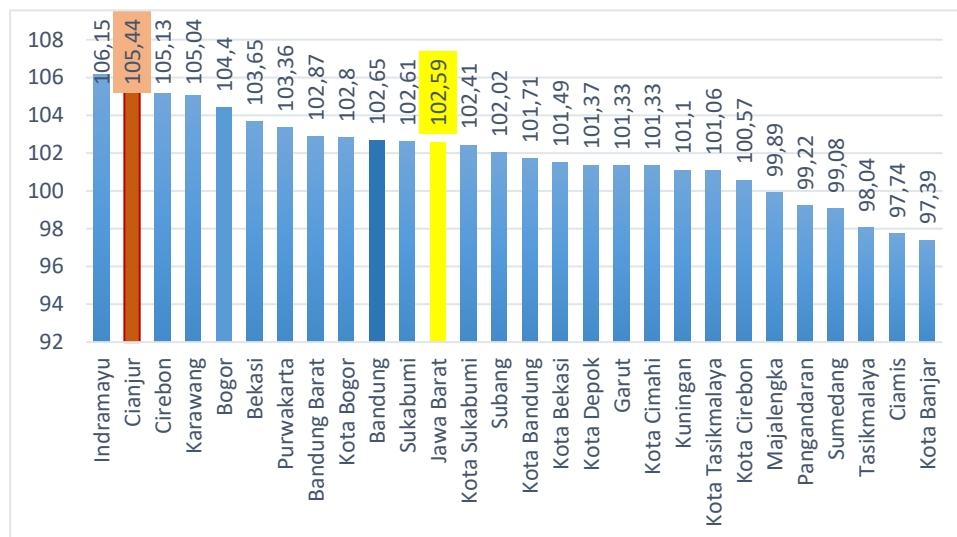
Adapun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan per kecamatan dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.11 Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kecamatan

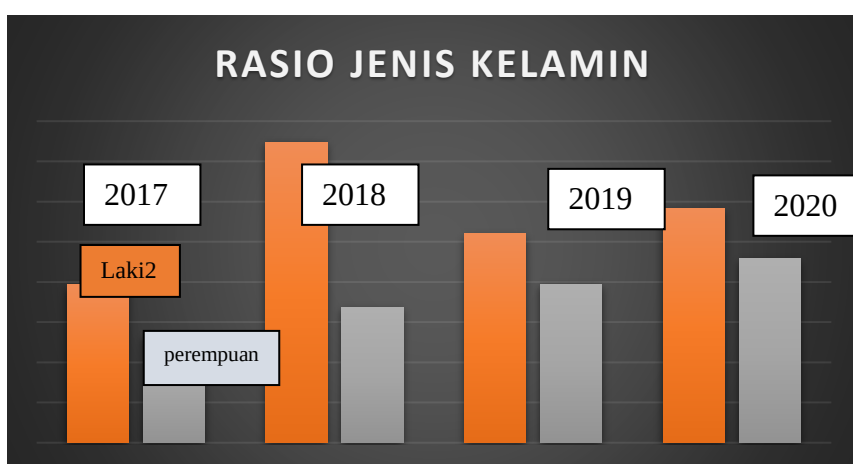
(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2021)

Adapun rasio jenis kelamin selama empat tahun terakhir sebagai berikut.



Gambar 2.12 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2020

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan adanya rasio jenis kelamin yang ideal bagi wilayah yang sedang mempersiapkan bonus demografi. Agregat rasio jenis kelamin mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dijelaskan dalam gambar berikut.

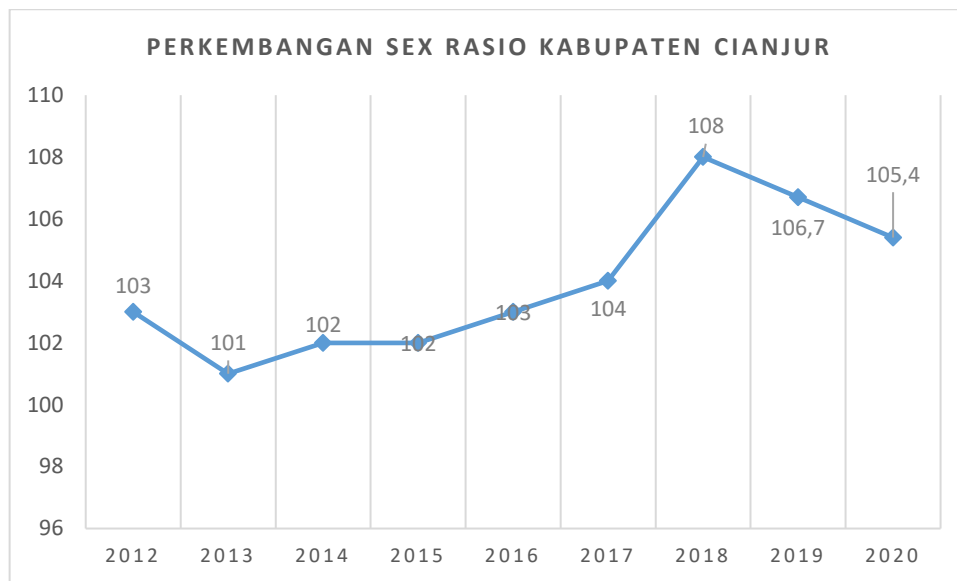


Gambar 2.13 Rasio Jenis Kelamin Empat Tahun Terakhir

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2018 - 2020)

Empat tahun terakhir terjadi penurunan rasio jenis kelamin, jumlah laki-laki dari tahun-ketahun semakin menurun. Rasio ini memberi gambaran bahwa peran perempuan dalam kualitas penduduk (pendidikan, kesehatan, ekonomi) harus ditingkatkan. Pada kasus-kasus rasio jenis kelamin, problem utama yang dihadapi adalah lapangan kerja bagi kaum perempuan. Apabila kaum perempuan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, maka akan berdampak langsung terhadap angka pengangguran dan meningkatnya rasio ketergantungan.

Problem berikutnya adalah persoalan sex ratio yang berkaitan erat dengan penyerapan tenaga kerja perempuan, baik untuk industri, perdagangan maupun jasa. *Sex ratio* sebesar 105.4, artinya setiap terdapat 100 orang penduduk perempuan, terdapat juga 105 orang penduduk laki-laki. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketenagakerjaan di Kabupten Kabupaten Cianjur. Banyaknya penduduk yang bekeja menurut jenis kelamin menurut BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2020 tidak seimbang. Rasio perempuan yang bekerja dibanding laki-laki mencapai 1 : 2.



Gambar 2.14 Sex Ratio di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2020

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2013-2021)

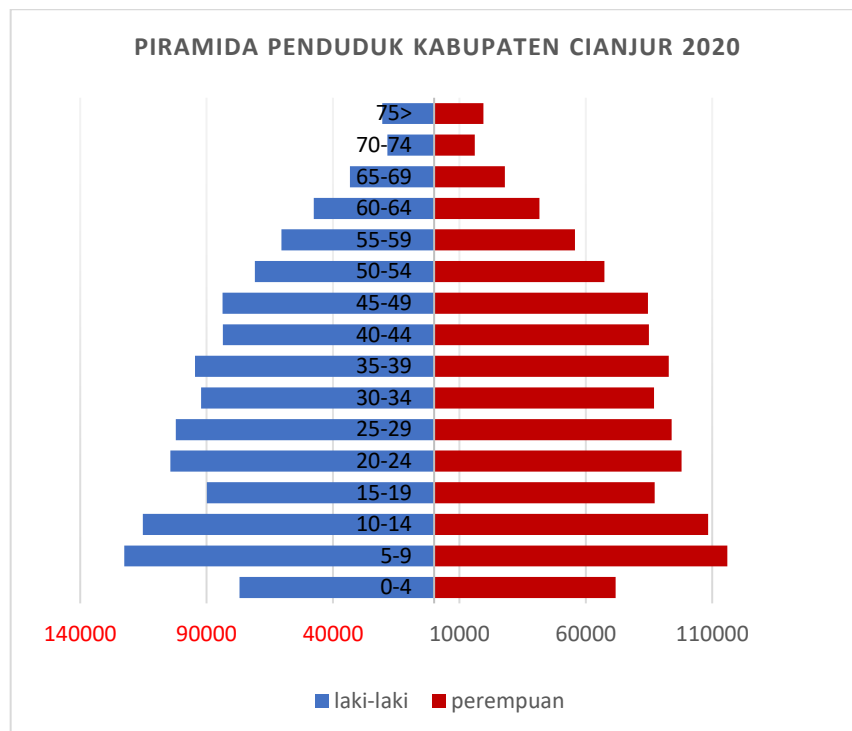
Beberapa kecamatan yang memiliki perhatian khusus tentang gender adalah Kecamatan Sindangbarang, Ciranjang dan Cianjur. Pada kondisi yang disebabkan oleh kawasan industri di wilayah Ciranjang dan Cianjur lebih banyak mobilitas perempuan masuk ke wilayah untuk kerja di industri. Pada wilayah di mana penduduk laki-laki hampir berimbang dengan perempuan yang merupakan wilayah bukan basis industri menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melihat peran kesetaraan gender di wilayah tersebut.

Peran perempuan dalam pembangunan harus disejajarkan dengan laki-laki, kesetaraan yang paling berkorelasi dengan indikator ekonomi adalah sektor tenaga kerja dan usaha ekonomi. Apabila peran perempuan di bidang tenaga kerja dan usaha maka akan berakibat meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat ekonomi daerah. Pada wilayah Kecamatan Rancabali terdapat rasio di

mana perempuan hampir seimbang dari laki-laki. Keseimbangan ini juga harus dibarengi dengan upaya kesempatan kerja bagi perempuan untuk menurunkan angka pengangguran.

Pemberdayaan kaum perempuan diarahkan untuk mrnjadikan perempuan sebagai obyek pembangunan. Realitas di masyarakat terdapat serapan tenaga kerja perempuan di sektor industri. Industry padat pekerja di Kabupaten Cianjur terdiri dari industri pengolahan, manufaktur, jasa dan perdagangan. Serapan tenaga perempuan bermodus di industry pengolahan dan manufaktur. Serapan yang tinggi pada kaum perempuan menjadikan arus migrasi perempuan dari wilayah lain (baik Jawa Barat maupun luar Jawa Barat) berdatangan di wilayah ini. Pada saat pandemi Covid 19 mulai melandai di akhir 2021, maka sektor ini mulai bergerak kembali.

Piramida penduduk yang *diupdate* setiap tahun dapat menggambarkan proporsi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Proporsi umur yang dibagi dalam kategori umur bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua dan lanjut usia. Proporsi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam beberapa komponen pembangunan kualitas manusia. Komponen yang dapat dilihat dari piramida penduduk adalah bonus demografi, yaitu pada tahun seberapa terdapat penduduk usia produktif yang proporsinya jauh di atas penduduk anak-anak, balita dan lanjut usia.



Gambar 2.15 Piramida Penduduk di Kabupaten Cianjur

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2021)

Berdasarkan struktur populasi di atas, penduduk di Kabupaten Cianjur membentuk piramida di mana saat ini telah terdapat modus jumlah penduduk usia Balita yang tinggi dan usia sekolah sangat tinggi. Secara realitas kependudukan, Kabupaten Cianjur terjadi penumpukan jumlah penduduk usia produktif, dan pada tahun 2030-2045 akan terjadi puncak bonus demografi. Evaluasi terhadap demografi ditinjau dari serapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat dan IPM dalam arti luas. Komposisi piramida penduduk dalam perspektif gender menggambarkan bahwa apabila kesetaraan *gender* menjadi penghalang dalam pembangunan ketenagakerjaan maka dapat dipastikan bahwa rasio ketergantungan di wilayah Kabupaten Cianjur akan semakin tinggi. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan

dan penyetaraan kaum perempuan dalam kesempatan bekerja harus menjadi prioritas.

Usia produktif yang tinggi mengandung keuntungan sekaligus ancaman bagi Kabupaten Cianjur. Keuntungan yang diperoleh dari tingginya usia produktif adalah :

1. Peningkatan suplay dan ketersediaan tenaga kerja produktif sehingga berkontribusi positif terhadap devisa daerah dan nilai investasi daerah untuk ketenagakerjaan dan sector ekonomim lainnya;
2. Jumlah usia produktif tinggi dengan tenaga kerja serta pendapatan yang sesuai akan mengurangi tingkat ketergantungan penduduk tiap satuan tanggungan penduduk.
3. Mobilitas penduduk akan meningkat sehingga *suplai demand* barang dan jasa antar wilayah dan dalam wilayah tinggi, kondisi ini berpengaruh terhadap peningkatan sektor ekonomi daerah

Usia produktif tinggi juga mengandung resiko yang besar apabila terdapat titik kritis sebagai berikut :

1. Besarnya penduduk usia produktif apabila tidak diiringi peningkatan kualitas ketrampilan maka penyerapan di sektor industri dan jasa tidak simbang, kondisi ini dapat meningkatkan pengangguran dan kerawanan social.
2. Besarnya penduduk usia produktif apabila tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan hanya akan melahirkan gelombang penduduk miskin yang dapat menyebabkan problem sosial tersendiri.

Berdasarkan ilustrasi di atas menunjukkan adanya jumlah balita yang tinggi pada tahun 2020. Peningkatan balita disebabkan oleh adanya kelahiran tinggi dari mobilitas yang masuk di wilayah ini. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cianjur. maka pemerintah Kabupaten Cianjur perlu melakukan langkah strategis yang disusun dalam dokumen perencanaan yang matang untuk hal-hal berikut ini :

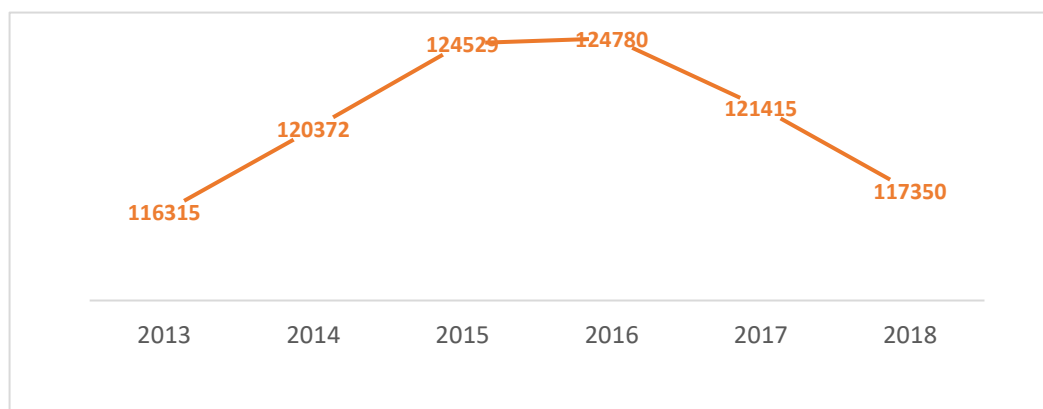
1. Peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah padat penduduk.
2. Peningkatan layanan pendidikan sampai perguruan tinggi sehingga penduduk usia produktif di masa yang akan datang dapat menjadi aset sumberdaya manusia yang dapat membantu daerah dalam peningkatan kesejahteraannya.
3. Peningkatan ketrampilan hidup dan membangun citra diri professional bagi calon usia produktif melalui integrasi pendidikan ketrampilan dan industri dalam konsep kemitraan strategis.
4. Mempersiapkan suplay pangan khususnya makanan pokok dan daging secara terencana agar tidak mengalami gejolak rawan pangan di wilayah ini. Wilayah padat penduduk di Kabupaten Cianjur memiliki potensi sebagai pengendali harga-harga kebutuhan pangan bagi wilayah lain di Indonesia.
5. Mempersiapkan layanan lingkungan hidup dan sosial yang mampu memberikan kenyamanan hidup sehingga kualitas kehidupan penduduk di masa yang akan datang menjadi lebih baik.

Apabila kemampuan daerah dalam menyediakan tenaga terampil kurang, maka industrialisasi di wilayah ini justru akan menghasilkan orang datang yang besar namun tingkat pengangguran di Cianjur tinggi. Pada kondisi demikian maka pengendalian jumlah penduduk dapat dilakukan dengan regulasi rekayasa penduduk melalui pengaturan angka kelahirandan regulasi *in-migrasi*.

2.2.3. Aspek Natalitas dan Migrasi Penduduk di Kabupaten Cianjur

Faktor yang mempengaruhi kuantitas penduduk di Kabupaten Cianjur berikutnya adalah Faktor kelahiran (*natality*). Kelahiran yang tinggi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dengan pasangan usia subur yang tinggi, tingkat partisipasi Keluarga Berencana yang rendah, dan rendahnya *em-migrasi* pada penduduk usia produktif. Sedangkan faktor *in-migrasi* dipengaruhi oleh banyaknya lapangan kerja di wilayah industri. Penataan kawasan industri yang salah menyebabkan *in-migrasi* terjadi di beberapa wilayah melebihi kepadatan penduduk idealnya.

Pada aspek natalitas, terdapat *trend* kelahiran bayi di Kabupaten Cianjur disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.16 Trend Angka Kelahirann Bayi di Kabupaten Cianjur

Jumlah penduduk yang tinggi tidak selalu diiringi dengan natality yang tinggi, pada wilayah industri justru jumlah penduduk tinggi memiliki natalitas yang rendah, kondisi ini hampir di semua kecamatan. Apabila dilihat dari jumlah kelahiran dengan perkembangan jumlah penduduk, maka dinamika populasi yang terjadi di Kabupaten Cianjur lebih diakumulasi oleh mobilitas penduduk dari aspek migrasi penduduk. Migrasi masuk terjadi dalam gelombang tenaga kerja (khususnya perempuan) di wilayah Kecamatan Cianjur, Ciranjang, dan Waringkondang. Tingkat mortality belum menunjukkan gejala tingginya dinamika penduduk di Kabupaten Cianjur, artinya tingkat kematian masih rendah.

Tabel 2.6 Data Kelahiran di Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Bayi Lahir Tahun 2018	Jumlah Bayi Lahir Tahun 2020
Agrabinta	432	543
Leles	350	380
Sindangbarang	550	653
Cidaun	717	876
Naringgul	486	542
Cibinong	506	601
Cikadu	388	458
Tanggeng	466	576
Pasirkuda	409	487
Kadupandak	477	534
Cijati	421	520
Takokak	482	598
Sukanagara	526	623
Pagelaran	811	987
Campaka	757	876
Campaka mulya	255	342

Cibeber	1297	1387
Warungkondang	664	787
Gekbrong	759	867
Cilaku	1022	1239
Sukaluyu	774	890
Bojongpicung	787	876
Haurwangi	639	729
Ciranjang	806	909
Mande	805	912
Karangtengah	1596	1689
Cianjur	1823	1976
Cugenang	1185	1287
Pacet	1195	1298
Cipanas	1290	1345
Sukaesmi	898	998
Cikalongkulon	1177	1287
Kabupaten Cianjur	24750	28072

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2019 dan 2021)

Grafik di atas menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki Natalitas sangat tinggi tidak memberikan kontribusi terhadap jumlah penduduk dan kepadatannya. Hal ini terjadi di Kecamatan Cikalongkulon dan Karangtengah. Natalitas dan *in-migrasi* tinggi berkontribusi terhadap jumlah penduduk yang tinggi pula terjadi di Kecamatan Cianjur dan Cipanas. Konsep regulasi dalam manajemen natalitas dan *immigrasi* akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

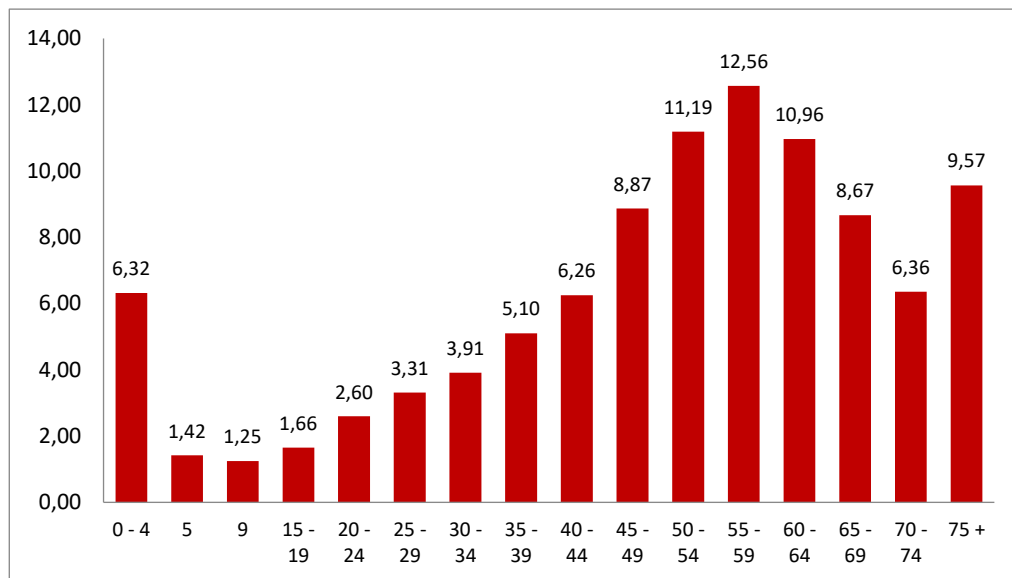
2.2.4. Gambaran Angka Kematian Penduduk (Mortality)

Angka kematian merupakan bagian dari komponen populasi dan pertumbuhannya. Pencatatan angka kematian pada umumnya tidak terintegrasi

antara RT/RW ke Desa/kelurahan dan angka kematian dari Puskesmas atau Rumah Sakit. Hal ini membuat beberapa kabupaten di Jawa Barat tidak mencantumkan data mortalitas penduduk dari komposisi umur. Padahal angka kematian ini sangat penting untuk menggambarkan distribusi kematian dalam kelompok umur, faktor penyakit paling membawa kematian, dan prosentase rata-rata umur terakhir (di atas 75 tahun) untuk menggambarkan angka harapan hidup.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tahun 2021 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat angka kematian yang menyebar di 32 kecamatan secara tidak seimbang. Berdasarkan sebaran umur, prosentase kematian tertinggi terdapat pada distribusi umur 50-59 tahun. Umur tersebut tergolong usia produktif, hal ini menjadi perhatian bahwa kerentanan penyakit pada umur produktif terdapat di Kabupaten Cianjur. Kematian terjadi pada umur tersebut akibat penyakit metabolis seperti Diare, DBD dan Ispa dan TBC dan diabetes.

Secara teoritis, penyakit yang diderita masyarakat terbagi menjadi 4 jenis, yakni penyakit metabolis (kelainan fungsi ginjal dan jantung, darah tinggi, diabetes, trigliseride dan kolesterol tinggi), penyakit genetis (hampir tidak pernah muncul dalam 30 tahun terakhir), penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba dan parasite (TBC, DBD, HIV, Influenza, Typoid dan infeksi parasit), Penyakit yang disebabkan oleh *chemist* (keraacunan, malnutrisi, kekurangan nutrisi tertentu), dan penyakit yang disebabkan oleh mekanik/ fisik (kecelakaan lalin, tersengat listrik dan lain-lain).



Gambar 2.17 Prosentase Mortalitas Penduduk

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, 2020

Prosentase mortalitas penduduk di Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari gambar di atas yang menunjukkan bahwa rata-rata lama hidup penduduk masih di bawah 75 tahun. Penduduk laki-laki lebih pendek dari perempuan. Perhatian menarik dapat dilihat dari prosentase kematian tinggi terdapat pada usia antara 50 – 59 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk yang meninggal pada usia produktif sangat tinggi, pada usia tersebut umumnya masih menanggung anak-anak sekolah atau pra bekerja. Atas kondisi tersebut maka pemerintah Kabupaten Cianjur harus menyusun berbagai langkah strategis, seperti membangun kesehatan yang berkelanjutan, pencegahan terhadap berbagai infeksi mikroba, pencemaran dan pola hidup sehat. Di sisi yang lain, pemerintah daerah memperluas jaringan pengamanan social bagi anak yatim piatu untuk memastikan aspek pendidikan sesuai dengan program yang ditetapkan.

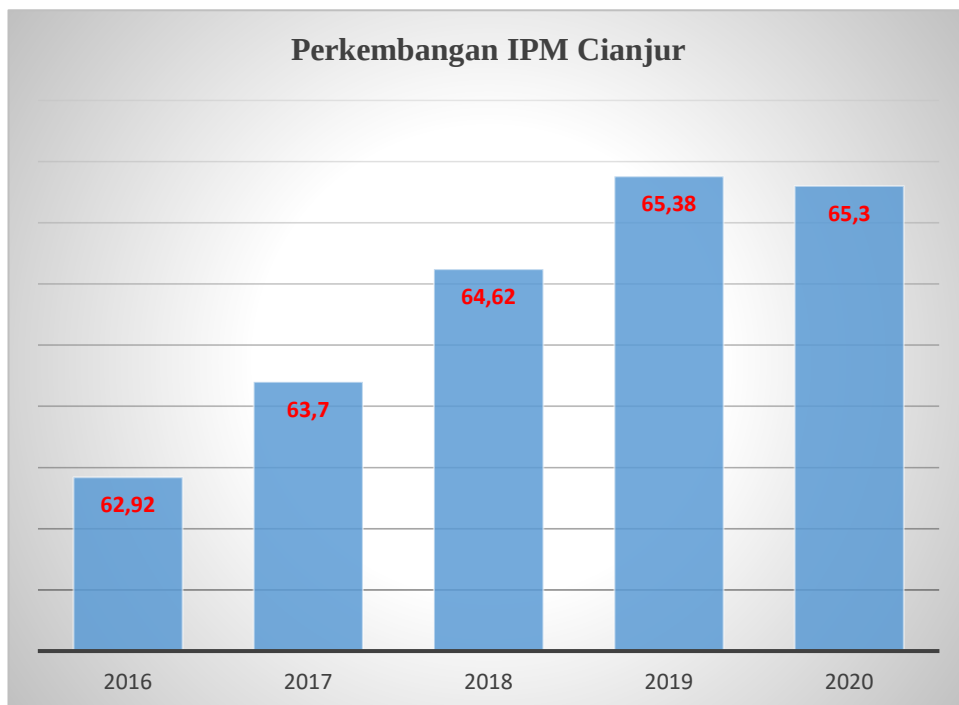
2.3. Aspek Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk pada hakekatnya merupakan gambaran sumberdaya manusia yang ada di suatu wilayah dengan segala hak-hak kemanusiaannya secara mandiri. Hak-hak kemanusiaan dapat dilihat dari aspek kemampuan penduduk dalam mencukupi kebutuhan pangan, papan dan sandang serta kenyamanan dalam kehidupan sosial. Hak tersebut diperoleh dengan memenuhi kewajiban dasar antar penduduk untuk menjalin harmonisasi. Salah satu hak yang dapat menjalin harmonisasi antar manusia adalah kondisi di mana penduduk memiliki penghasilan, pekerjaan yang layak, pendidikan yang akomodatif terhadap kebutuhan lapangan kerja dan tingkat kesehatan yang berkualitas.

2.3.1. Aspek Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan bagian penting dari kualitas penduduk, nilai ini dipengaruhi oleh kesehatan, pendidikan dan daya beli. Nilai IPM ini berkorelasi positif dengan variabel pembangunan lainnya seperti tingkat ketenagakerjaan, tingkat pengangguran, jumlah penduduk usia produktif, masa sekolah dan gini rasio dan lain-lain. Nilai IPM di Kabupaten Cianjur menunjukkan angka yang berkualitas. Setiap kenaikan angka dalam IPM merupakan bentuk capaian kinerja pemerintah dalam menata target setiap item dalam IPM.

Gambar 2.18 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016-2020



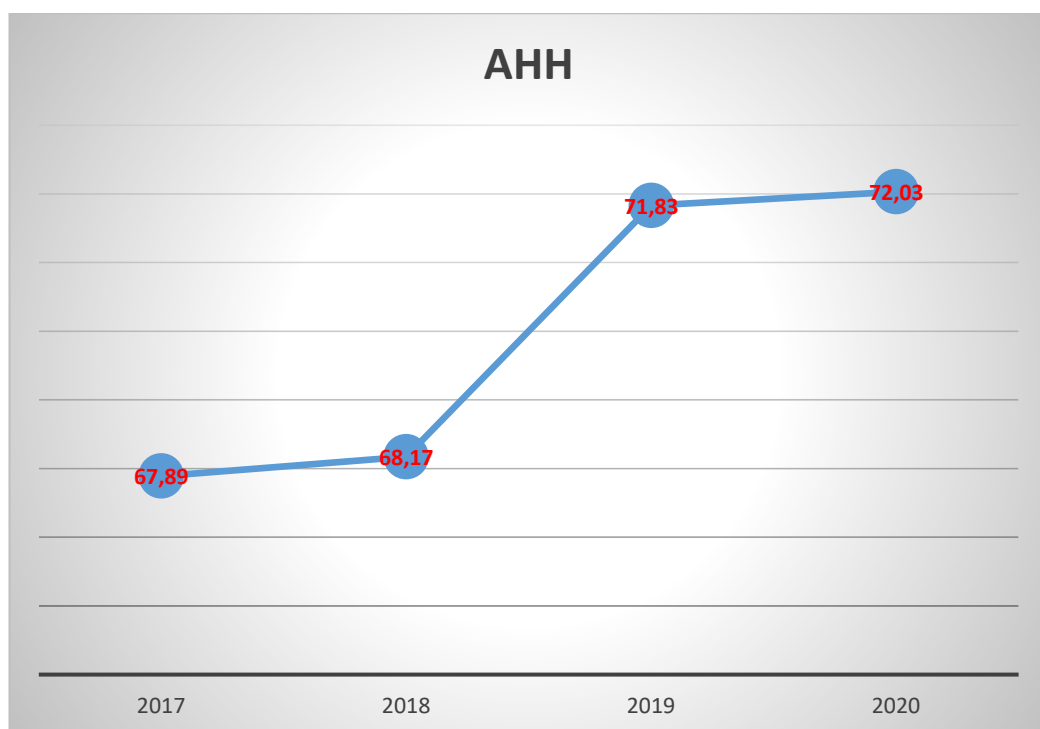
Sumber : BPS Cianjur 2021

Tiga dimensi dasar untuk mengetahui nilai IPM adalah Umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pada tahun 2016 sampai 2019 IPM Kabupaten Cianjur naik mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Seluruh komponen penyusun IPM menunjukkan peningkatan. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cianjur mengalami akselerasi sampai tahun 2019, tetapi nilai IPM di Kabupaten Cianjur masih rendah apabila dibandingkan dengan nilai di level provinsi. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk tahun 2020, kondisi IPM di Kabupaten Cianjur justru mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi pada beberapa komponen penagkumulasi nilai indeks.

Aspek-aspek IPM yang perlu menjadi perhatian serius adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

2.3.2. Aspek Pembangunan Kesehatan Kabupaten Cianjur

Dimensi kesehatan diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH). Pada tahun 2018 Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan 0,24 persen dari usia harapan hidup tahun 2017, namun demikian terdapat penurunan di tahun 2020 seiring dengan banyaknya wabah penyakit termasuk pandemi Covid 19. Angka harapan hidup yang mengalami stagnasi digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.19. Angka Harapan Hidup Kabupaten Cianjur 2017-2020

(Sumber : BPS RI 2021)

Kondisi harapan hidup yang mengalami stagnasi dipengaruhi oleh angka kesakitan yang tinggi. Pada pembahasan di aspek mortalitas, dominasi kematian terjadi pada usia 55-59 tahun, artinya kematian akibat kesakitan usia produktif mendominasi usia lainnya. Angka kesakitan digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8 Angka Kesakitan Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	14,58
Perempuan	15,71
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	15,18
40 Persen Tengah	12,83
20 Persen Teratas	19,69
Kabupaten Cianjur	15,14

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2019)

Angka kesakitan dalam table di atas menggambarkan bahwa penduduk yang banyak mengalami sakit pada aspek jenis kelamin didominasi oleh perempuan, sedangkan pada aspek tingkatan social didominasi oleh penduduk yang memiliki tingkat ekonomi paling baik. Hal ini menggambarkan bahwa sebaran penyakit yang disebabkan oleh pola hidup sehat seperti pola makan, manajemen stress dan pengelolaan metabolisme tubuh menjadi prioritas untuk menurunkan angka kesakitan penduduk di Kabupaten Cianjur pada masa yang akan datang.

Berdasarkan komponen IPM Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa prestasi yang diraih Kabupaten Cianjur dalam membangun manusia adalah dari aspek kesehatan, kemudian menyusul berturut-turut pendidikan dan ekonomi masih di bawah prestasi provinsi Jawa Barat. Sektor ekonomi menjadi penting dalam pembangunan manusia, karena indeks pengeluaran masyarakat sangat tergantung dari pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh serapan tenaga kerja yang tinggi, tingkat ketergantungan yang rendah dan distribusi pendapatan masyarakat yang seimbang.

Berdasarkan komponen IPM pada aspek kesehatan menunjukkan adanya stagnasi fasilitas kesehatan, mulai dari infrastruktur kesehatan, jumlah tenaga kesehatan dan layanan kesehatan baik BPJS maupun Kartu Indonesia Sehat. Kondisi ini menyebabkan layanan dan fasilitas kesehatan tidak seimbang dengan peningkatan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kesehatan yang stagnasi ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.8.1. Sarana Kesehatan Kabupaten Cianjur 2021

No	Komponen	2018	2019	2020
1	Sarana Kesehatan Rumah sakit	4	4	4
2	Sarana Rumah Bersalin	0	0	0
3	Sarana Poliklinik	47	38	49
4	Puskesmas	52	45	47
5	Puskesmas Pembantu	121	103	108
6	Klinik Pratama	74	74	74
7	Posyandu	2537	2537	2537

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2021)

Begitupun infratrutur kesehatan dan tenaga kesehatan dimana jumlah dokter terus meningkat dari tahun 2015 sampai 2018, akan tetapi peningkatan ini relatif tidak signifikan dalam pencapaian berbagai rasio dalam variabel tingkat kesehatan. Lihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.9 Rasio Tenaga Kesehatan, Fasilitas Kesehatan dan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2020

KESEHATAN	2017	2018	2019	2020
Rasio posyandu per satuan balita	1: 68	1:73	1:68	1:58
Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	1 : 24721,5	1:29487,1	1 : 29487,1	1 : 24721,5
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1: 611.585	1: 623.432	1 : 645.321	1: 654.765
Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 13088	1 : 13432	1 : 13987	1: 14011
Rasio tenaga Bidan per satuan penduduk	1: 2041	1: 2203	1: 2321	1: 2389
Rasio tenaga perawat per satuan penduduk	1 : 1940	1 : 2051	1: 2136	1: 2232

(Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, 2021 diolah)

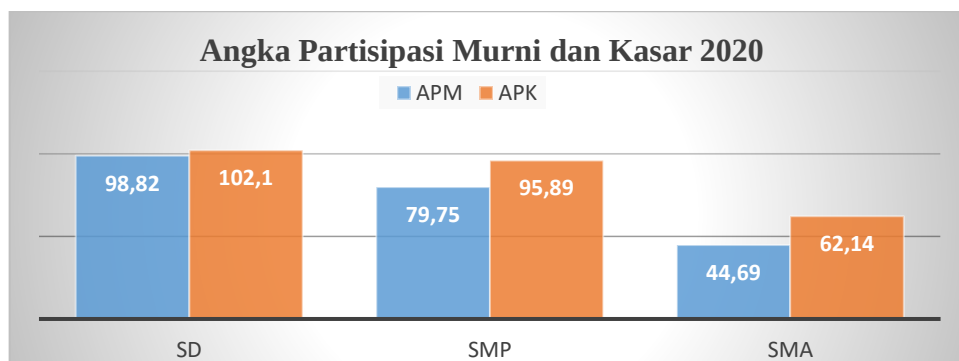
Ujung tombak kesehatan ibu dan anak di tingkat desa atau kelurahan adalah Pos Pelayanan Terpadu seperti Posyandu, Poskesdes, Posbides dan faskes lainnya di desa. Kondisi yang sama juga terjadinya penurunan jumlah Posyandu di beberapa tempat. Rasio posyandu per satuan balita menurun dari tahun 2017 sebesar 6,8 menjadi 5,8 pada tahun 2020 tetapi masih stagnan diangka 6. Stagnasi posyandu terjadi di wilayah perumahan dan pemukiman di mana penduduk di wilayah tersebut memiliki kemandirian untuk akses kesehatan ke tingkat fasilitas

kesehatan yang lebih tinggi. Berbeda dengan kondisi wilayah yang didominasi perdesaan, jumlah layanan kesehatan seperti Posyandu, Polides dan Poskesdes tidak mengalami penurunan.

Tabel di atas menggambarkan bahwa layanan kesehatan di Kabupaten Cianjur masih memiliki beberapa kelemahan, di mana seiring dengan perkembangan penduduk belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas atau kuantitas layanan kesehatan. Pembahasan fasilitas kesehatan dapat ditinjau dari aspek jumlah tenaga medis mulai dari perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis dan fasilitas posyandu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit. Seiring nilai IPM bidang kesehatan mengalami stagnasi, Kabupaten Cianjur perlu memperbaiki dari aspek angka harapan hidup yang rendah dengan dominasi kematian terdapat pada usia produktif (umur 55-59 tahun).

2.3.3. Aspek Pembangunan Pendidikan Kabupaten Cianjur

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan manusia. Sejalan dengan program pembangunan pendidikan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki capaian pembangunan melalui pendidikan, antara lain:



Gambar 2.20 Angka Partisipasi Murni/Kasar Pendidikan 2020

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2019)

stagnan dari aspek pendidikan, yaitu angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. Nilai partisipasi pendidikan yang sangat rendah terjadi pada usia sekolah menengah tingkat atas (SMA/MA/SMK/ Paket C) yang nilai APMnya hanya 44,69 persen. Kondisi ini berkontribusi cukup besar terhadap tenaga kerja sektor formal.

Industrialisasi di Kabupaten Cianjur menuntut penyerapan tenaga kerja lulusan SMA ke atas, dalam kondisi demikian maka Kabupaten Cianjur akan kehilangan usia produktif berpendidikan menengah cukup tinggi. Kondisi inilah yang memicu industry untuk merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Dampak migrasi tersebut menjadi beban bagi Kabupaten Cianjur dalam menata dan mengurus berbagai aspek penduduk dan kependudukan. Kondisi demikian menjadi pekerjaan rumah bagi dinas terkait di Kabupaten Cianjur.

2.3.4. Aspek Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Peningkatan nilai IPM juga belum seiring sejalan dengan peningkatan daya beli (ekonomi). Hal ini disebabkan oleh faktor di luar kemampuan pemerintah Kabupaten Cianjur seperti depresiasi nilai rupiah, perkembangan nilai tukar dan inflasi global. Faktor-faktor ekonomi tersebut merupakan permasalahan yang

dipengaruhi oleh situasi nasional dan global di luar kendali atau intervensi Kabupaten Cianjur saja.

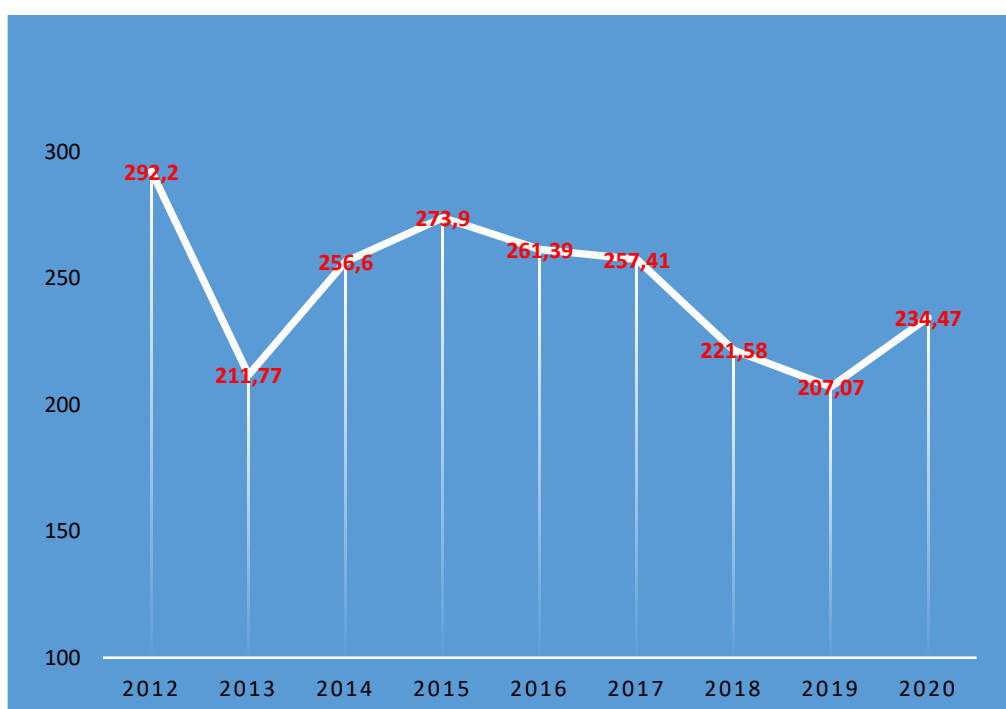
Tingkat ekonomi dapat digambarkan dari salah satunya garis kemiskinan. Nilai garis kemiskinan dikonversi dalam rupiah yang dimiliki masyarakat dalam membeli kebutuhan pokoknya. Berikut perkembangan kemiskinan di Kabupaten Cianjur berdasarkan garis kemiskinan.



Gambar 2.21. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Cianjur

Garis kemiskinan di Kabupaten Cianjur secara umum mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan kenaikan angka garis kemiskinan dari 250 ribu rupiah pada tahun 2012 menjadi 371 ribu rupiah pada tahun 2020. Walaupun nilai ini masih termasuk kategori rendah dibandingkan dengan garis kemiskinan di Jawa Barat, namun kondisi peningkatan nilai rupiah menunjukkan adanya kinerja ekonomi Kabupaten Cianjur yang baik dalam meningkatkan pendapatan penduduk.

Ilustrasi di atas tidak serta merta menurunkan jumlah penduduk miskin. Hasil laporan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dalam dekade terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh masuknya gelombang usia produktif yang tinggi dalam penyerapan kerja yang rendah di tengah industrialisasi yang masif di Kabupaten Cianjur. Berikut ini grafik perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cianjur.

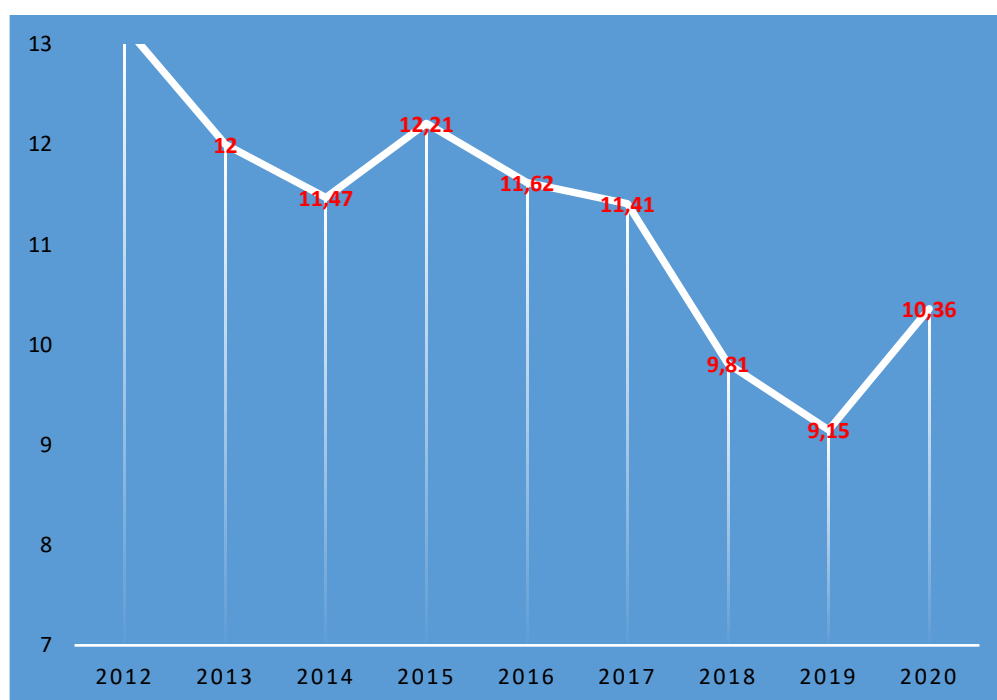


Gambar 2.22. Dinamika Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur tahun 2012-2020 (dalam ribu)

(sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2013 - 2021)

Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2019 secara gradual, namun pada tahun 2020 meningkat sebesar 34 ribu penduduk.

Peningkatan jumlah penduduk miskin ini menjadikan Kabupaten Cianjur memiliki pekerjaan rumah yang berat dalam mengatasi kemiskinan pasca pandemi. Peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 menjadikan prosentase penduduk miskin juga meningkat pula. Kondisi pandemi covid 19 menjadi penyebab utama atas dampak ekonomi. Prosentase penduduk Grafik peningkatan prosentase penduduk miskin sebagai berikut.



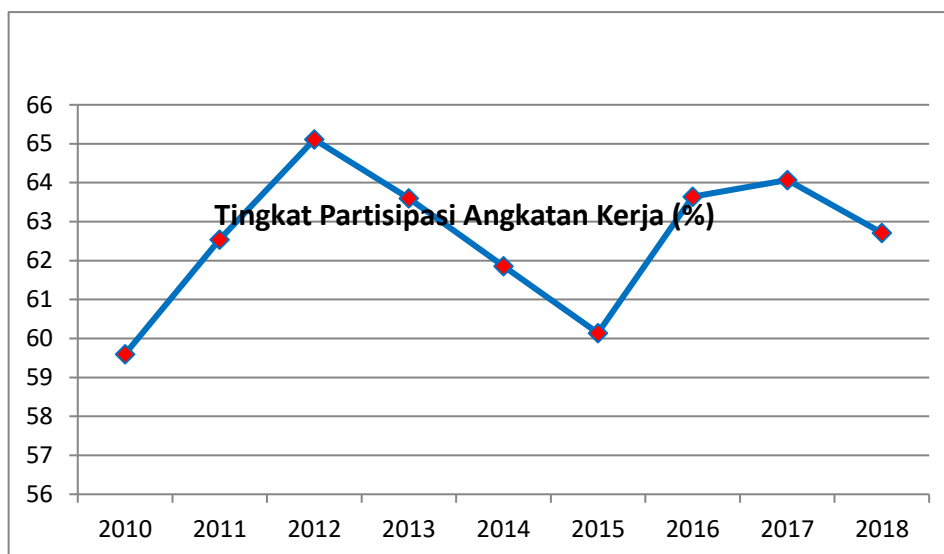
Gambar 2.23. Dinamika Prosentase Penduduk Miskin di kabupaten Cianjur

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2013 - 2021)

Pada sektor ketenagakerjaan, data BPS Kabupaten Cianjur tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja sebanyak 2.351 jiwa atau 90.45 persen dari angkatan kerja sebanyak 2.600 orang atau 64.07 persen penduduk berdasarkan pendataan keluarga tahun 2018. Kondisi ini

menggambarkan beban tanggungan orang yang bekerja atas orang yang tidak bekerja lebih baik dari target Jawa Barat. Orang yang tidak bekerja terdiri dari anak-anak usia belum bekerja, orang yang tua (udzur) dan pengangguran. Ratio ketergantungannya sebesar 49.14, artinya setiap 100 orang usia produktif menanggung beban 49 orang usia muda dan tua. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (20-64 tahun) adalah 3.285.574 jiwa atau 58.18 persen penduduk. Data ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Cianjur masih terdapat pengangguran pada usia produktif.

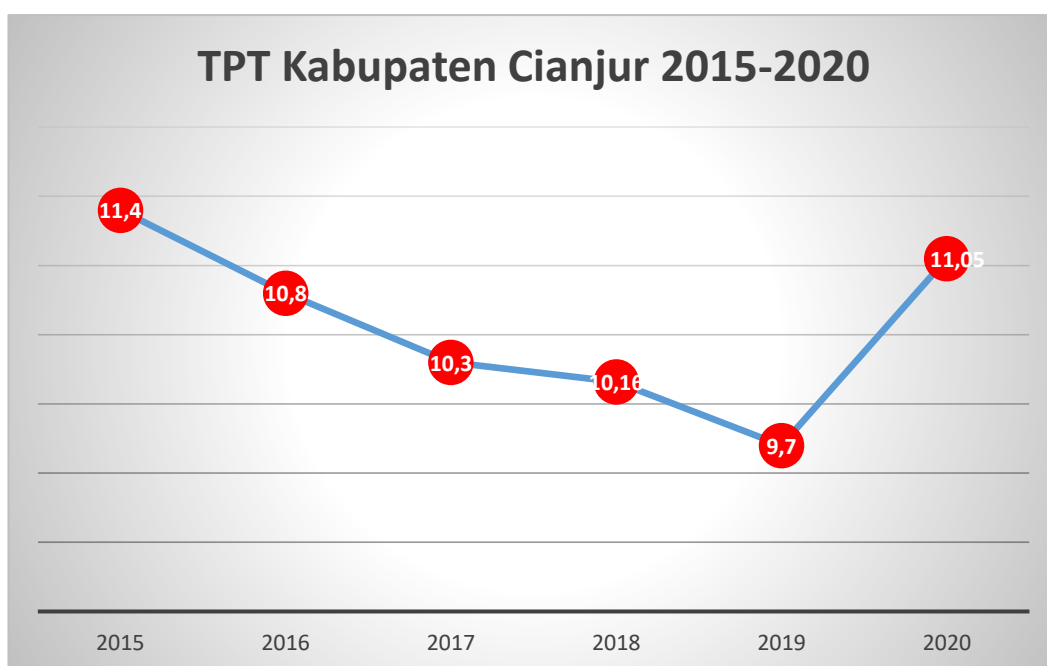
Nilai partisipasi angkatan kerja di kabupaten Cianjur pada tahun 2018 mengalami penurunan. Kondisi ini ironis dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. Hal ini dijelaskan dalam grafik berikut.



Gambar 2.24 Dinamika Prosentase Angkatan Kerja Kabupaten Cianjur

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2019)

Berdasarkan gelombang kesempatan mendapatkan pekerjaan tahun 2020-2024 yang tinggi dan menjadi modus proporsi penduduk, kondisi ini menggambarkan bahwa wilayah Kabupaten Cianjur akan mendapatkan bonus demografi yang cukup besar. Nilai bonus demografi yang besar menjadi modal penting bagi Kabupaten Cianjur apabila dapat memanfaatkan bonus demografi secara maksimal. Pola pelayanan dalam perencanaan pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan antisipasi secara cermat dan sistematis agar semua warga masyarakat usia produktif mendapatkan kesempatan kerja yang sama. Hal ini mengingat angka pengangguran terbuka pada tahun ini cenderung meningkat. Peningkatan ini terjadi dari tahun 2016 sebanyak 9,62 persen menjadi 9,75 persen pada tahun 2018.

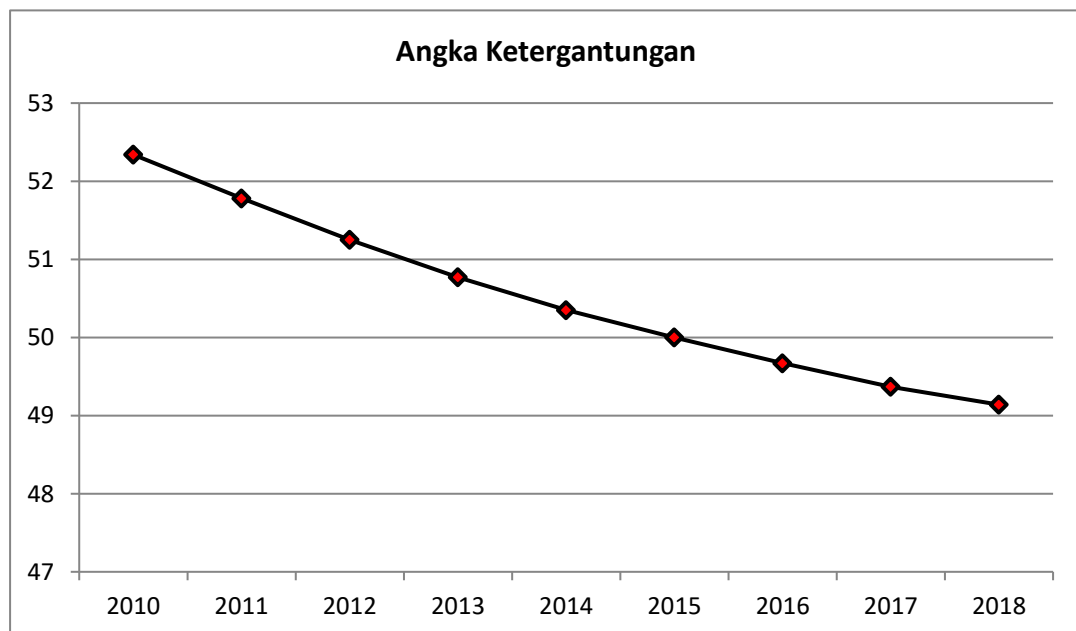


Gambar 2.25 Dinamika Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Cianjur

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2015-2021)

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Cianjur dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,4 persen, namun pada tahun 2020 justru terjadi peningkatan tajam melampaui capaian tahun 2018. Hal ini diduga akibat pandemic Covid 19 yang merusak sendi kehidupan, termasuk penurunan kesempatan kerja seiring masuknya usia produktif di akhir tahun 2019. Sektor yang paling sempit dalam peluang masuknya tenaga kerja baru di tahun 2020 adalah sektor pariwisata, menyusul perdagangan dan jasa non angkut.

Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi akan membebani pemerintah daerah. Beban yang berat adalah meningkatnya derajat kemiskinan akibat distribusi pendapatan yang dibandingkan dengan nilai ketergantungan. Nilai ketergantungan di kabupaten Cianjur disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.26 Dinamika Angka Ketergantungan Kabupaten Cianjur

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2019)

Distribusi orang yang bekerja di Kabupaten Cianjur terdiri dari beberapa sektor pekerjaan, antara lain bekerja sendiri, bekerja berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, buruh/karyawan/pegawai, Pekerja bebas di pertanian, Pekerja bebas di non pertanian, pekerja keluarga tak dibayar. Selengkapnya disajikan dalam table berikut ini.

Tabel 2.10 Status Pekerjaan Dan Lapangan Kerja Kabupaten Cianjur tahun 2021

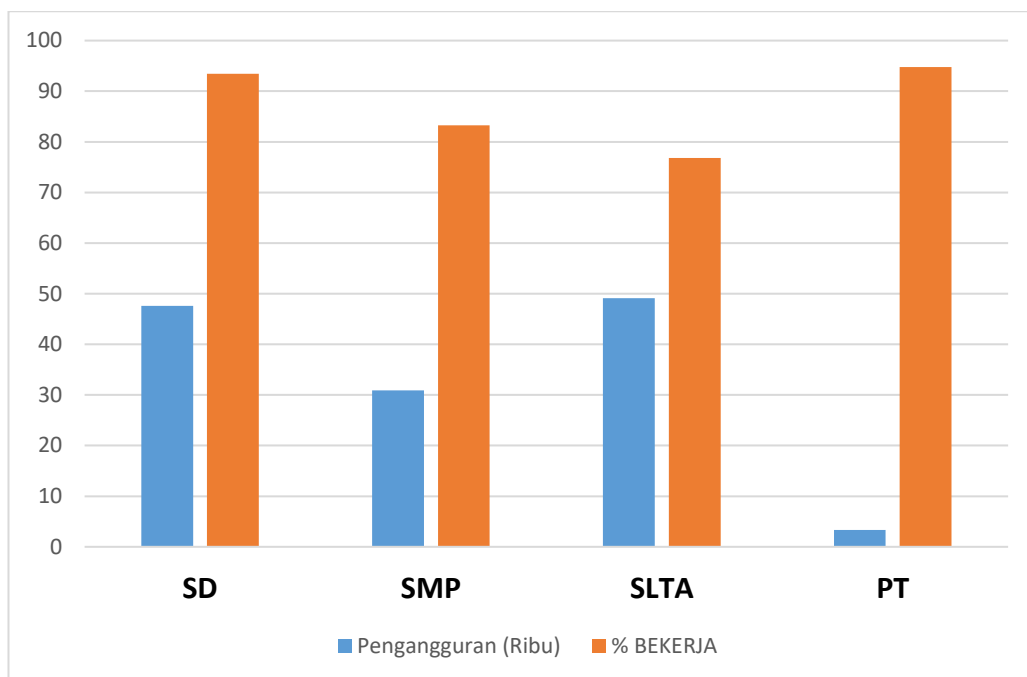
Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah Total
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja Economically Active	768.382	417.213	1.185.595
Bekerja/Working	672.890	381.689	1.054.579
Pengangguran Terbuka Unemployment	95.492	35.524	131.016
Bukan Angkatan Kerja Economically Inactive	114.131	412.104	526.235
Sekolah/Attending School	40.810	47.053	87.863
Mengurus Rumah Tangga Housekeeping	27.818	340.784	368.602
Lainnya/Others	45.503	24.267	69.770
Jumlah/Total	882.513	829.317	1.711.830

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2021)

Kondisi dimana wilayah Kabupaten Cianjur adalah wilayah berbasis pertanian, 40 tahun yang lalu terjadi perubahan di mana lahan-lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri, perkantoran dan perumahan sehingga jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini sangat rendah. Tingkat ketenagakerjaan bidang pertanian yang rendah disebabkan oleh faktor lahan

pertanian yang menyempit, kondisi ini berkorelasi langsung terhadap kemampuan wilayah dalam menyediakan pangan bagi penduduknya. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Cianjur sangat tergantung kecukupan pangannya dari luar Kabupaten Cianjur.

Adapun orang yang bekerja pada sektor industri tahun 2020 dengan menjadi buruh cukup tinggi yakni 253.382 orang atau 24 persen, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah di mana Kabupaten Cianjur sebagai kawasan industrialisasi harus menempatkan penduduk usia produktif secara lebih luas. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini masih belum maksimal, artinya pemenuhan tenaga kerja industri di wilayah ini masih dipasok dari luar daerah. Faktor utama rendahnya penyerapan pekerjaan sektor industri adalah faktor lulusan sekolah. Lulusan SMA justru memiliki prosentase pengangguran yang tinggi, sementara lulusan SMP ke bawah yang terserap dalam lapangan kerja berada pada dominasi sektor non formal. Data serapan tenaga kerja berdasarkan lulusan pada tahun ini disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.27. Jumlah Pengangguran dan Prosentase Bekerja Berdasarkan Pendidikan

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2021)

Kondisi tahun 2021 merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, data ini dapat dilihat dalam distribusi orang yang bekerja di Kabupaten Cianjur terdiri dari beberapa sektor pekerjaan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.11 Status Pekerjaan Dan Lapangan Kerja Kabupaten Cianjur 2019

Status Pekerjaan	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Berusaha sendiri	418580	20,09	424935	20,15	445261	18,93	504725	21,42
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	153349	7,36	158800	7,53	157874	6,71	217582	9,23
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	49889	2,39	46399	2,2	107371	4,57	71787	3,05

Buruh/karyawan/pegawai	1123860	53,95	1103250	52,3	1261339	53,63	1307499	55,48
Pekerja bebas di pertanian	51894	2,49	78419	3,72	64487	2,74	49878	2,11
Pekerja bebas di non pertanian	171408	8,23	165886	7,86	164711	7	114570	4,86
Pekerja keluarga/tak dibayar	114254	5,48	131671	6,24	150710	6,41	90834	3,85

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2019)

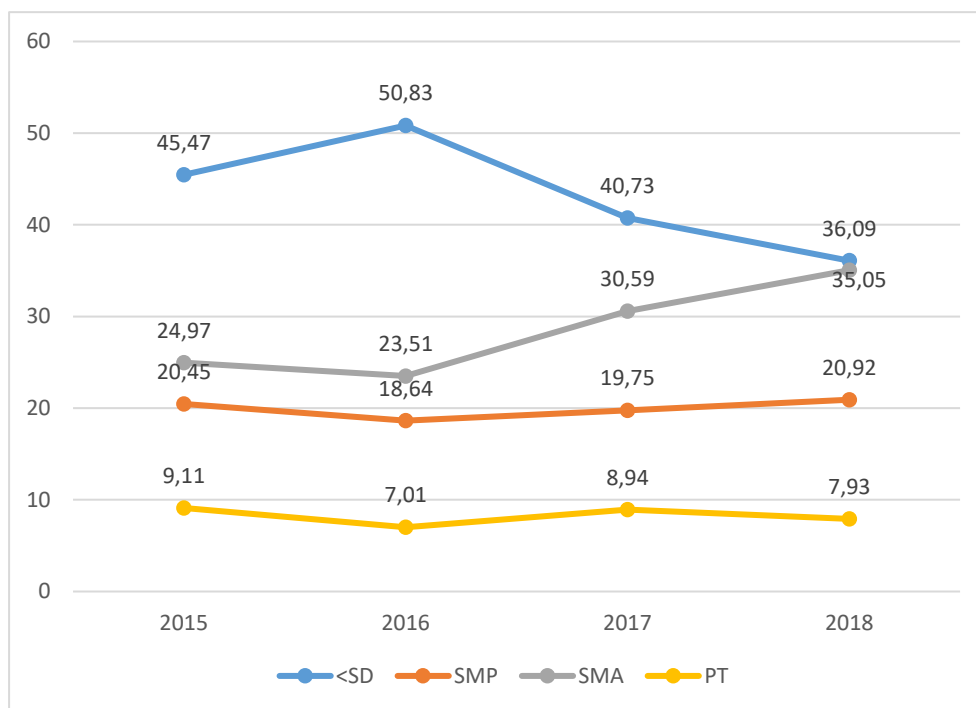
Kondisi dimana wilayah Kabupaten Cianjur adalah wilayah berbasis pertanian, 40 tahun yang lalu terjadi perubahan di mana lahan-lahan pertanian berubah menjadi kawasan industri, perkantoran dan perumahan sehingga jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini sangat rendah. Tingkat ketenagakerjaan bidang pertanian yang rendah disebabkan oleh faktor lahan pertanian yang menyempit, kondisi ini berkorelasi langsung terhadap kemampuan wilayah dalam menyediakan pangan bagi penduduknya. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dijelaskan bahwa penduduk Kabupaten Cianjur sangat tergantung kecukupan pangannya dari luar Kabupaten Cianjur.

Adapun orang yang bekerja pada sektor industry tahun 2018 dengan menjadi buruh cukup tinggi yakni 1.307.499 orang atau 55,48 persen, kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah di mana Kabupaten Cianjur sebagai kawasan industrialisasi. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini masih belum maksimal, artinya pemenuhan tenaga kerja industri di wilayah ini masih dipasok dari luar daerah. Faktor utama rendahnya penyerapan pekerjaan sektor industri adalah tingkat pendidikan dan ketrampilan.

Tabel 2.12 Status Pendidikan Lapangan Kerja Kabupaten Cianjur

Tahun	<SD	SMP	SMA	PT
2017	45,47	20,45	24,97	9,11
2018	50,83	18,64	23,51	7,01
2019	40,73	19,75	30,59	8,94
2020	36,09	20,92	35,05	7,93

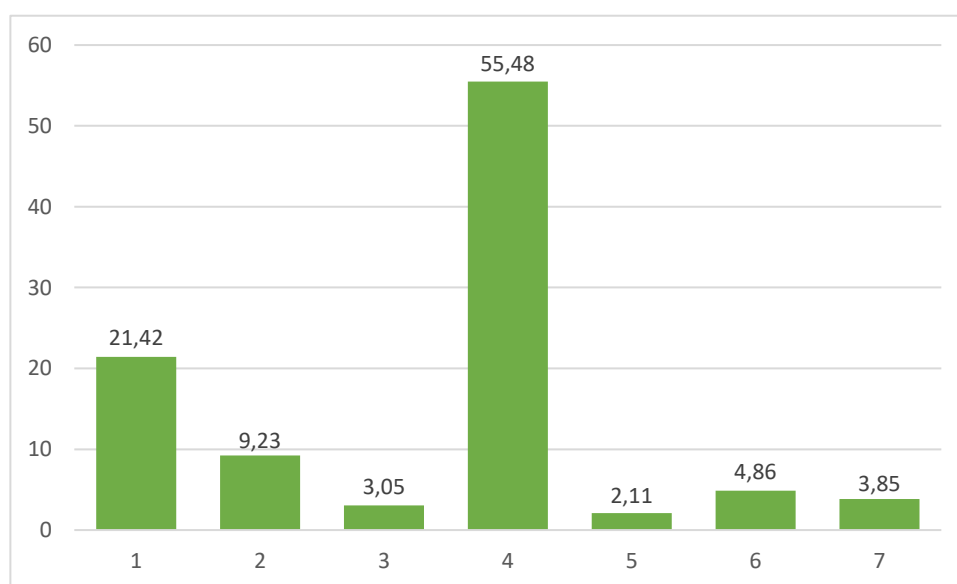
(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2018- 2021)



Gambar 2.28 Status Pendidikan Lapangan Kerja Cianjur

Penyerapan lapangan kerja berdasarkan tingkat pendidikan di kabupaten Cianjur didominasi oleh penduduk di bawah SD tahun 2018 sebesar 36,09 persen dan sisanya SMA sebesar 35,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sector informal dalam dunia kerja masih tinggi, namun di sisi lain usaha pertanian menempati proporsi terkecil. Berdasarkan fenomena ini maka dapat dijelaskan ketenagakerjaan di Kabupaten Cianjur didominasi oleh sektor kerja non formal di luar pertanian.

Ilustrasi untuk mendeskripsikan narasi di atas maka disajikan grafik prosentasi sektor pekerjaan. Prosentase sektor pekerjaan masyarakat Kabupaten Cianjur tersaji dalam grafik berikut ini.



Gambar 2.29 Prosentase Sektor Pekerjaan Dari Penduduk Bekerja 2020

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2021)

Keterangan :

- 1 : Berusaha sendiri
- 2 : Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar
- 3 : Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar
- 4 : Buruh/karyawan/pegawai

- 5 : Pekerja bebas di pertanian
- 6 : Pekerja bebas di non pertanian
- 7 : Pekerja keluarga/tak dibayar
- 8 : Berusaha sendiri

Kondisi ketenagakerjaan penduduk di Kabupaten Cianjur tahun 2018 menunjukkan distribusi sektor industri terbesar diantara sektor yang lain, penyerapan tenaga kerja untuk industri sebesar 55,48 persen. Apabila melihat realitas komposisi lulusan SD tahun 2018 sebesar 36,09 persen yang masih tinggi maka sektor jasa yang dijalankan masih belum menjadikan nilai pekerjaannya sebagai sektor formal.

Industri di Kabupaten Cianjur tahun 2018 telah menyerap tenaga kerja yang tinggi, yakni 55,48 persen menduduki peringkat kedua setelah sektor lainnya. Penyerapan tenaga kerja ini mengisi jumlah penduduk yang bekerja sebesar 2.351.000 jiwa orang. Walaupun demikian, secara umum penyerapan sektor pertanian menurun dibanding dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Berdasarkan data BPS tahun 2019 bahwa pada tahun 2017 penyerapan tenaga kerja pertanian mencapai 7 persen atau dan pada tahun 2018 mencapai 4,86 persen.

Tabel 2.13 Jumlah Perusahaan Industri Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Cianjur 2015-2018

No	Klasifikasi Industri	2015	2016	2017	2018
A	Industri Kecil Menengah (IKM)				
1	Industri logam	158	161	165	166
2	Industri mesin	43	43	45	45
3	Industri Alat Angkut	58	59	60	60

No	Klasifikasi Industri	2015	2016	2017	2018
A	Industri Kecil Menengah (IKM)				
4	Industri Elektronika	37	39	40	41
5	Industri tekstil dan produk tekstil	111	113	116	117
6	Industri Aneka	13	13	13	13
7	Industri barang dari kulit	23	23	23	23
8	Industri kimia dan barang kimia	115	119	127	132
9	Industri plastik dan barang plastik	81	86	87	88
10	Industri karet dan barang karet	24	24	24	25
11	Industri kertas dan barang kertas	25	25	26	26
12	Industri bahan bangunan dan dan bahan galian	50	54	54	54
13	Industri agro	240	273	278	281
14	Industri hasil hutan	121	123	124	124
	Jumlah A	1099	1155	1182	1195
B	Industri Menengah Besar				
1	Industri Logam	194	196	198	198
2	Industri mesin	80	80	80	80
3	Industri Alat Angkut	56	56	58	58
4	Industri Elektronika	16	16	16	16
5	Industri tekstil dan produk tekstil	405	405	405	405
6	Industri Aneka	35	35	35	35
7	Industri barang dari kulit	161	162	162	163
8	Industri kimia dan barang kimia	99	99	102	102

No	Klasifikasi Industri	2015	2016	2017	2018
A	Industri Kecil Menengah (IKM)				
9	Industri plastik dan barang plastik	35	37	37	37
10	Industri karet dan barang karet	7	9	10	10
11	Industri kertas dan barang kertas	103	103	103	103
12	Industri bahan bangunan dan dan bahan galian	51	51	51	51
13	Industri agro	444	449	454	454
14	Industri hasil hutan	205	205	205	205
	Jumlah B	1.891	1.903	1.916	1.917
	Jumlah A+B	2.990	3.058	3.098	3.112

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur Tahun 2019)

Jumlah perusahaan industri pada tahun 2018 terdiri dari Industri Kecil Menengah (IKM) sebanyak 1.195 dan Industri Menengah Besar sebanyak 1.917. Jumlah perusahaan industri besar/ sedang paling banyak berada di wilayah kecamatan Gunungputri, yaitu 95 perusahaan (73,08 persen). Sedangkan yang paling sedikit berada di wilayah kecamatan Tanjungsari, yaitu 15 perusahaan (9,2 persen). Pada tahun 2021 ini terjadi penurunan jumlah industry akibat pandemic Covid 19, berkurangnya industry ini menyebabkan terjadinya gelombang PHK di Kabupaten Cianjur.

Membaca sektor Industri di Kabupaten Cianjur dengan kondisi lahan yang terbaras dan terkonsentrasi di wilayah Cianjur Selatan dan Cianjur Tengah menunjukkan adanya pengurusan lahan datar. Kondisi ini membuat pertanian di Kabupaten Cianjur musnah. Problem yang muncul atas kondisi ini adalah tingkat

serapan tenaga kerja pertanian yang sedikit dengan lahan sempit dapat memicu kualitas tenaga kerja pertanian menjadi tenaga informal.

Kondisi kependudukan atas ketenagakerjaan atau sumberdaya ekonomi penduduk berimplikasi terhadap kondisi kesehatan dan pendidikan. Kondisi kesehatan di Kabupaten Cianjur dapat ditinjau dari aspek infrastruktur dan kualitas kesehatan. Infrastruktur kesehatan dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis dan lainnya. Fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, dan pustu. Tenaga medis terdiri dari dokter, bidan, perawat dan terapis.

Kondisi ini dapat digambarkan pada indeks pembangunan pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.14 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Cianjur 2014-2018

Komponen	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Partisipasi angkatan kerja perempuan	51,15	52,18	53,22	54,28	55,37
Ketelibatan Perempuan di DPR (persen)	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8
Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah (persen)	16,86	17,33	17,82	17,26	18,83
Pertisipasi perempuan di Lembaga swasta	45,44	46,35	47,28	57,48	49,2

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pembangunan untuk mengurangi rasio ketergantungan masih cukup tinggi sampai tahun 2018, bahkan tiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2017 sebesar 54,28%, sementara pada tahun 2018 meningkat menjadi 55,37%. Namun demikian dapat ditunjukkan oleh data terakhir adanya komitmen pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kesempatan peran dalam pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Indeks Pemberdayaan Jender yang semakin tahun semakin meningkat.

Perencanaan ideal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur harus disusun dalam bentuk sectoral kewilayahan. Hal ini dibangun agar proses dan hasil pembangunan dapat diakses atau dinikmati secara merata dan berkeadilan. Deskripsi ini mengandung pengertian bahwa pembangunan kependudukan harus dilakukan berdasarkan kondisi wilayah.

2.4. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga pada hakekatnya dibagi dalam dua program penting di Kabupaten Cianjur, yakni peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Peningkatan ketahanan keluarga meliputi aspek keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia, dan pembinaan para remaja. Kesejahteraan keluarga melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga yang sarannya adalah keluarga miskin.

Secara faktual, kondisi empiris pembangunan kependudukan dan KB di Kabupaten Cianjur pada dasarnya secara kuantitas memadai. Tapi kondisi alam

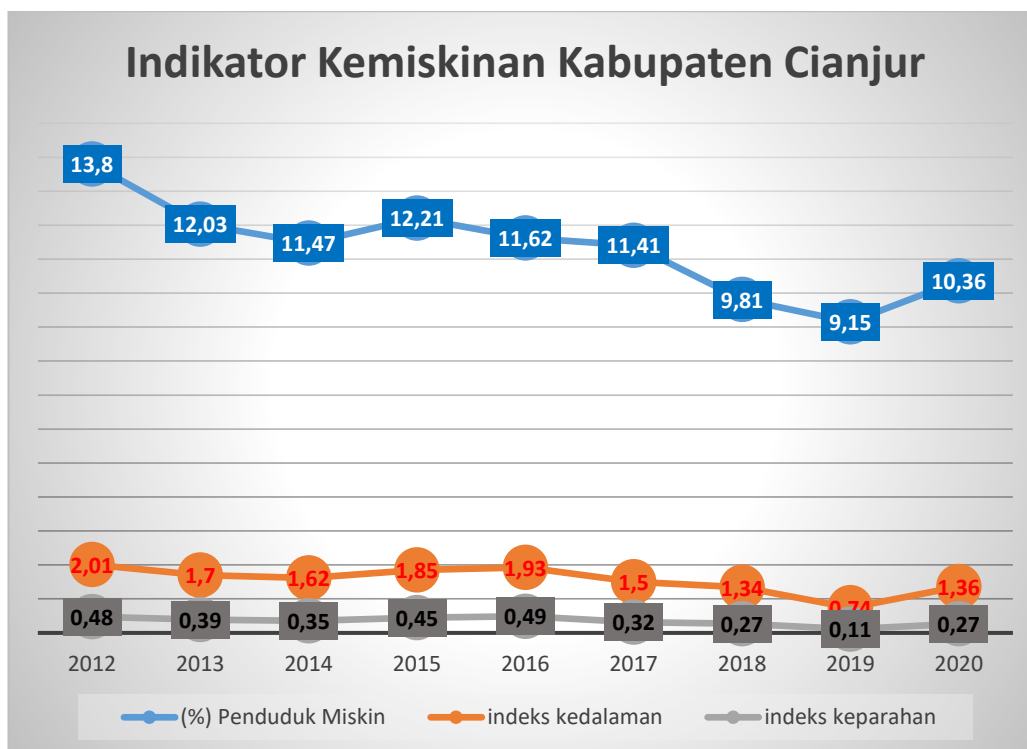
yang terbatas dan perkembangan industri yang mengancam pembangunan kualitas keluarga, menjadi alasan kuat untuk tetap melaksanakan pengendalian penduduk sehingga penduduk harus tetap dikendalikan. Identifikasi internal yang perlu dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Cianjur menunjukkan: Bahwa jumlah penduduk miskin menurut data BPS Kabupaten Cianjur tahun 2019 masih cukup tinggi 415.020 ribu orang atau 7,14% dengan garis kemiskinan Rp 359.787.

Distribusi kemiskinan di Kabupaten Cianjur disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.15 Indeks Kedalaman, Indeks Keparahan Kemiskinan dan Gini Ratio di Kabupaten Cianjur, 2010–2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Gini Ratio
2012	2,01	0,48	0,42
2013	1,7	0,39	0,38
2014	1,62	0,35	0,39
2015	1,85	0,45	0,42
2016	1,93	0,49	0,40
2017	1,5	0,32	0,38
2018	1,34	0,27	*
2019	0,74	0,11	*
2020	1,36	0,27	0,40

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2020



Gambar 2.30 Kemiskinan di Kabupaten Cianjur Tahun 2012-2020

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2021)

- a. Proporsi penduduk miskin pada tahun 2018 sebanyak 8,91 persen, meningkat 0,55 persen pada tahun 2021, hal ini menyebabkan indeks kedalaman kemiskinan mengikuti arus proporsi penduduk miskin dengan indeks keparahan yang stagnasi,
- b. Proporsi PUS muda masih tinggi (rata-rata 1,88 persen atau 18.106 pasangan) pasangan berdasarkan data Pendataan Keluarga tahun 2018). Dan pada tahun 2021 terdapat PUS sebanyak 566.783 pasangan dengan kesertaan dalam Keluarga Berencana sebesar 411.239 pasangan atau 72 persen.

- c. TFR, LPP, NRR, unmet need stabil yakni TFR 2,61, LPP 2,22 dan NNR 1.52 tahun 2018
- d. Peserta KB Pria masih rendah (1,17 persen berdasarkan pendataan keluarga 2018).

Persebaran penduduk menjadi bagian penting dari pembangunan kependudukan, nilai persebaran ini akan menentukan tingkat mobilitas penduduk, kepadatan wilayah, dan daya dukung wilayah. Nilai-nilai tersebut sangat berguna dalam menentukan cabang-cabang pembangunan kependudukan, seperti regulasi kesesuaian lahan pemukiman, ruang terbuka hijau, moratorium bangunan perumahan yang dapat ditinjau dari aspek daya dukung wilayah. Mobilitas penduduk juga dapat digunakan sebagai asumsi suplay dan rantai pasokan pangan ke penduduk di suatu wilayah, jumlah fasilitas kesehatan, pendidikan, seni dan olahraga serta menentukan kualitas lingkungan fisik dan social.

Undang-undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan sangat tegas menyatakan bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan (*people centered development*) berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Paradigma baru kependudukan tersebut menempatkan manusia sebagai subyek atau pusat dari proses pembangunan.

Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki daerah industrialisasi, pengembangan pariwisata dan perdagangan secara holistik dan di dalamnya membentuk wilayah yang memiliki permasalahan tentang persebaran penduduk. Persebaran penduduk di tiap kecamatan cukup variatif. Variasi ini dipengaruhi oleh jumlah desa, RW, RT dan KK.

Peningkatan jumlah KK berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk sekaligus kualitas, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Penduduk yang melangsungkan pernikahan memilih tinggal di wilayah asal sehingga terjadi *in-migrasi* penduduk apabila pasangan nikahnya berasal dari luar Kabupaten Cianjur.
2. Penduduk yang termasuk kategori baru menikah pada umumnya masih memiliki penghasilan yang rendah.
3. Pertambahan KK menyebabkan penambahan kelahiran baru
4. Pada KK yang memiliki penghasilan lebih akan menambah anggota keluarga yang berasal dari asisten rumah tangga.

Jumlah penduduk miskin secara umum mengalami peningkatan sejak masa pandemic Covid 19. Seiring peningkatan jumlah penduduk maka nilai prosentase tersebut menjadi besar dari aspek kuantitas penduduk miskin. Secara garis besar penduduk miskin di Kabupaten Cianjur dari tahun 2012 sampai 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.16 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Cianjur, 2012–2020

NO	TAHUN	GARIS KEMISKINAN	PENDUDUK MISKIN (Ribu)	%
1	2012	250.032	292,2	13,8
2	2013	264.580	211,68	12,03
3	2014	273.506	256,6	11,47
4	2015	287.939	273,9	12,21
5	2016	304.255	261,39	11,62
6	2017	320.390	257,42	11,41
7	2018	340.882	221,58	9,81
8	2019	350.760	207,07	9,15
9	2020	371.169	234,47	10,36

(Sumber : BPS Kabupaten Cianjur 2019)

2.5. Mobilitas Penduduk Kabupaten Cianjur

Distribusi penduduk di Kabupaten Cianjur cukup merata, hampir semua wilayah merupakan wilayah padat penduduk. Berdasarkan data kependudukan tahun 2018 semua wilayah kecamatan jumlah penduduknya sangat tinggi dan melebihi kapasitas lahannya. Disisi lain tidak terdapat wilayah kosong sehingga pengembangan atau distribusi penduduk sudah mengalami kejenuhan.

Salah satu variabel populasi penduduk adalah mobilitas penduduk. Sub bab kuantitas penduduk dijelaskan bahwa natalitas di beberapa kecamatan dengan padat penduduk, demikian juga tingginya natalitas pada beberapa kecamatan tidak

sebanding dengan banyaknya penambahan penduduk. Migrasi penduduk merupakan angka yang diperoleh dari data penduduk yang keluar dari populasi Kabupaten Cianjur dan data yang masuk dari luar Kabupaten Cianjur ke wilayah ini. Faktor-faktor yang menyebabkan migrasi antara lain faktor pencarian pekerjaan di luar populasi, mutasi kerja dan faktor ekonomi lainnya, pernikahan serta faktor social.

Berdasarkan hasil analisis migrasi penduduk di Kabupaten Cianjur menunjukkan adanya variasi antar wilayah dalam mobilitas penduduk. Jumlah migrasi bruto di Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebanyak 122.862 orang , sementara jumlah migrasi netto sebanyak 14.168 orang. Nilai keluar dan masuk penduduk yang dihitung dengan tidak memasukkan data natalitas, artinya hanya penduduk yang keluar dan penduduk yang masuk. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi penduduk pindah di Kabupaten Cianjur sebesar 72.415 orang. Kondisi ini menggambarkan tingkat migrasi keluar bagi penduduk pendatang masih rendah.

Modus penduduk yang keluar dari wilayah Kabupaten Cianjur adalah adanya alih fungsi lahan pemukiman menjadi Hotel, restoran dan tempat wisata baru yang bermunculan menjadikan banyak lahan-lahan tergusur di kawasan wisata. Di sisi lain, wilayah Kabupaten Cianjur terjadi industrialisasi atau perluasan kawasan pabrik baru seperti kawasan kota dan kawasan tengah serta kawasan utara. Hal ini memicu masyarakat Cianjur pindah ke wilayah Kabupaten lain dengan profesi sebagai pekerja industry, pedagang atau buruh lainnya. Kondisi orang datang (*in-migrasi*) menjadi *trend* di wilayah industri Kabupaten Cianjur. wilayah industri baru menjadikan penduduk di Kabupaten Cianjur kebanyakan orang datang.

Adapun orang keluar di Jawa Barat pada tahun 2020 sebagai berikut



Gambar 2.31. Orang keluar Di Jawa Barat tahun 2020

(Sumber BPS Jawa Barat 2021)

Berdasarkan data distribusi populasi Kabupaten Cianjur, menunjukkan semua wilayah Cianjur masih bertahan ditengah pandemic, hal ini diduga karena sektor-sektor ekonomi yang melibatkan orang banyak masih bertahan khususnya industry. Penambahan penduduk baru di wilayah irigasi kelas I, atau dengan kata lain harus dikurangi penduduknya atau regulasi moratorium pemukiman baru. Hal ini dapat mengakibatkan sempitnya areal persawahan irigasi teknis, sehingga menurunkan suplay pangan. Merujuk pada data mobilitas penduduk maka *inmigrasi* yang tinggi di wilayah Cianjur belum menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan kepadatan penduduknya. Dampak dari penduduk yang kepadatannya tinggi akan mengganggu sektor-sektor penting yang menjadi kebutuhan penduduknya. Sektor tersebut antara lain:

1. Sektor Pertanian

Lahan pertanian produktif dijadikan sebagai pemukiman sehingga luasan produksi menurun dan berakibat pada penurunan pasokan beras ke wilayah tersebut. Faktor kepadatan penduduk juga berpengaruh terhadap kualitas air permukaan. Pencemaran limbah industri dan rumah tangga berpengaruh nyata terhadap penurunan kualitas air permukaan, logam berat seperti Pb, Cr, dan plastic akan menginfeksi butiran-butiran padi. Kondisi yang sama atas kepadatan penduduk juga berpengaruh terhadap sektor perikanan dan peternakan. Terdapat praduga adanya penurunan produktivitas pertanian secara drastis dari tahun ke tahun. Pada akhirnya kebutuhan bahan pangan untuk energy dan protein bagi penduduk Cianjur harus mengandalkan dari luar daerah, kondisi ini menuntut setiap warga masyarakat memiliki daya beli yang memadai untuk kehidupan pokoknya.

2. Pendidikan

Kepadatan penduduk akan mempengaruhi kualitas pendidikan seperti rasio guru murid, volume kelas dan sarana prasarana yang dimilikinya.

3. Kesehatan

Kualitas air, udara dan pencemaran limbah rumah padat penduduk akan menurunkan kualitas kesehatan lingkungan. Demikian juga sarana dan prasarana kesehatan seperti rasio jumlah penduduk dengan tenaga medis (dokter, bidan, perawat dan fisioterapi). Demikian juga kesehatan social seperti kebahagiaan, ruang terbuka hijau dan relaksasi.

Mobilitas penduduk di wilayah Kabupaten Cianjur perlu dikendalikan untuk menjamin kualitas penduduk yang terpenuhi aspek pangan, kesehatan dan pendidikan.

2.6. Data dan Informasi Kependudukan

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi penduduknya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif (Purna dan Adhyawarman, 2009). Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan (terutama pembangunan manusia), UNDP kemudian menyusun indeks pembangunan manusia (IPM) atau *human development index (HDI)*, yaitu indikator gabungan yang terdiri dari tiga ukuran: kesehatan (sebagai ukuran *longevity*), pendidikan (sebagai ukuran *knowledge*), dan tingkatan pendapatan riil (sebagai ukuran *living standards*).

Kependudukan merupakan bagian penting dari upaya membangun kualitas sumberdaya manusia. Perencanaan pembangunan manusia dan kependudukan disusun sedemikian rupa sehingga program pembangunan lainnya seperti infrastruktur akan mengacu pada jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan data penting dalam pembangunan, seperti yang dijabarkan sebelumnya bahwa penduduk adalah subyek pembangunan sekaligus pelaksana pembangunan dengan orientasi (obyek) adalah kesejahteraan penduduknya. Atas ilustrasi ini maka data dan informasi kependudukan penting untuk seluruh pelaksana pembangunan daerah atau wilayah.

Data dan informasi kependudukan disusun untuk menggambarkan estimasi memproyeksi dan menetapkan penduduk ideal pada tahun berikutnya. Seluruh elemen pembangunan akan mengikuti informasi tersebut sebagai acuan dalam target pembangunan. Bagi Kabupaten Cianjur data informasi kependudukan perlu menggambarkan proyeksi dan estimasi penduduk yang diperoleh secara dinamis dari *natality*, *mortality*, dan migrasi serta mobilitas penduduk. Dinamika populasi penduduk yang konsisten menggambarkan pembangunan kependudukan di wilayah tersebut berhasil dengan baik.

Data dan informasi kependudukan disusun dengan mengintegrasikan variabel pembangunan lainnya seperti tata ruang wilayah, ketahanan pangan, pertanian dan infrastruktur strategis lainnya, dan sebagainya. Integrasi data ini akan menggambarkan prediksi kebutuhan penduduk secara cermat. Bagi Kabupaten Cianjur, data dan informasi kependudukan terintegrasi akan menggambarkan kondisi obyektif saat ini dan prediksi tahun-tahun berikutnya dalam beberapa hal, antara lain :

1. Mengatur jumlah penduduk, meliputi kebijakan keluarga berencana dan imigrasi.
2. Menyusun infratraktur yang dibutuhkan dalam pembangunan kependudukan
3. Mengintegrasikan data kependudukan tersebut dalam program pembangunan strategis, antara lain :
4. Pembangunan kesehatan, meliputi sarana dan prasarana, tenaga medis dan kesehatan masyarakat. Program penambahan tenaga medis, perencanaan

pengembangan Puskesmas dan Rumah Sakit serta regulasi yang menyangkut peningkatan kualitas kesehatan masyarakat disusun berdasarkan kepadatan penduduk, jumlah penduduk dan dinamika populasi yang ada di dalamnya.

5. Pembangunan pendidikan, meliputi menentukan penyebaran guru, penambahan ruang kelas baru dan ifrastruktur pendidikan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan penduduknya.
6. Pembangunan Pertanian, meliputi peningkatan kapasitas irigasi, ketahanan pangan, suplay dan rantai pasok hasil pertanian dan ketenagakerjaan sektor pertanian. program ini disusun untuk meningkatkan kemandirian pangan, mengurangi rantai pasok beras dari luar daerah dan peningkatan sumberdaya manusia pertanian.

Penyerapan tenaga kerja formal dan informal pada sector pertanian dipengaruhi oleh curahan waktu setiap tahunnya dibagi jumlah minggu dalam setahun. Atas dasar inilah maka setiap tahun distribusi tenaga pertanian mengalami fluktuasi dan sulit diukur, kondisi ini terjadi karena beberapa factor, antara lain :

a. Ketergantungan Musim, iklim dan cuaca

Wilayah Jawa Barat memiliki musim tropis, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Secara umum musim penghujan terjadi dibulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Kondisi demikian terjadi sampai tahun 2000-an. Pada era terakhir musim penghujan terkadang masih kering atau sebaliknya musim kemarau masih hujan. Oleh karena itu musim pada era sekarang dibagi dua pada musim

kemarau, yakni musim kemarau basah dan kemarau kering. Kemarau basah adalah musim kemarau namun hujan masih terjadi.

Petani dalam melakukan kegiatan budidaya tergantung pada musim. Kondisi ini terjadi pada petani tanaman pangan dan hortikultura. Pada sub sector perkebunan dan kehutanan, musim penghujan akan menyerap tenaga borongan (informal dan paruh waktu) lebih tinggi dari pada kemarau kering, hal ini biasanya pada kegiatan perbenihan, penyiangan dan pemupukan. Kegiatan budidaya pada Sub sektor peternakan dan perikanan tidak bergantung pada musim.

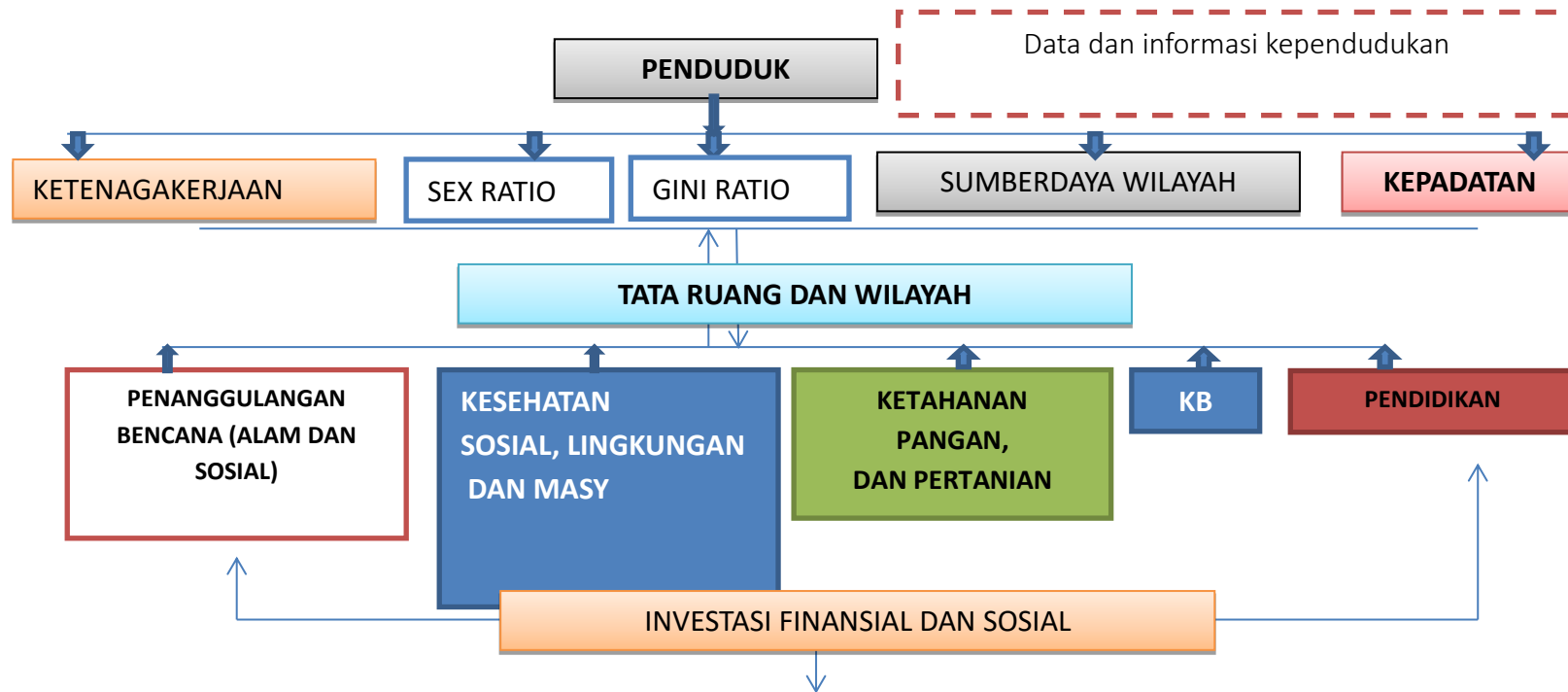
b. Luas Lahan Pertanian

Lahan pertanian merupakan daya dukung utama kegiatan pertanian, hal ini disebabkan bahwa besar kecilnya produksi tergantung pada luasan lahan budidaya. Lahan pertanian di kabupaten Cianjur dibagi menjadi dua, yaitu lahan basah dan lahan kering. Lahan basah digunakan dalam budidaya tanaman pangan, utamanya adalah sawah untuk produksi gabah, komoditas sekundernya adalah hortikultura dan tanaman tahunan.

Lahan basah biasanya merupakan hamparan lahan datar dengan irigasi teknis dan dapat ditanami sampai dua kali dalam setahun. Lahan kering digunakan untuk budidaya tanaman lahan kering seperti jagung dan palawija, komoditas lainnya dalam lahan kering adalah singkong, tanaman sekundernya biasanya tanaman keras seperti kelapa, kayu dan tanaman perkebunan serta kehutanan. Lahan sawah dengan irigasi teknis didominasi oleh wilayah datar

- Pengembangan industry, meliputi penentuan wilayah industri, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan industry dan lainnya dengan menyesuaikan kondisi lahan dan kepadatan penduduknya.
- Penanggulangan bencana baik bencana alam maupun bencana social.
- Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup, meliputi infrastruktur pengelolaan limbah, pengelolaan air limbah untuk domestic dan industri, emisi udara berberak dan tidak bergerak, ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan drainase pada kawasan pemukiman, dan peningkatan pemahaman masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup.
- Keluarga Berencana difokuskan pada pengendalian penduduk, ketahanan keluarga dan pemberdayaan masyarakat yang terlembaga pada kampung KB di masing-masing wilayah.

Gambaran integrasi data kependudukan ini kemudian disajikan dalam bentuk peta penduduk yang sinergis dengan peta geografi, demografi dan lainnya sehingga aksisibilitas data dapat diterima oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang membutuhkan data integrasi antara lain pemerintah baik daerah, provinsi ataupun pusat, industry swasta dalam pertimbangan investasi dan masyarakat Kabupaten Cianjur agar terbangun kesadaran dalam pengendalian penduduk yang lebih sistematis.



Gambar 2.32 Skema Alur Data Dan Informasi Kependudukan Terintegrasi

Pada berbagai aspek merupakan bagian dari investasi awal dalam membangun kependudukan. Nilai investasi ini dapat digambarkan dari factor utama yang mempengaruhi tujuan kependudukan antara lain kualitas dari aspek pendidikan, Keluarga Berencana, ketahanan pangan, kesehatan lingkungan dan penanggulangan bencana alam dan social. Aspek-aspek tersebut perlu disinergiskan dalam membangun tata ruang wilayah dan program pembangunan dengan memperhatikan beberapa titik pokok kependudukan, antara lain :

1. Ketenagakerjaan, pada berbagai sebaran umur, gender, pendidikan dan jenis tenaga kerja
2. Sex ratio yang dapat menggambarkan struktur populasi penduduk,
3. Rasio gini yang dapat membaca sejauh mana ketimpangan ekonomi dan factor yang mempengaruhinya
4. Kemampuan wilayah dalam menyediakan daya dukung untuk lingkungan sehat bagi penduduknya
5. Kepadatan penduduk dan dampak negatifnya seperti pencemaran, dan resiko habitat tiga

Bab III

ORIENTASI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR 2022-2037

3.1. Kondisi Harapan Kuantitas dan Kualitas Penduduk Di Kabupaten Cianjur

3.1.1. Kuantitas Penduduk

Secara filosofis, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur tahun 2005 - 2025, mengandung muatan orientasi pembangunan manusia Kabupaten Cianjur dalam arah pencapaian penduduk dalam masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat Cianjur juga merupakan masyarakat yang memiliki jatidiri yang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan sehingga menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal, nasional, dan internasional.

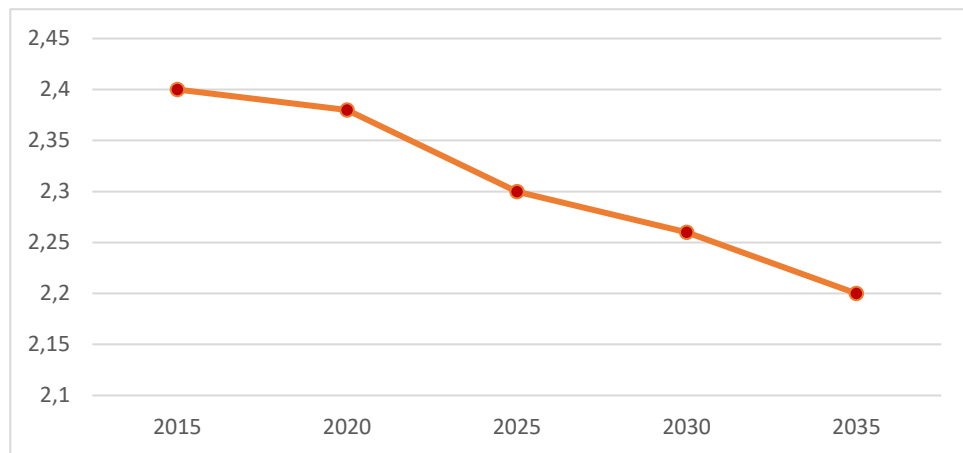
Misi ini didasari oleh prediksi jumlah penduduk Jawa Barat dalam dua puluh tahun mendatang diperkirakan mencapai 52 juta jiwa dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,6 persen. Dalam kurun waktu jangka panjang, kondisi yang diharapkan adalah penduduk tumbuh seimbang dan dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi kekuatan positif dan bukan menjadi beban bagi pembangunan di Cianjur. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang, diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan. Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan pada tahun 2025. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,02 pada tahun 2030 dan 2 pada tahun 2035.

Taksiran model pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur, berdasarkan data penduduk Kabupaten Cianjur dari SP 2000, SUPAS 2005 dan SP 2010. Hal ini dilakukan karena data sebelum SP 2000, Untuk melihat trend penduduk Kabupaten Cianjur dari tahun 2000 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Proyeksi penduduk Kabupaten Cianjur dari tahun 2015 – 2035 dengan Metode Komponen (BPS, BAPPENAS dan UNFPA, 2006). Asumsi-asumsi yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

- a. Asumsi TFR pada periode proyeksi untuk tahun 2015 untuk $TFR = 2,4$; 2020 : $TFR = 2,38$; 2025 : $TFR = 2,30$; 2030 : $TFR = 2,26$ dan 2035 : $TFR = 2,2$.

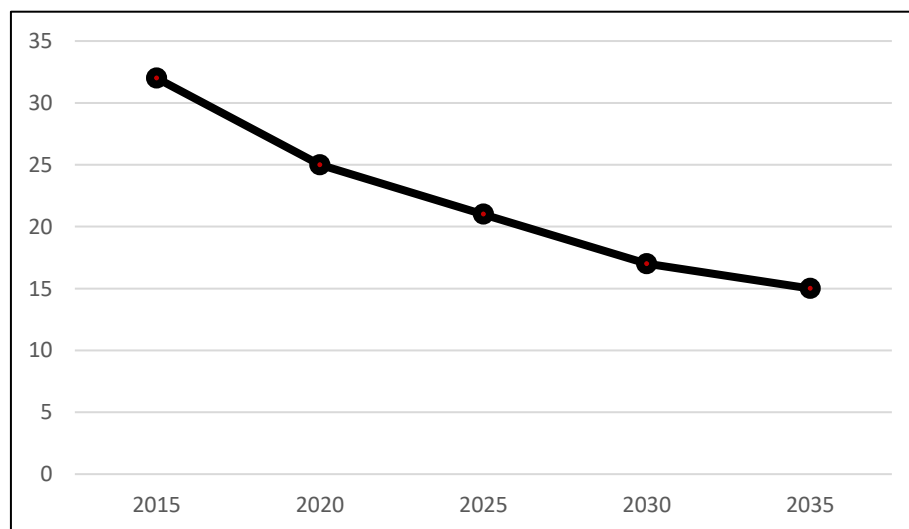
Trend TFR penduduk Kabupaten Cianjur diasumsikan dihitung berdasarkan TFR Jawa Barat, seperti pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Barat, 2019

Gambar 3.1 TFR Penduduk Kabupaten Cianjur

- b. Asumsi mortalitas yang digunakan adalah AKB (Angka Kematian Bayi) pada periode proyeksi untuk tahun 2015 :AKB = 32; 2020 : AKB = 25, 2025 : AKB = 21; 2030 : AKB = 17 dan 2035 : AKB = 15. Angka kematian ini diasumsikan terus turun, dengan makin membaiknya tingkat kesehatan penduduk Kabupaten Cianjur.



Gambar 3.2 Asumsi Mortalitas

- c. Asumsi migrasi sama dengan pola tahun dasar yaitu pola migrasi berdasarkan data SP 2000. Pola migrasi yang dipakai adalah pola migrasi risen tahun 1995-2000 dan dihitung ASNMR (*Age specific Net Migration Rate*) menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Tabel 3.1 ASNMR Penduduk Kabupaten Cianjur

UMUR	ASNMR W	ASNMR L
0-4	0.0022	0.0038
5-9	0.0021	0.0037
10-14	0.0017	0.0026
15-19	0.0024	0.0031
20-24	0.0047	0.0085
25-29	0.0042	0.0063
30-34	0.0044	0.0091
35-39	0.0028	0.0069
40-44	0.0022	0.0046
45-49	0.0019	0.0042
50-54	0.0018	0.0028
55-59	0.0015	0.0037
60-64	0.0013	0.0033
65-69	0.0014	0.0026
70-74	0.0015	0.0030
75+	0.0021	0.0052

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2019 (Data diolah)

3.1.2. Kualitas Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar di Kabupaten Cianjur harus diimbangi dengan kualitas penduduk yang baik agar tidak menjadi beban pembangunan di kemudian hari. Melalui perbaikan sarana dan prasarana kesehatan terutama terhadap akses dan mutu kesehatan, diharapkan angka kematian di Jawa Barat terus menurun dan angka harapan hidup terus meningkat. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang selama ini menjadi penyumbang terbesar bagi angka kematian di Indonesia dalam kurun waktu 2022-2037 diharapkan menurun menjadi 23 per 1000 kelahiran hidup dan terus menerus secara berlanjut hingga pada periode 2035-2045 menjadi sekitar 12 per 1000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup di Kabupaten Cianjur diharapkan meningkat menjadi 75,3 tahun pada tahun 2045.

Selain aspek kesehatan, pendidikan menjadi salah satu indikator tercapainya sumberdaya manusia yang terampil dan berdayasaing. Pada tahun 2025, diharapkan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Cianjur adalah 9 tahun dan terus meningkat menjadi 12 tahun pada tahun 2035.

Tabel 3.2 Dependency ratio dan AKH

IndikatorKualitas	2010	2015	2020	2025	2030	2035
DependencyRatio	0.51	0.48	0.46	0.47	0.47	0.46
AHH	68.2	68.7	70,13	72.5	72.4	73.3

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2020 (Data diolah)

Faktor lainnya yang menentukan untuk dijadikan sebagai ukuran kualitas penduduk adalah dependensi rasio dan angka haraphidup (AHH). Ukuran ini

merupakan ukuran yang juga digunakan dalam perhitungan IPM dan MDG's. Dimana harapan angka dari hasil perhitungan untuk Kabupaten Cianjur adalah 0,46 pada tahun 2035 untuk dependency rasio dan 74,3 untuk AKH.

3.1.3. Persebaran Dan Mobilitas Penduduk

Harapan di tahun 2045, penduduk Kabupaten Cianjur tersebar seimbang di seluruh Kecamatan baik di pusat kota maupun desa atau daerah penyangganya sesuai potensi daerah masing masing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kebijakan pengendalian penduduk harus memperhatikan dampak terhadap pergerakan penduduk dalam melakukan migrasi atau urbanisasi. Selain itu, pada tahun 2025 telah dimulai terjadinya keseimbangan antara migrasi masuk dan keluar sehingga tidak terjadi penumpukan penduduk. Kondisi migrasi yang diharapkan adalah terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru di luar pusat kotayang saat ini menjadi magnet paramigran sehingga persebaran penduduk menjadi seimbang sesuai dengan daya dukung dan potensi.

Peningkatan kualitas penduduk seperti pendidikan, ketrampilan dan pola pikir revolusi industry 4.0 di awal abad 21 ini akan menjadikan penduduk Kabupaten Cianjur memiliki mobilitas yang tinggi. Tingginya mobilitas diharapkan memunculkan peluang-peluang usaha pada berbagai sektor yang semakin efisien dan memberikan peluang kepada penduduk usia produktif untuk menyebar di berbagai wilayah secara seimbang. Arus mobilitas penduduk usia produktif juga

akan mengisi ruang-ruang peluang di berbagai penjuru dunia dalam membangun sektor usaha atau menjadi pekerja formal yang terampil dan berintegritas. Kondisi ini menjadikan penduduk di Kabupaten Cianjur mengalami pergeseran fundamental yang mengisi Indonesia maju.

3.1.4. Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, yang member corak pada masyarakat dan didalamnya dikembangkan sumber daya manusia. Melalui keluarga banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan lebih baik. Untuk itu, pendekatan keluarga dalam kegiatan pembangunan menjadi sangat penting. Keluarga berperan dalam pendidikan dan menjadi komponen utama dalam tumbuh kembang anak yang sejalan dengan fungsi-fungsi keluarga yaitu : Melalui pendekatan keluarga, yang termasuk kedalam pembangunan kependudukan dapat dilihat dari berbagai indikator seperti jumlah penderita penyakit HIV/AIDS atau TB atau mal nutrisi; penanggulangan masalah social seperti kenakalan remaja, narkoba dan penanggulangan akibat bencana. Oleh karenanya, diharapkan pada tahun 2045, keluarga di Kabupaten Cianjur bisa memiliki ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologi dan ketahanan social budaya yang mumpuni sehingga mampu melahirkan sosok manusia yang berkualitas tinggi dan menjadi bagian dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur. Kondisi diatas dapat dilihat dari indikator jumlah rumah tangga yang terdata secara hukum, hilangnya angka perkawinan usia dini, menurunnya perceraian, pendidikan generasi dalam keluarga yang dinamis dan kemampuan

kepala keluarga dalam memberi pengayoman baik ekonomi, sosial maupun karakter generasi yang kuat dan cerdas.

3.1.5. Data Dan Informasi Kependudukan

Kondisi harapan dari pembangunan data dan informasi kependudukan adalah tersusunnya sistem database kependudukan yang handal sehingga dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang akurat, riil dan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan secara tepat.

3.2. Analisis Pembangunan Kependudukan

3.2.1. Analisis Kuantitas Penduduk

Kondisi Kabupaten Cianjur yang beragam dalam besaran densitas penduduk membuat ketimpangan distribusi penduduk terlihat semakin besar dalam sepuluh tahun terakhir. Berbagai kecamatan memiliki pertumbuhan penduduk yang rata-rata lebih besar dari pertumbuhan penduduk di kecamatan yang ada. Pergerakan penduduk yang masuk ke wilayah perkotaan juga menunjukkan tren meningkat yang cukup signifikan. Sementara daerah pedesaan memiliki stock penduduk yang relatif stagnan atau bahkan berkurang.

Kondisi ketidakseimbangan penduduk yang kalau dibiarkan terjadi dalam jangka panjang semakin mempersulit bagaimana *balanced growth of population* dapat terjadi di Kabupaten Cianjur. Hal tersebut belum lagi ditambah dengan



memperhitungkan semakin terserapnya sumber daya ekonomi dan sosial ke daerah perkotaan daripada pedesaan. Eksternalitas negatif juga semakin besar baik yang bersifat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, bahkan lingkungan dan kelembagaan.

Ukuran wilayah pembangunan daerah juga harus diperhatikan, seiring dengan perkembangan pembangunan fisik dan pertumbuhan penduduk yang ada. Daya tampung wilayah sejauh ini menjadi perhatian yang cukup serius terutama terkait dengan kebijakan Tata Ruang yang dimiliki oleh kabupaten. Begitu pun perencanaan Tata Ruang ditingkat Kabupaten yang memayungi arah dari pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Dalam kebijakan Tata Ruang Kabupaten yang menyerap aspirasi Masyarakat hasilnya harus mampu menangkap pergerakan pembangunan fisik dan penyebaran penduduk itu sendiri.

Wilayah perkotaan diyakini menjadi pusat aktivitas sektor manufaktur dan jasa-jasa, di lain pihak wilayah perdesaan masih bertumpu untuk sektor kegiatan pertanian. Pusat-pusat dan sentra pertumbuhan ekonomi juga dianggap menentukan bagaimana arah pergerakan penduduk terjadi. Menjadi beban yang sangat besar bagi Cianjur bila pergerakan penduduk yang terjadi adalah migrasi ke arah perkotaan bukan perdesaan.

Tabel 3.3 Pertumbuhan Penduduk

Tahap	TingkatFertilitas	TingkatMortalitas	PertumbuhanAlami
1.Stabil tinggi	Tinggi	Tinggi	sangatrendah
2.Perkembangan awal	Tinggi	Turun pelan	Lambat
3.Perkembangan akhir	Turun	Turun lebihcepat	Pesat
4.Stabil rendah	Rendah	Rendah	Nol,atau sangatrendah
5.Menurun	Rendah	Lebih tinggi daripada kelahiran	Negatif

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2020 (Data diolah)

a. Pada keadaan I

Angka kematian turun lebih dahulu akibat peningkatan pembangunan dan teknologi, misalnya di bidang kesehatan, lingkungan, perumahan dan lain-lain. Kondisi ekonomi makin membaik akibat pembangunan dan pendapatan penduduk meningkat sehingga kesehatan semakin baik. Akibatnya tingkat kelahiran tetap tinggi (makin sehat) tetapi angka kematian menurun (akibat kesehatan dan lain-lain). Pada kondisi ini akan terasa tingginya laju pertumbuhan penduduk alami, seperti dialami Kabupaten Cianjur pada periode tahun 2020 sampai 2045 dengan angka pertumbuhan 1,95.

b. Pada Keadaan II

Terjadi perubahan akibat pembangunan dan juga upaya pengendalian penduduk. Maka sikap terhadap fertilitas berubah menjadi cenderung mempunyai anak lebih sedikit, sehingga turunnya tingkat kematian juga diikuti turunnya tingkat kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk menjadi tidak tinggi lagi. Penurunan

angka kelahiran di Kabupaten Cianjur dilakukan dengan menjalankan program KB atau Keluarga Berencana. Dalam menjalankan program KB, digalakan juga pemakaian alat kontrasepsi sehingga angka kelahiran bisa ditekan. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Cianjur mempunyai kebudayaan atau gaya hidup sebagai masyarakat modern.

Jadi Kabupaten Cianjur masih menjalani proses menuju kondisi stabil sesuai alur yang disepakati diteori transisi demografi. Semakin berkembangnya jaman, kebiasaan memiliki banyak anak mulai ditinggalkan, proses industrialisasi sudah semakin membaik, dan angka kelahiran sudah cukup berhasil ditekan. Keadaan tersebut dapat dilihat pada pertumbuhan penduduk Cianjur periode 1980 sampai 2010 yang turun menjadi 1,9persen. Peran pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pelayanan untuk MKJP pada peserta KB .

c. Pada Keadaan III

Bila penurunan tingkat kelahiran dan kematian berlangsung terus menerus, maka akan mengakibatkan pertumbuhan yang stabil pada tingkat yang rendah. Kabupaten Cianjur sedang menuju/mengharap tercapainya kondisi ini yaitu penduduk bertambah sangat rendah atau tanpa pertumbuhan. Tidak mustahil beberapa waktu yang akan datang Kabupaten Cianjur akan mencapai keadaan yang stabil dan menyelesaikan transisi demografi.

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur dapat dilihat dari analisis SWOT sebagaiberikut:

Tabel 3.4 SWOT

STRENGTH : ➤ Jumlah penduduk terbesar di Indonesia ➤ Luas wilayah, topografi dan keanekaragaman sumberdaya alam yang berpotensi besar sebagai mata pencaharian ➤ Besarnya jumlah penduduk usia produktif ➤ Angka Dependency Ratio menurun ➤ Angka Kelahiran dan Kematian menurun ➤ Semakin meningkatnya proporsi belanja dan pendapatan Pemerintah Daerah untuk peningkatan kualitas penduduk	WEAKNESSES : ➤ Rata-rata tingkat pendidikan penduduk masih rendah ➤ Terbatasnya pasar tenaga kerja dan tidak merata antar kabupaten/kota ➤ Rendahnya rata-rata lama sekolah ➤ Masih banyaknya jumlah penduduk miskin ➤ Masih terjadinya kesenjangan antar daerah dalam aksesibilitas mobilitas penduduk
OPPORTUNITIES : ➤ Angka Dependency Ratio Menurun ➤ Peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat	THREATS : ➤ Daya saing penduduk masih rendah ➤ Pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat ➤ Kepadatan penduduk relative tinggi dan semakin meningkat ➤ Kecenderungan semakin rendahnya kesadaran tentang Keluarga Berencana (KB) ➤ Perkawinan usia dini relative tinggi

3.2.2. Analisis Distribusi, Struktur dan Transisi Demografi

Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang dialami oleh suatu daerah, di satu sisi akan berdampak positif berupa penyediaan jumlah sumberdaya manusia yang memadai, peluang permintaan terhadap barang dan jasa yang semakin tinggi,



dan terkelolanya potensi sumberdaya yang tersedia sehingga menjadi efektif, namun di sisi lain akan berdampak negatif dalam pembangunan. Hal ini mempunyai arti dan makna yang cukup mendalam, oleh karena penduduk disamping sebagai pelaku (subject) juga merupakan tujuan (object) dari pada pembangunan. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas.

Keadaan kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, seringkali peran penting penduduk dalam pembangunan terabaikan.

Oleh karenanya, pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Mengingat betapa kompleksnya permasalahan kependudukan, maka salah satu tujuan dilaksanakannya pembangunan kependudukan adalah untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Adanya laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, akan



menimbulkan implikasi negatif yang cukup luas terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini, diantaranya adalah gangguan lingkungan oleh karena daya dukung alam yang tidak memadai dan tidak disesuaikan, semakin tingginya jumlah penganggur sehingga menambah jumlah kemiskinan dan timbulnya berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti tindak kriminal, gelandangan, pengemis, dan sebagainya, serta berbagai permasalahan lainnya yang multidimensional, cenderung merugikan pembangunan itu sendiri dan mengancam keberlanjutannya.

Menurut teori neo klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pembentukan modal menghasilkan kemajuan teknik yang menunjang tercapainya ekonomi produksi skala luas dan meningkatkan spesialisasi, Pembentukan modal memberikan mesin alat dan perlengkapan bagi tenaga kerja yang semakin meningkat. Namun yang menjadi persoalan selama ini adalah terjadinya paradoks dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Cianjur, di mana kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa angkatan kerja yang meningkat pesat diimbangi juga dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang bertambah besar.

Struktur dan distribusi penduduk menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Arah pembangunan yang berdasarkan kepada masing-masing visi dan misi daerah janganlah menimbulkan problema kependudukan yang baru. Sinkronisasi pencapaian pembangunan haruslah berbasis kepada seberapa besar input faktor yang dilihat dari struktur dan

distribusinya dapat mendukung pembangunan itu sendiri. Kemampuan proses pembangunan dalam menyerap angkatan kerja menjadi pekerja dengan basis pengembangan aksesibilitas penduduk pada ekonomi sektoralnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Cianjur dalam menyelesaikan transisi demografinya:

- Tidak meratanya pembangunan, masih ada daerah miskin dengan gaya hidup yang masih sederhana. Di sisi lain, pembangunan dan proses industrialisasi terus berkembang.
- Pendidikan masih perlu di tingkatkan dan diratakan. Salah satu faktor penentu pertumbuhan adalah pendidikan wanita. Pendidikan masyarakat yang tinggi juga akan merangsang pemikiran masyarakat untuk mempunyai gaya hidup modern.
- Agraris, mungkin salah satu faktor penyebab sulitnya Cianjur berubah menjadi daerah Industri secara merata karena sebagian besar masyarakat adalah petani dengan daya dukung hidrologi yang rendah, khususnya wilayah tengah dan selatan.
- Transisi demografi di Kabupaten Cianjur menuju pada surplus penduduk usia produktif. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan bahwa kondisi surplus penduduk usia produktif akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan tahun 2030. Surplusnya penduduk usia produktif ini merupakan sebuah potensi dalam pembangunan daerah, sebaliknya menjadi boomerang bila tidak dikelola secara baik khususnya melalui kebijakan pemerintah melalui program pembangunan daerah.

3.2.3. Analisis Kualitas Penduduk

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, komposisi penduduk Kabupaten Cianjur terdiri dari 29 persen (0-15 tahun) merupakan penduduk usia muda, sebesar 67 persen (15-64 tahun) penduduk usia produktif, serta 4 persen (lebih dari 64 tahun) merupakan penduduk usia tua. Hal ini menggambarkan bahwa transisi demografi di Jawa Barat menuju pada surplus penduduk usia produktif.

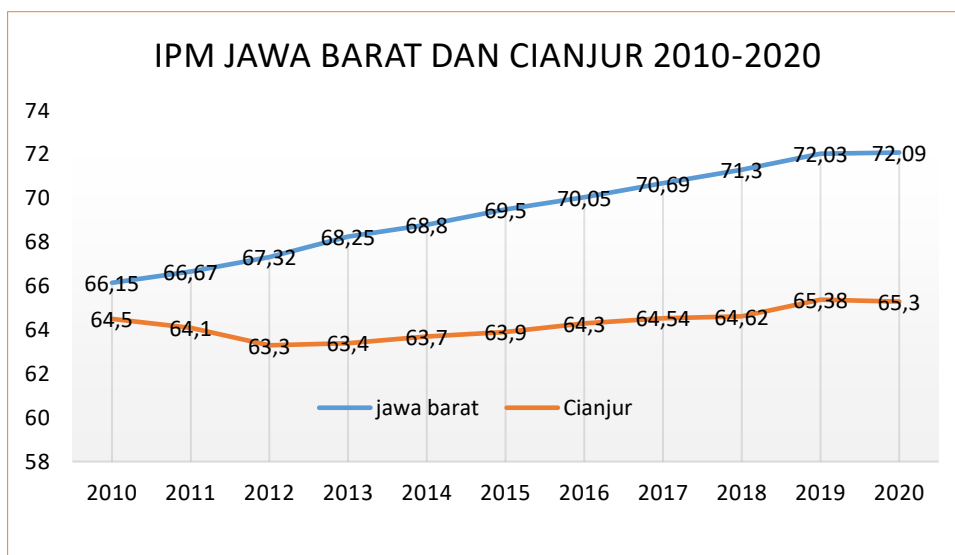
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memproyeksikan, bahwa kondisi surplus penduduk usia produktif akan terus berlanjut setidaknya sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan proyeksi tersebut, mulai tahun 2030 jumlah komposisi penduduk di Kabupaten Cianjur akan didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu kelompok umur 15–64 tahun. Sebaliknya penduduk usia muda cenderung mengalami penurunan dan penduduk usia tua meningkat.

Hal ini mengindikasikan bahwa Cianjur sampai dengan tahun 2030 akan mengalami surplus penduduk usia produktif. Surplusnya penduduk usia produktif ini merupakan sebuah potensi dalam pembangunan daerah, sebaliknya menjadi boomerang bila tidak terkelola secara baik khususnya melalui kebijakan pemerintah melalui program pembangunan daerah.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk usia produktif disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- a. Terjadinya transisi demografi yang ditandai dengan semakin menurunnya angka kelahiran dan kematian penduduk;
- b. Membaiknya tingkat kesehatan dan akses pelayanan dibidang kesehatan;

- c. Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk;
- d. Meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat;
- e. Keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan penduduk utamanya melalui program keluarga berencana dan pembinaan kesejahteraan sosial misalnya PKK; dan
- f. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, dalam konteks pembangunan berbasis sumber daya manusia (*people centre development*), indikator yang penting adalah kualitas penduduk. Hal ini karena tingginya jumlah penduduk usia produktif tidak akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah jika tidak diimbangi dengan kualitasnya. Kualitas penduduk tidak hanya kualitas pada kesehatan dan membaiknya income percapita saja, namun dalam jangka panjang pendidikan dan keterampilan menjadi faktor dominan dalam pembangunan daerah. Adapun IPM Kabupaten Cianjur sebagai berikut :



Gambar 3.3 IPM Kabupaten Cianjur (Tahun 2012-2020)

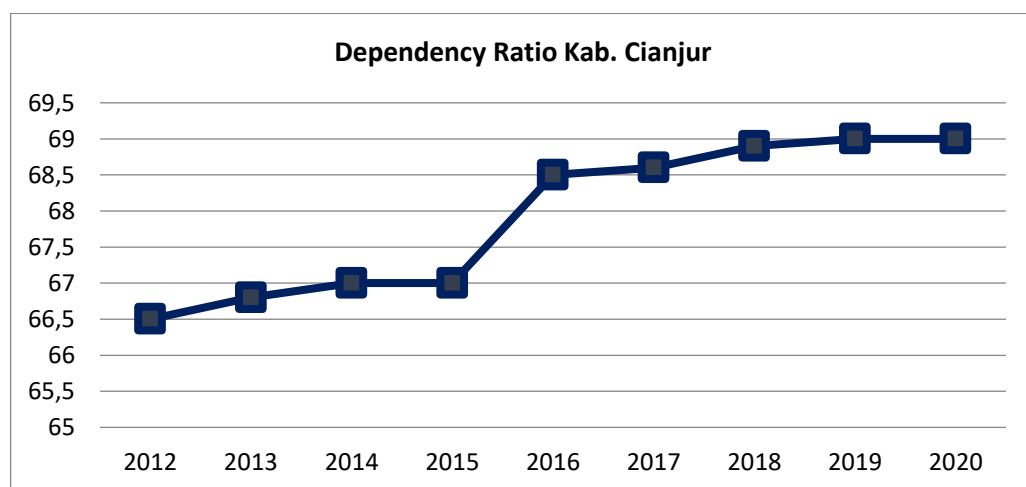
Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2020

Indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Cianjur sampai dengan tahun 2020 menempati urutan ke 2 terendah dari seluruh Kabupaten di Jawa Barat dengan posisi di bawah IPM Jawa Barat. Tiap periode indeks tersebut terus mengalami peningkatan dengan kelandaian atau stagnasi yang sulit diakselerasi. Hal ini menjadikan permasalahan dasar bagi pembangunan di Kabupaten Cianjur khususnya dalam pembangunan berbasis kependudukan (*Demografi Based of Development*). Upaya dalam menyiapkan transisi demografi yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif juga terdapat kendala akibat tingkat IPM yang rendah tersebut.

Bonus demografi merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. Menyikapi bonus demografi maka penurunan fertilitas memberikan probabilitas terhadap peningkatan kesejahteraan, karena adanya bonus demografi tersebut daerah akan memperoleh proporsi usia produktif yang tinggi. Secara teoritis *Demographic dividend* atau *demographic gift* memberikan sumbangan terhadap penurunan *Dependency Ratio*. Hal ini dikarenakan tenaga produktif bebannya terhadap tenaga non produktif akan semakin kecil. Kondisi tersebut memberikan dampak berupa beban terhadap pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan meningkatkan ekonomi bangsa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa *Dependency Ratio* Kabupaten Cianjur lebih rendah dibandingkan dengan angka di Jawa Barat. Pada tahun 2015 *Dependency Ratio* Kabupaten Cianjur sebesar 67,02 artinya bahwa

setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sebesar 67,02 penduduk usia non produktif baik usia muda maupun tua. Diperkirakan angka tersebut akan naik hingga tahun 2025 sebesar 68,49 dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 68,49 penduduk usia non produktif baik usia tua maupun usia muda. Dependency Ratio Kabupaten Cianjur adalah sebagai berikut :



Gambar 3.4 Dependency Ratio Kabupaten Cianjur (2015-2020)

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur, 2020

3.2.4. Analisis SWOT Menghadapi Bonus Demografi

Menyikapi adanya Bonus Demografi di Kabupaten Cianjur, secara sederhana dapat dilakukan analisa melalui analisis SWOT dengan melakukan identifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang terhadap pembangunan daerah. Adapun analisis tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.5 SWOT demografi

STRENGTH : ➤ IPM yang relatif meningkat dari tahun ke tahun ➤ Angka Dependency Ratio Menurun ➤ Adanya transisi demografi	WEAKNESSES : ➤ Rata-rata tingkat pendidikan penduduk masih rendah ➤ Terbatasnya pasar tenaga kerja pada sektor pertanian dan perdagangan ➤ Masih banyaknya jumlah penduduk miskin ➤ Masih terjadinya kesenjangan antar daerah khususnya wilayah utara dengan selatan
OPPORTUNITIES : ➤ Migrasi antar daerah di Jawa Barat tidak permanen tetapi di Kabupaten Cianjur relatif stabil di masa pandemi ➤ Banyaknya tersedia Lembaga pendidikan di Jawa Barat sebagai infrastruktur untuk pembangunan manusia ➤ Sumberdaya alam menjadi modal dasar dalam menggali potensi lokal ➤ Peran perempuan dalam pembangunan semakin meningkat	THREATS : ➤ Daya saing penduduk masih rendah ➤ Banyaknya alih fungsi lahan mengancam ketersediaan pangan ➤ Ifrastruktur kesehatan masih rendah ➤ Kepadatan penduduk relative tinggi dan semakin meningkat ➤ Kecenderungan semakin rendahnya kesadaran tentang Keluarga Berencana (KB) ➤ Perkawinan usia dini relative tinggi sehingga menurunkan produktivitas

Selanjutnya strategi dalam memanfaatkan bonus demografi agar mempunyai dampak positif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Cianjur diantaranya dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- Penyiapan lapangan pekerjaan.

- c. Menjaga stabilitas ekonomi dengan pengeluaran pemerintah yang berbasis kependudukan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengendalian jumlah penduduk
- e. Kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar, keterbukaan perdagangan dan saving nasional.
- f. Kebijakan yang mendorong munculnya wirausaha muda dan memberdayakannya untuk mendukung pembangunan nasional.

Strategi termaksud diharapkan mampu memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan melalui keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri (Wirausaha). Penciptaan lapangan kerja yang bersifat padat karya (pertanian, industri kreatif serta industri mikro, kecil dan menengah) dan sektor pariwisata menjadi peluang emas bagi kabupaten Cianjur.

3.2.5. Analisis Pembangunan Keluarga

Jumlah penduduk mempunyai dampak signifikan terhadap pencapaian IPM. Pada gilirannya, jumlah penduduk akan mempengaruhi pembangunan keluarga. Sejak awal masyarakat dihadapkan kepada hipotesis program KB akan mampu memangkas dengan cepat kemiskinan di satu daerah. Dengan kata lain, program KB merupakan alternatif yang efektif untuk pengentasan kemiskinan. Hal itu bisa

terjadi dikarenakan bahwa program KB bukan saja masalah kontrasepsi tetapi disertai pula dengan program-program pemberdayaan masyarakat.

Model kemiskinan itu biasanya dikaitkan dengan kemiskinan yang persisten atau kemiskinan warisan. Keluarga miskin cenderung akan menikah dengan keluarga miskin, dan mempunyai anak yang miskin. Benang merah ini sulit diputus dan ditembus. Maka, ketika muncul begitu banyak analisis yang mengedepankan hubungan antara program KB dengan kemiskinan memberikan tekanan yang luar biasa dengan pernyataan tersebut.

Kabupaten Cianjur mempunyai penduduk tertinggi di Indonesia dengan tingkat IMP yang relatif rendah. Data BKKBN (2010) tentang kemiskinan (Pra-KS) di Cianjur menurun, walaupun relatif kecil. Sementara pada saat yang sama peserta KB disini semakin membaik. Bahkan dalam program KB Jabar dari rangking 27 secara nasional naik menjadi rangking 3. Ini merupakan pertanda, secara perlahan Kabupaten Cianjur mulai bangkit membangun pembangunan keluarga melalui KB.

Kabupaten Cianjur merespons baik pembangunan keluarga ini, dengan meluncurkan Perda penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Perda yang diluncurkan bertepatan dengan deklarasi keluarga Indonesia di Cianjur (Juni

2014), seiring dengan begitu besarnya tantangan pembangunan saat ini. Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan adanya Perda ketahanan keluarga, maka fungsi fungsi keluarga akan berjalan dengan baik. Dalam Perda itu, telah dimasukkannya delapan fungsi keluarga yakni :

(i) Keagamaan,

- (ii) Sosial budaya,
- (iii) Cinta kasih,
- (iv) Perlindungan,
- (v) Reproduksi,
- (vi) Sosialisasi dan pendidikan,
- (vii) Ekonomi, dan
- (viii) Pembinaan lingkungan

Menyadari pentingnya program Keluarga Berencana di Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan ketahanan keluarga, maka PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), yang semula hanya ada di tingkat Propinsi (Juli 2012), kini di Kabupaten Cianjur telah ada tempat pelayanan terpadu program kependudukan dan Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang kemudian dikembangkan menjadi BANGGA KENCANA (Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana).

Kehadiran PPKS di Kabupaten Cianjur untuk menjadi “garda terdepan” pelayanan program KB, yang pada gilirannya mendorong pencapaian peserta. Inisiatif ini dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Cianjur. program BANGGA KENCANA dan pihak ketiga dari unsur masyarakat. Saat yang sama, program Genre (Generasi Berencana), dan BKB (Bina Keluarga Balita) terus digalakkan agar ketahanan keluarga ditengah situasi ekonomi yang kurang baik bisa ditingkatkan.

Bab IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020-2045 DALAM SINKRONISASI DENGAN RPJMD 2016-2021

4.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pembangunan penduduk merupakan pekerjaan jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar, berkualitas, dinamis dan terdata dalam system informasi keluarga yang baik. Kondisi yang diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stabil, dengan umur harapan hidup di atas 74 tahun sesuai dengan kebijakan Pemerintahan Pusat. untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan

berada pada 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,05 – 1,5 per perempuan tahun 2020. Untuk sampai pada TFR 2,1 tentunya berat bagi Kabupaten Cianjur sehingga pada tahun 2025 masih menargetkan TFR 2,21.

Pada posisi perubahan komposisi penduduk menurut umur, sama halnya dengan kondisi Kabupaten Cianjur berada pada fase ketika rasio ketergantungan mencapai angka terendah, yaitu kurang dari 41,54 persen pada tahun 2035. Kondisi ini penting karena akan memberi kesempatan bagi Kabupaten Cianjur untuk mencapai bonus demografi yang ideal. Salah satu tandanya adalah dengan jumlah penduduk usia produktif yang mencapai puncak, yaitu kira-kira 66,73 persen dari jumlah penduduk. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat, maka tahap tersebut akan tertunda atau bahkan hilang sama sekali.

Upaya pengendalian kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan mobilitas penyebaran penduduk. Oleh karenanya, pelaksanaan Program KB masih sangat relevan. Pada prinsipnya, pengaturan fertilitas dilakukan melalui program KB yang mengatur beberapa hal, antara lain :

1. Usia ideal perkawinan,
2. Usia ideal melahirkan,
3. Jarak ideal melahirkan, dan
4. Jumlah ideal anak yang dilahirkan.

Program KB perlu diarahkan pada upaya pemenuhan hak reproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima melalui program KB. Secara prinsip program KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut :

1. Pengaturan kehamilan yang diinginkan,
2. Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu,
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan,
4. Peningkatan kesertaan KB pria, serta
5. Promosi pemanfaatan air susu ibu.

Efektivitas pelaksanaan Program KB perlu didukung dengan :

1. Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah,
2. Larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM,
3. Pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan, serta
4. Perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin.

Pertumbuhan penduduk yang seimbang perlu juga ditopang oleh penurunan angka kematian. Adapun prioritas upaya dapat difokuskan pada:

1. Penurunan angka kematian ibu hamil,
2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan,
3. Penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta
4. Penurunan angka kematian bayi dan anak.

Strategi pengendalian kuantitas penduduk yaitu :

1. Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari *supply ke demand side approach*;
2. Memperkuat kelembagaan, penguatan SDM lembaga, memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur, mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah;
3. Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan mutual benefits.
4. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal dan nasional;
5. Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran.

Disahkannya Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan dasar untuk melakukan revitalisasi kebijakan kependudukan di Indonesia. Dari sisi kelembagaan, perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang besar untuk mengelola kebijakan kependudukan secara memadai. Sedangkan kelembagaan di

daerah nama dan bentuk struktur merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah hasilnya Kabupaten Cianjur menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan SK Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Pada Dinas Instansi Kabupaten Cianjur. Adapun Tugas dan wewenang lembaga tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2019 tentang tugas dan wewenang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Cianjur juga menghadapi persoalan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut (*ageing population*) yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya tingkat ketergantungan penduduk. Untuk mengatasi persoalan ini, kebijakan yang ditempuh adalah dengan perpanjangan masa usia kerja dapat menjadi alternatif kebijakan, layanan tunjangan hari tua melalui pemanfaatan asuransi yang dikelola oleh pemerintah dan sebagainya. Strategi ini perlu didukung oleh program perbaikan kesehatan bagi penduduk usia lanjut, pemberdayaan ekonomi bagi usia lanjut dan layanan pertanggungans asuransi yang diindikasikan cukup potensial mengurangi tingkat ketergantungan penduduk.

Menurut Easterlin, tingkat fertilitas sebagiannya ditentukan oleh karakteristik latar belakang seperti persepsi nilai anak, agama, kondisi pemukiman, pendidikan, status kerja, umur kawin pertama, pendapatan, kematian bayi/anak. Setiap keluarga mempunyai norma-norma dan sikap fertilitas yang didasarkan atas karakteristik di atas. Studi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan

kaum perempuan yang tinggi dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat fertilitas, karena perempuan yang lebih lama menghabiskan waktu untuk pendidikan akan memperpendek tahun resiko kehamilan karena menghabiskan periode panjang tahun melahirkan anak di sekolah. Selain itu perempuan berpendidikan tinggi cenderung memilih terjun ke pasar kerja terlebih dahulu sebelum memasuki perkawinan. Pendidikan juga dapat meningkatkan pengetahuan perempuan dalam proses informasi mengenai pilihan fertilitas dan perilaku kehamilan. Efek penting lainnya dari aspek ini adalah semakin baik tingkat pendidikan kaum wanita, maka mereka semakin berpotensi untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penghasilan keluarga sehingga waktu yang khusus mereka sediakan untuk membesarkan anak semakin terbatas, dengan sendirinya akan mempengaruhi jumlah anak yang diinginkan.

Lebih lanjut, Leibenstein mengatakan bahwa, mempunyai anak dapat dilihat dari dua segi ekonomi, yaitu segi kegunaan (*utility*) dan biaya (*cost*) yang harus dikeluarkan untuk membesarkan dan merawat anak. Apabila ada kenaikan pendapatan orang tua, maka aspirasi untuk mempunyai anak akan berubah, lebih menginginkan kualitas yang lebih baik dari pada kuantitas. Oleh karena itu, berbagai program peningkatan penghasilan dan perbaikan ekonomi keluarga berpotensi untuk mengurangi tingkat fertilitas.

Kebijakan dan program KB tidak dapat berjalan sendirian, perlu ditopang oleh kebijakan dan program lain, diantaranya yang strategis adalah intensifikasi program-program pengentasan kemiskinan, dan pembedayaan perempuan,

pembangunan keluarga dan peningkatan pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan gender.

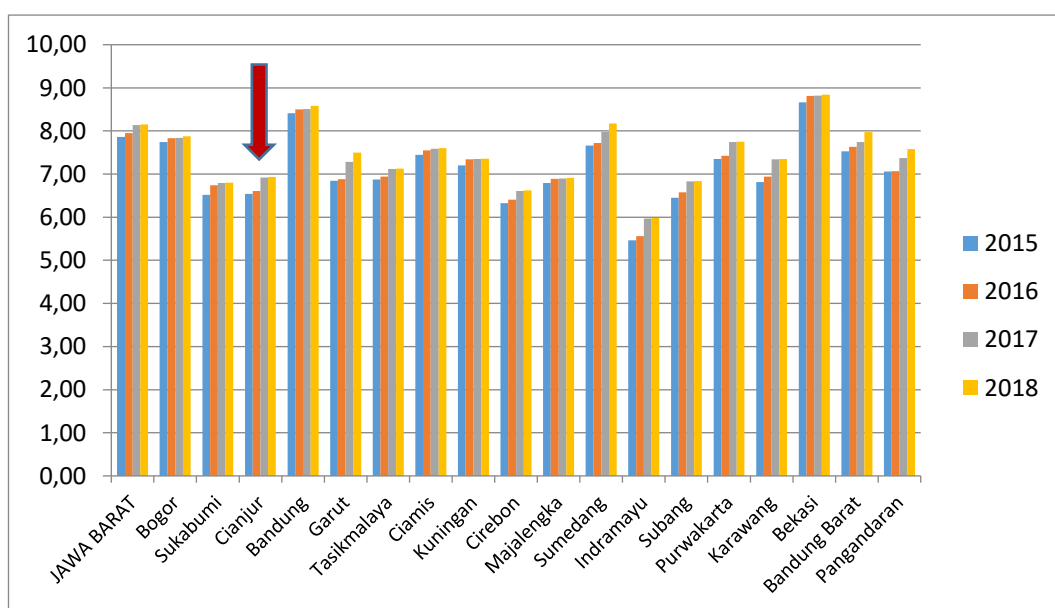
4.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5).

Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Strategi penting yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Intensifikasi penyelenggaraan pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi perlu terus dilakukan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya.

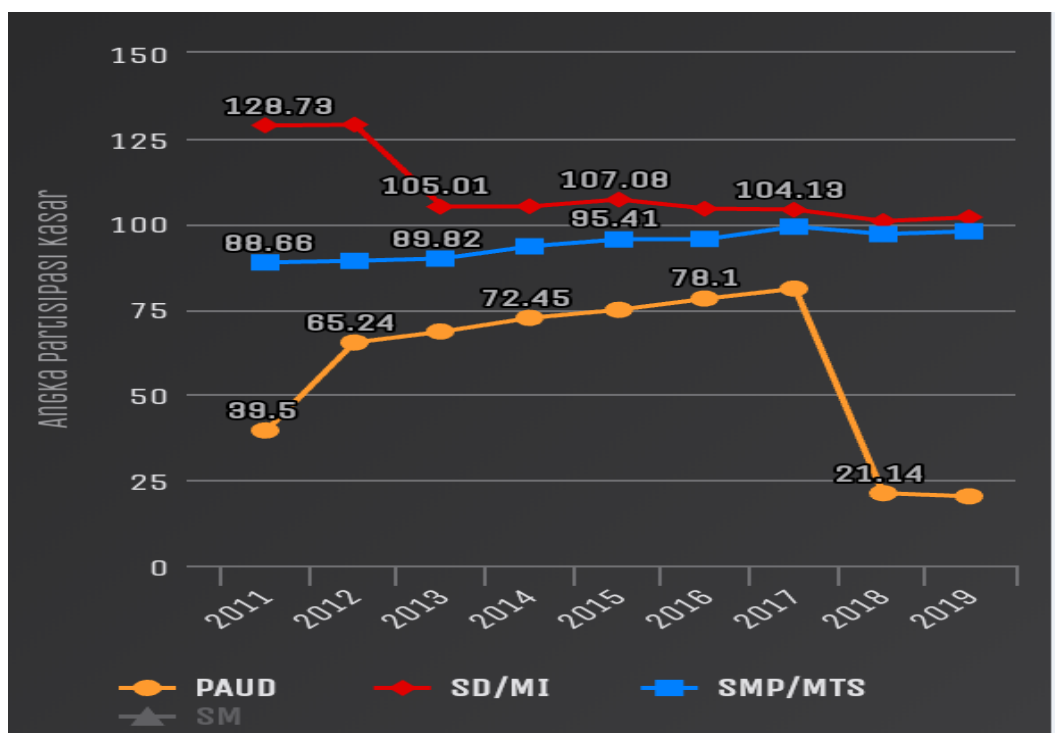
Target utama dalam pembangunan pendidikan adalah angka melek huruf mencapai 100 persen. Capaian Angka Melek Huruf di Kabupaten Cianjur masih (95,79) pada tahun 2019 tidak hanya bisa dilakukan hanya dengan upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih 7,06 tahun pada tahun 2020. Sudah saatnya prioritas pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan pengembangan pendidikan nonformal maupun informal untuk mencapai hasil yang maksimal. Meningkatkan kegiatan belajar masyarakat dan pelatihan/pendidikan non formal bagi warga masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan/keterampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas hidup.



Gambar 4.1. Perbandingan RLS antar wilayah tahun 2015-2018

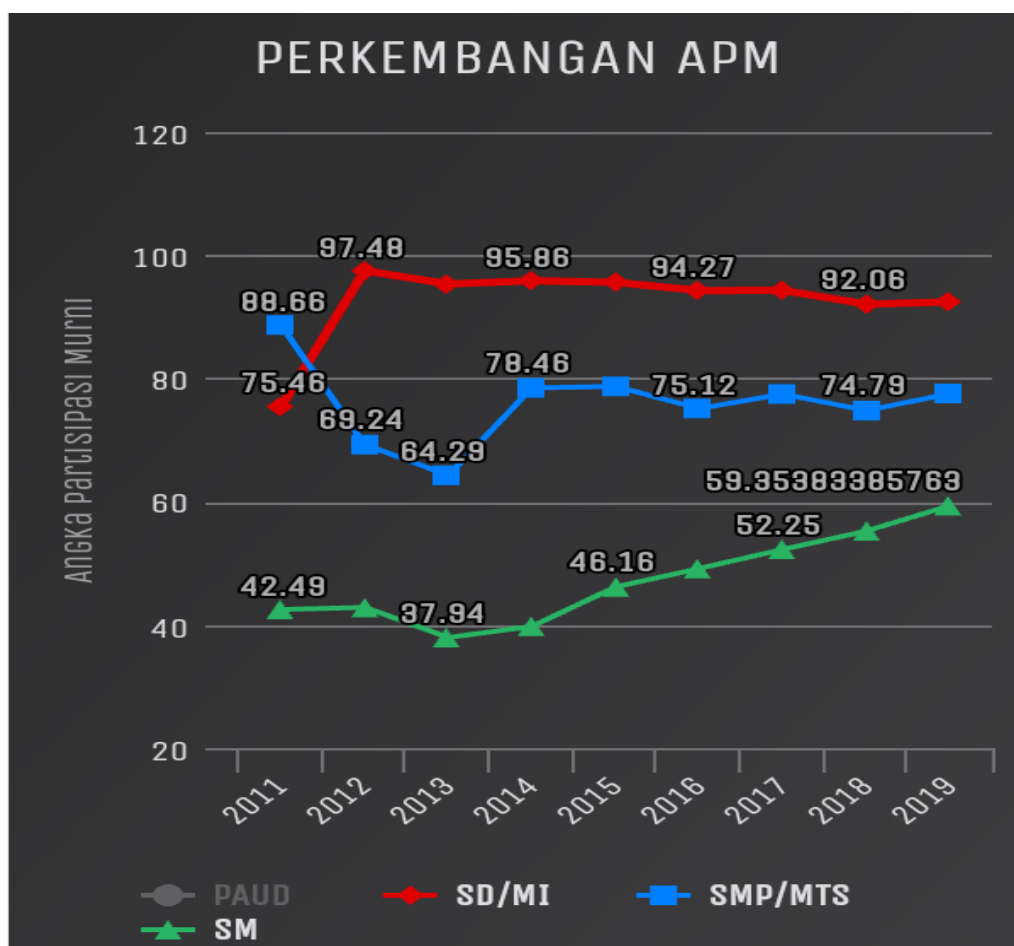
Angka Partisipasi Sekolah (APS) berbeda antara perkotaan dengan perdesaan, dimana APS perkotaan lebih baik dari perdesaan. Demikian

halnya dengan APS Perempuan lebih tinggi dari pada APS Laki-laki. Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) juga masih di bawah 80 persen. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, maka strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin dan juga segmen masyarakat berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 4.2. Perkembangan APK Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2019

Rendahnya APS dan APK juga berkait erat dengan permasalahan sosial, termasuk nilai anak di mata orang tua. Banyak orang tua yang berpendapat bahwa bekerja membantu dan meringankan orang tua dipandang lebih baik daripada sekolah. Anak dianggap sebagai barang investasi atau aktiva ekonomi, yaitu orang tua berharap kelak menerima manfaat ekonomi dari anak. Manfaat ini akan nampak jika anak bekerja tanpa upah di sawah atau usaha milik keluarga atau memberikan sebagian penghasilannya kepada orang tua ataupun membantu keuangan keluarga.



Gambar 4.3. Perkembangan APM Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2019

Kondisi permasalahan memerlukan terpaan kebijakan dan program yang berbeda. Kondisi ini juga mengisyaratkan perlunya penanganan yang lintas sektoral terutama terkait program-program pengentasan kemiskinan sehingga keluarga miskin akan memperoleh kesempatan untuk dapat mendorong anaknya untuk sekolah ketimbang memintanya untuk bekerja. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan akar permasalahan mendasar yang telah menguatkan persepsi nilai anak seperti itu.

Fakta menunjukkan bahwa di wilayah perdesaan lebih banyak anak tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi karena cukup sulit mengakses SMA di wilayah perdesaan. Pada umumnya SMA hanya terdapat di ibukota kecamatan atau ibukota kabupaten sehingga biaya sekolah untuk transportasi dan asrama meningkat bagi siswa dari perdesaan yang ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMA. Sementara itu, untuk partisipasi sekolah pada penduduk usia 19-24, perbedaan antara perdesaan dan perkotaan juga cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pembangunan sekolah menjadi pilihan yang strategis. Perbaikan infrastruktur lainnya seperti akses jalan menuju sekolah perlu terus dilakukan.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi pada penyakit kronis dan

degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degenratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan treatment penyakit tersebut. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayanan prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan. Akan tetapi, dengan memerhatikan diversitas kondisi kesehatan antar daerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi, sekali lagi, tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah.

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya (1) penurunan angka kematian ibu hamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan anak.

Upaya penurunan angka kematian ini dilakukan melalui upaya yang proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai peraturan perundang-undangan dan norma agama. Di samping itu, upaya penurunan angka kematian perlu ditopang oleh prinsip (1) kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri), (2) keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan, (3) pencegahan dan

pengurangan risiko kesakitan dan kematian, serta (4) partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui delapan fokus prioritas. Pertama, peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita melalui beberapa tahapan, antara lain :

- a. peningkatan pelayanan continuum care kesehatan ibu dan anak;
- b. penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan poned dan ponek;
- c. peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih;
2. (d) peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (k1 dan k4);
 - a. peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
 - b. peningkatan cakupan penanganan komplikasi kebidanan pelayanan nifas;
 - c. peningkatan cakupan peserta kb aktif yang dilayani sektor pemerintah;
 - d. pemberian makanan pemulihan pada ibu hamil kek;
 - e. peningkatan cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
 - f. peningkatan cakupan kunjungan bayi;
 - g. peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita;
 - h. perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil;
 - i. pemberian asi eksklusif sampai enam bulan;
 - j. peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak;
 - k. penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader); dan
 - l. perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita.

Kedua, perbaikan status gizi masyarakat dengan meningkatkan:

- (a) asupan zat gizi makro (karbohidrat, protein, dan lemak) dan zat gizi mikro (kapsul Vitamin A, zat besi (Fe), garam beryodium, dan zat gizi mikro lainnya) untuk memenuhi angka kecukupan gizi;
- (b) survailans pangan dan gizi;
- (c) pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang;
- (d) pemberian ASI eksklusif sampai enam bulan;
- (e) pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) mulai dari bayi usia 6–24 bulan dan makanan bagi ibu hamil KEK;
- (f) pemantauan pertumbuhan bayi dengan prioritas usia dua tahun pertama;
- (g) kegiatan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi;
- (h) fortifikasi;
- (i) pemberian makanan pemulihan balita gizi- kurang;
- (j) penanggulangan gizi darurat;
- (k) tatalaksana penanganan gizi burukanak balita (0–59 bulan); dan
- (l) peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi.

Oleh karena itu, kerjasama lintasbidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, agama,

kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat. Program-program pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek dan peningkatan peran atau tanggungjawab kaum pria dalam hal peningkatan kesehatan reproduksi, dapat juga menjadi alternatif program yang strategis.

Pada akhirnya, angka kematian diharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2010-2015 diharapkan akan menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035 menjadi sekitar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup juga meningkat dari 72,62 tahun tahun 2015 menjadi sekitar 74,95 tahun tahun-2035.

Dari sisi ekonomi, terkait dengan kebijakan pendidikan harus dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar kerja. Karena persoalan pemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan penting di Indonesia, maka strategi untuk mengatasi masalah tersebut yang harus menjadi prioritas.

Arah pembangunan ekonomi dapat ditujukan pada beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Perbaikan infrastruktur untuk mendukung perbaikan ekonomi perdesaan, kesehatan dan pendidikan ketrampilan khususnya di wilayah selatan, tengah dan barat daya Kabupaten Cianjur
2. Penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan

ekonomi Pertanian, Pariwisata, Peternakan, Perikanan, Kehutanan dan Perkebunan di wilayah-wilayah strategis;

3. Menyediakan sarana informasi dan fasilitasi pemasaran dalam rangka pengembangan produk – produk unggulan daerah.
4. Peningkatan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kemudahan birokrasi dan jaminan berinvestasi.
5. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan pola pendampingan dalam aspek pemasaran, manajemen, permodalan dan aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha–usaha berbasis ekonomi kerakyatan.
6. Menciptakan ketahanan pangan melalui ketersediaan akses pangan masyarakat yang berkualitas dan beragam Pemenuhan Prasarana dan sarana memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Ketersediaan SDA dan SDM yang besar tanpa didukung oleh ketersediaan Prasarana dan Sarana akan membuat proses pembangunan berjalan kurang optimal (lamban).
7. Prasarana dan sarana yang utama antara lain penyediaan jalan dan jembatan, irigasi dan sarana air bersih, ketersediaannya dapat menunjang kelancaran proses pembangunan secara umum di samping ketersediaan berbagai prasarana dan sarana lainnya seperti telekomunikasi dan transportasi.

4.3. Pembangunan Keluarga

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, kurang sejahtera,



dan kurang berketahanan sosial. Sebagian besar keluarga Indonesia masih belum mampu menjalankan peran dan fungsi keluarga secara optimal, baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Pokok-pokok pembangunan keluarga memuat pokok-pokok kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa; membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari pokok kegiatan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis.

Strategi pembangunan keluarga yang dapat dilakukan adalah:

- a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal.
- b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut: meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.
- c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui: peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.
- d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan Negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan

pendampingan manajemen sumber daya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stress, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga.

4.4. Mobilitas Dan Pesebaran Penduduk

Mobilitas penduduk pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni kebijakan ekonomi makro, kebijakan politik nasional, gaya hidup, dan globalisasi. Sementara itu, secara nasional persebaran penduduk melalui transmigrasi kurang memuaskan. Pengembangan transmigrasi pada saat ini lebih bertumpu pada transmigrasi swakarsa dan kerja sama antar daerah yang didukung oleh kebijakan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru tingkat kecamatan.

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Cianjur adalah masih banyak penduduk yang berangkat ke kota-kota untuk berusaha (migrasi out).

Untuk mengatasi hal tersebut, maka prinsip pokok pembangunan kependudukan pada penataan persebaran dan pengerahan mobilitas diarahkan pada:

1. Pengarahan bagi warga yang migrasi out didorong dan mendukung pembangunan pembangunan daerah asal;
2. Pembangunan pusat pusat perekonomian baru di wilayah kecamatan baik pertanian atau pariwisata baru.
3. Membuka industri baru dengan syarat ramah lingkungan di Kabupaten Cianjur.

Dengan kata lain, kebijakan yang diterapkan harus berkonotasi tidak secara massal mengatur perpindahan penduduk, tetapi lebih pada ‘menjual’ daerah dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Penciptaan lapangan kerja, penjaminan iklim usaha yang kondusif, memberikan informasi potensi daerah secara intensif serta menjamin terciptanya keamanan dan kenyamanan untuk bertempat tinggal.

4.5. Sistem Administrasi Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swasta yang membutuhkan;
- b. Tersusunnya sistem database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat. Strategi yang ditempuh adalah:

- a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah dan masyarakat dan dunia bisnis. Dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006. Pada periode ini juga mulai dikembangkan sistem identifikasi pengenalan tunggal dengan teknologi biometrik. Pendekatan pengembangan dan penerapan, baik sisi fitur teknologi maupun dari sisi implementasi di lapangan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- b. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e- payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
- c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.
- d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- e. Pengembangan sistem yang telah terbangun dengan tujuannya adalah memfasilitasi pengambilan kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan database kependudukan adalah seluruh kabupaten melakukan kegiatan pemutakhiran data. Selanjutnya, melaksanakan penerbitan NIK dan penerapan e-KTP. Yang tidak boleh dilupakan adalah update database kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara regular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e- KTP secara regular juga. Terbangunnya database kependudukan berbasis NIK akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik. Database kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Prinsip mengenai integrasi kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan harus menjadi prioritas, karena hanya dengan menerapkan prinsip tersebut pembangunan kependudukan akan berhasil. Untuk itu strategi pertama yang harus dilakukan adalah melakukan population mainstreaming. Semua kebijakan pembangunan harus dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip people centered development untuk mencapai pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pelaksanannya harus mendasarkan pada pendekatan hak asasi. Untuk itu langkah pertama adalah melakukan capacity building untuk seluruh pemangku kepentingan. Langkah berikutnya adalah melakukan integrasi kebijakan kependudukan dengan kebijakan pembangunan sejak tahap perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi dan monitoring. Kebijakan dan program



kependudukan melibatkan banyak sector, sehingga perlu koordinasi yang baik dari berbagai sector serta perencanaan yang matang dan bersifat integral. Dengan memerhatikan bahwa kondisi dari semua aspek di Indonesia tidak homogen, maka disparitas yang terjadi antarprovinsi, terlebih lagi antarkabupaten/kota, harus menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan strategi. Strategi yang dirumuskan tidak harus bersifat tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan di setiap daerah. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi diperlukan mekanisme yang saling melengkapi antara *bottom-up* dan *top-down* dan harus disinkronisasi dengan RPJMD yang ditetapkan.

Bab V

ROADMAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR 2022-2037

Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun waktu 2022 sampai dengan 2037 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas dengan menimbang dinamika mobilitas penduduk. Oleh karena itu tujuan roadmap ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Berdasarkan fakta dan kondisi eksisting dari data yang telah dianalisis akan diproyeksikan kondisi obyektif Kabupaten Cianjur 25 tahun ke depan atau rencana Cianjur tahun 2045. Rencana tersebut mengacu pada arahan 4 skenario awal pembangunan Kabupaten Cianjur yang telah ditetapkan. Rencana berdasarkan kondisi obyektif Kabupaten Cianjur yang akan diproyeksikan dalam proyeksi jumlah penduduk dengan 3 skenario beserta proyeksi demografi lainnya, seperti

struktur umur, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketenagakerjaan, seperti tenaga kerja per sektor, tingkat partisipasi kerja, pengangguran, dan kesempatan kerja tahun 2045.

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Kependudukan merupakan faktor yang penting sebagai modal dasar pembangunan wilayah. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat dijadikan tolak ukur pembangunan sumber daya manusia, yang berimbas pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan yang tinggi dengan disertai oleh peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara tidak langsung dapat berperan pada penciptaan barang dan jasa dalam kegiatan produksi. Di sisi lain kependudukan juga berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan angka kemiskinan, yang dalam hal ini pemerintah daerah setempat dituntut untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagai modal dasar pembangunan yang sifatnya ekstrinsik (tidak nampak), SDM memiliki kecenderungan dapat berubah, artinya kuantitas maupun kualitas penduduk di suatu daerah dapat mengalami penurunan maupun peningkatan, hal ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah di bidang kependudukan ataupun faktor lain yang berasal dari luar daerah seperti kebijakan pemerintah provinsi dan nasional.

Jika dihubungkan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Cianjur diproyeksikan dalam jangka

panjang 25 tahun ke depan rata-rata berada di atas LPE, yaitu LPE di atas 7.23 persen sedangkan LPP sekitar 0,9 - 1,1 persen. Hal ini merupakan indikator tingkat kesejahteraan yang relatif cukup tinggi ke depan selama tahun 2020-2045 khususnya bagi Kabupaten Cianjur, yang berarti juga mempunyai implikasi terhadap tingginya produktivitas penduduk. Aspek ini akan berimplikasi dan berperan dalam produksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian yang dicerminkan oleh tingginya tingkat *output*. Nilai ini akan berkorelasi dengan tingkat pendapatan regional yang pada akhirnya akan berimbas pada naiknya pendapatan per kapita yang diperoleh tiap-tiap penduduk di Kabupaten Cianjur. Kondisi tersebut secara umum juga menunjukkan bahwa laju produksi barang dan jasa oleh masyarakat melampaui laju peningkatan kebutuhannya yang paralel dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, secara umum bisa disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Cianjur selama periode tersebut mampu memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

Tabel 5. 1 Perbandingan LPE dan LPP Kabupaten Cianjur Tahun 2019 2035

Tahun	LPE	LPP
2020	5.67	1.29
2025	6.25	1.19
2030	6.40	1.12
2045	7.20	1,05
Rata-rata	6.5	1.15

Sumber : estimasi hasil pengolahan

Dalam menyusun skenario pertumbuhan penduduk dapat dibagi ke dalam 3 skenario, yaitu skenario pertumbuhan penduduk sedang, rendah, dan

seimbang. Jumlah penduduk Kabupaten Cianjur pada akhir tahun 2025 secara umum terus mengalami peningkatan. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 1,8 - 2,2 persen diproyeksikan jumlah penduduk selama 2020-2045 akan terus meningkat.

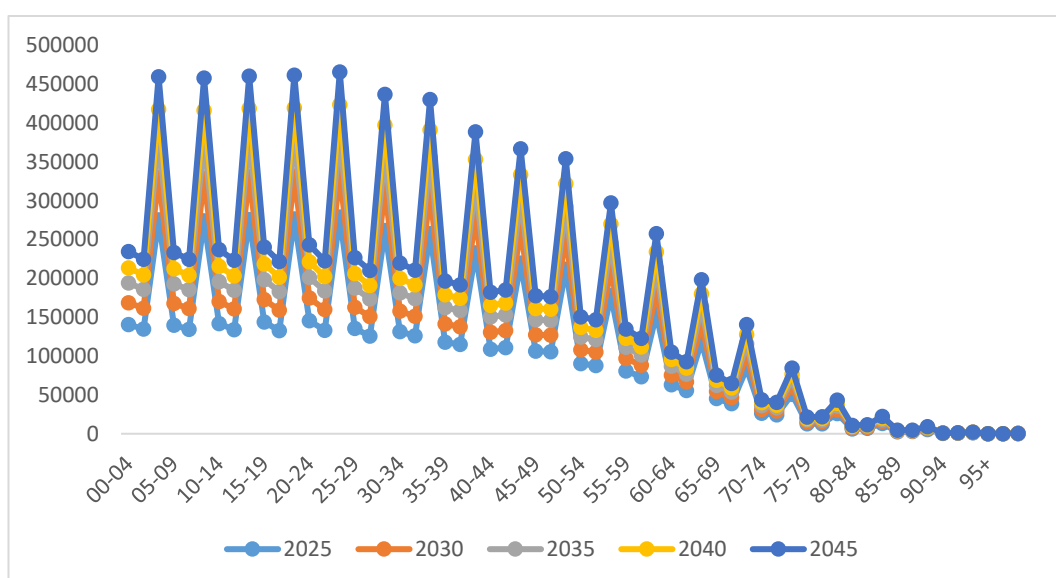
Dengan laju pertumbuhan di atas, pada akhir tahun 2045 penduduk Kabupaten Cianjur diperkirakan akan > 4 juta jiwa, hal ini mengindikasikan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sama dengan jumlah penduduk pada kriteria yang dimiliki suatu kota dengan tingkat persebaran penduduk di Kabupaten Cianjur juga belum merata dengan rata-rata persebaran per kecamatan yang masih kecil, yaitu sebesar 3,13 persen.

Jika dilihat dari struktur penduduk menurut usia seperti pada **tabel 5.2** dan **grafik 5.1** berikut ini terlihat bahwa rata-rata selama 25 tahun ke depan dapat dikatakan struktur penduduk di Kabupaten Cianjur sebagian besar termasuk kelompok penduduk usia muda yang mengindikasikan jumlah penduduk produktif yang cukup besar yang terkonsentrasi pada penduduk usia muda yang juga mengindikasikan tingginya angka *dependency ratio* yang disebabkan proporsi penduduk yang masuk ke dalam usia kerja produktif (15-64 tahun) memiliki persentase lebih besar daripada proporsi penduduk non usia kerja (tidak produktif) dan mengindikasikan tingkat kemajuan suatu daerah.

Tabel 5.2 Proyeksi Penduduk dalam Usia Kabupaten Cianjur 2020-2025

UMUR	Penduduk Tahun 2020			Proyeksi Tahun 2035		
	WANITA	LAKI-LAKI	JUMLAH	WANITA	LAKI-LAKI	JUMLAH
0-4	108.953	104.347	213.300	234.689	224.768	459.457
5-9	108.298	104.225	212.523	233.278	224.505	457.783
10-14	110.011	103.780	213.791	236.968	223.546	460.515
15-19	111.476	102.880	214.356	240.124	221.608	461.732
20-24	112.938	103.335	216.273	243.273	222.588	465.861
25-29	105.264	97.547	202.811	226.743	210.120	436.863
30-34	101.993	97.810	199.803	219.697	210.687	430.384
35-39	91.316	89.052	180.368	196.698	191.822	388.520
40-44	84.488	85.844	170.332	181.991	184.912	366.902
45-49	82.403	81.926	164.329	177.500	176.472	353.972
50-54	69.902	68.044	137.946	150.572	146.570	297.141
55-59	62.640	56.969	119.609	134.929	122.714	257.643
60-64	48.859	43.090	91.949	105.244	92.818	198.062
65-69	35.067	30.103	65.170	75.536	64.843	140.379
70-74	20.393	18.802	39.195	43.927	40.500	84.428
75+	19.690	22.104	41.794	37.603	39.522	77.125
Jumlah	1.271.458	1.206.102	2.477.560	2.489.794	2.361.813	4.851.608

Terkait tentang jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur, ternyata realitas jumlah penduduk masih di bawah proyeksi artinya pertumbuhan terus menurun. Dari perkiraan angka LPP di atas 1,85 tapi hasil sensus 2010 (yang terakhir) LPP kabupaten Cianjur 2,46 artinya secara realitas pertumbuhan penduduk Kabupaten Cianjur tidaklah menunjukkan ledakan penduduk atau penambahan yang besar per tahunnya.



Gambar 5.1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 2025-2045

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini pemerintah mampu mengatasi permasalahan kependudukan terutama keberhasilan program KB. Sejalan dengan otonomi daerah, maka upaya pengembangan pembangunan berwawasan kependudukan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan pilihan yang paling tepat.

Searah dengan kondisi ini diharapkan terus berupaya menurunkan TFR,

LPP dan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stabil sehingga Kabupaten Cianjur bisa lebih dulu mencapai arah yang sama dengan kebijakan Pemerintahan Pusat.

Kabupaten Cianjur cukup mendekati untuk mencapai bonus demografi. Cianjur mulai pada tahun 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 *dependency* rasionya adalah 0,67. 0,68. 0,62. 0,57. 0,47. 0,46. Bonus demografi ini merupakan jendela peluang (*window of opportunity*) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi ini diperkirakan akan terjadi hanya sekali dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar lima tahun, dari tahun 2030-2035 berdasarkan proyeksi penduduk angka kelahiran dapat dikendalikan. Pencapaian tahap ini sangat tergantung kepada pengelolaan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran. Jika angka kelahiran meningkat, maka tahap tersebut akan tertunda atau bahkan hilang sama

Tabel 5.4 Roadmap Kondisi Kuantitas Kependudukan Yang Diinginkan

Roadmap 2011-2015	Roadmap 2011-2015	Roadmap 2021-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035
Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang	Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang	Bertahannya kondisi penduduk tumbuh seimbang sebagai prasyarat penduduk tanpa pertumbuhan (PTP)

Asumsi TFR pada periode proyeksi untuk tahun, 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030, 2030-2035 berturut-turut adalah TFR=2,4, TFR=2,38, TFR=2,30, TFR=2,26 dan TFR=2,20.

Tabel 5.5 Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2037

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2010-2035				
	2015	2020	2025	2030	2035
Laju Pertumbuhan Penduduk(Persen)	0,53	0,46	0,39	0,37	0,35
Total FertilityRate	2,46	2,38	2,30	2,26	2,20
Contraceptive Prevalence rate	69,40	68,21	68,40	71,00	72,00
Usia Kawin Pertama Bagi Wanita	17,87	18,10	18,90	19,60	20,50

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat social, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52

Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Tabel 5.6 Roadmap Kondisi Kualitas Penduduk yang Diinginkan

Roadmap 2011-2015	Roadmap 2011-2015	Roadmap 2021-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035
Pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas terciptanya good governance	Peningkatan kualitas penduduk kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kerja produktif di semua sektor	Terwujudnya kualitas penduduk yang bertakwa, maju, mandiri, sejahtera, kreatif dan inovatif di berbagai sektor

Tabel 5.7 di bawah adalah target rata-rata lama bersekolah untuk jangka waktu lima tahunan secara nasional. Skenario rendah yang menggunakan model asimtot 11,3 tahun berdasarkan asumsi rata-rata lama bersekolah negara-negara *very high developed* saat ini adalah sebesar 11,3 tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 12,6 tahun berdasarkan asumsi maksimal rata-rata lama bersekolah adalah sebesar 12,6 tahun dan skenario tinggi menggunakan model tanpa asimtot.

Tabel 5.7 Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS) Kabupaten Cianjur

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2015	5,76	6,24	6,78
2020	6,83	6,97	7,09
2025	8,89	9,30	10,30
2030	10,39	10,95	11,60
2035	11,80	12,00	12,00

Mengacu kepada perkiraan capaian secara nasional, skenario rendah dengan asintot APM SMA adalah 100 persen. Skenario sedang dengan asintot APM SMA adalah 100 persen dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 1,5 persen per tahun dan skenario tinggi tanpa asintot.

Tabel 5.8. Scenario Asintot APM

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2015	51,1	53,7	50,7
2020	56,2	60,7	56,6
2025	60,7	66,6	63,1
2030	64,8	71,7	70,4
2035	68,4	76,0	78,5

Sesuai acuan nasional, skenario rendah menggunakan model asimtot 80 tahun berdasarkan asumsi dari AHH negara-negara *very high developed* saat ini adalah sebesar 80 tahun.

Tabel 5.9. Perkiraan Angka Harapan Hidup 2015-2035

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2015	71,07	72,23	72,62
2020	70,1	70,3	74,2
2025	70,5	70,8	77,0
2030	70,8	71,3	80,0
2035	71,1	71,7	83,0

5.3. GNI per Kapita (Purchasing Power Parity/PPP)

Skenario rendah menggunakan model asimtot 10.000 berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP\$ rata-rata dunia saat ini adalah sebesar 10.000 per kapita PPP\$ (HDR 2011). Skenario sedang menggunakan model asimtot 12.000 tahun berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP\$ negara Eropa dan Asia Tengah saat ini adalah sebesar 12.000 per kapita PPP\$ (HDR 2011). Skenario tinggi menggunakan tren (model tanpa asimtot).

Tabel 5. 10. Perkiraan GNI per Kapita Indonesia 2011-2035

Tahun	Skenario		
	Rendah	Sedang	Tinggi
2015	4.494	4.741	4.241
2020	5.332	5.846	5.002
2025	6.042	6.783	5.900
2030	6.645	7.577	6,959
2035	7.155	8.250	8.209

Tabel 5. 11 Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Cianjur 2010-2035

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2010-2035					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Pendidikan						
• Lama Sekolah	6,7	6,2	6,97	8,6	12,8	13,0
• Angka partisipasi Murni	11,6	13,5	16,4	20,2	24,1	27,6
Kesehatan						
• Angka Kematian Bayi (per1000 lahirhidup)	25,80	23,90	20,70	18,70	16,80	14,90
• Angka Kematian Ibu (per100000 lahirhidup)	21	27	22	20	18	17
• Angka Harapan Hidup	68,10	69,15	70,13	72,60	73,50	74,40

5.4. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan dinamis yang siap menghadapi perubahan-perubahan

yang sangat cepat di era milenial. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Pembangunan keluarga dimulai sejak anak usia sekolah untuk mempersiapkan usia perkawinan yang matang, pembekalan mental spiritual dan mempersiapkan perencanaan ekonomi yang akan dibangun dengan perencanaan jumlah anggota keluarga yang ideal.

Adapun kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel 5.12

Tabel 5.12 Roadmap Pembangunan Keluarga

Roadmap 2011-2015	Roadmap 2011-2015	Roadmap 2021-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035
Terwujudnya kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Peningkatan dan perbaikan kondisi keluarga berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terwujudnya kondisi keluarga yang berkualitas dengan ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, agamis dengan jumlah anak ideal (2) dalam keharmonisan, adil dan berkesetaraan gender	Peningkatan kondisi keluarga yang berkualitas dengan ciri sejahtera, sehat, maju, mandiri, agamis dengan jumlah anak ideal (2) dalam keharmonisan, adil dan berkesetaraan gender	Terwujudnya keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, berkualitas, berkeadilan dan berkesetaraan gender serta berdaya saing

Tabel 5. 13 Parameter Pembangunan Keluarga Tahun 2010-2035

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2010-2035					
	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Persentasi Penduduk Miskin	12,34	11,12	10,36	9,54	8,58	7,20
Rata-rata banyaknya Anak dalam keluarga	3,62	3,43	3,10	3,00	2,12	2,00
Persentasi Keluarga Prasejahtera	6,00	3,5	2,10	2,00	1,72	1,61
Indeks Pembangunan Gender	70	71	75	76	78	79

5.5. Pengarahan Mobilitas Penduduk

Aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata di setiap kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali. Demikian halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke kota yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya.

Namun demikian upaya pemerataan harus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan fasilitas kesehatan. Sumber ekonomi yang dibangun di wilayah kosong adalah meningkatkan kapasitas hidrologis

wilayah. Kondisi ini terdapat di Kecamatan Pasirkuda, Pagelaran, Tanggeung, leles, Cikadu, Agrabinta, Naringgul, Kadupandak dan Cidaun.

Tabel 5.14 Roadmap Kondisi Penataan Persebaran dan Mobilitas Kependudukan Yang Diinginkan Kabupaten Cianjur 2011-2035

Roadmap 2011-2015	Roadmap 2011-2015	Roadmap 2021-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035
Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah kecamatan	Penataan dan penyebaran penduduk antar daerah kecamatan sesuai dengan potensi, data dukung social dan lingkungannya.	Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan kecamatan	Peningkatan penyediaan berbagai fasilitas social, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai kecamatan pengembangn kota baru.	Terwujudnya persebaran penduduk yang lebih merata antar daerah kecamatan sehingga konsentrasi penduduk terkendali dan harmonis.

Tabel 5.15. Road Map Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur

NO.	KECAMATAN	KUANTITAS PENDUDUK	KUALITAS PENDUDUK	MOBILITAS	PEMBANGUNAN KELUARGA
1	Kecamatan Agrabinta	favor	warning	favor	urgent
2	Kecamatan Leles	favor	warning	favor	warning
3	Kecamatan Sindanagbarang	favor	attention	favor	attention
4	Kecamatan Cidaun	favor	warning	favor	urgent
5	Kecamatan Naringgul	favor	attention	favor	warning
6	Kecamatan Cibinong	favor	attention	favor	Attention
7	Kecamatan Cikadu	favor	urgent	favor	warning
8	Kecamatan Tanggeung	favor	urgent	favor	Attention
9	Kecamatan Pasirkuda	favor	attention	favor	urgent
10	Kecamatan Kadupandak	favor	attention	favor	urgent
11	Kecamatan Cijati	favor	attention	favor	Favor
12	Kecamatan Takokak	favor	attention	favor	Attention
13	Kecamatan Sukanegara	favor	attention	favor	Favor
14	Kecamatan Pagelaran	favor	warning	favor	urgent
15	Kecamatan Campaka	favor	attention	favor	Favor
16	Kecamatan Campakamulya	favor	attention	favor	Favor
17	Kecamatan Cibeber	favor	attention	favor	Favor

NO.	KECAMATAN	KUANTITAS PENDUDUK	KUALITAS PENDUDUK	MOBILITAS	PEMBANGUNAN KELUARGA
18	Kecamatan Warungkondang	favor	urgent	favor	attention
19	Kecamatan Gekbrong	favor	attention	favor	Favor
20	Kecamatan Cilaku	favor	attention	favor	Favor
21	Kecamatan Sukaluyu	favor	attention	favor	Favor
22	Kecamatan Bojongpicung	favor	attention	favor	Favor
23	Kecamatan Haurwangi	attention	attention	favor	Favor
24	Kecamatan Ciranjang	urgent	attention	favor	Favor
25	Kecamatan Mande	favor	attention	favor	Favor
26	Kecamatan Karangtengah	favor	attention	favor	Favor
27	Kecamatan Cianjur	warning	warning	favor	Attention
28	Kecamatan Cugenang	favor	attention	favor	Favor
29	Kecamatan Pacet	urgent	urgent	favor	Favor
30	Kecamatan Cipanas	warning	Favor	favor	Favor
31	Kecamatan Sukaresmi	favor	attention	favor	Attention
32	Cikalongkulon	favor	attention	favor	Attention

Keterangan :

- urgent = kepentingan mendesak
- warning = kepentingan serius
- attention=kepentingan perhatian
- favor=kepetingan perlu

Tabel 5.16. Road Map Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur

NO.	KECAMATAN	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2045
1	Kecamatan Agrabinta	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
2	Kecamatan Leles	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
3	Kecamatan Sindanagbarang	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
4	Kecamatan Cidaun	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
5	Kecamatan Naringgul	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
6	Kecamatan Cibinong	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
7	Kecamatan Cikadu	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
8	Kecamatan Tanggeung	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga

NO.	KECAMATAN	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2045
9	Kecamatan Pasirkuda	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
10	Kecamatan Kadupandak	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
11	Kecamatan Cijati	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
12	Kecamatan Takokak	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
13	Kecamatan Sukanegara	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
14	Kecamatan Pagelaran	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
15	Kecamatan Campaka	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
16	Kecamatan Campakamulya	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
17	Kecamatan Cibeber	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga

NO.	KECAMATAN	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2045
18	Kecamatan Warungkondang	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
19	Kecamatan Gekbrong	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
20	Kecamatan Cilaku	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
21	Kecamatan Sukaluyu	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
22	Kecamatan Bojongpicung	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
23	Kecamatan Haurwangi	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
24	Kecamatan Ciranjang	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
25	Kecamatan Mande	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
26	Kecamatan Karangtengah	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga

NO.	KECAMATAN	2020-2025	2025-2030	2030-2035	2035-2045
27	Kecamatan Cianjur	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
28	Kecamatan Cugenang	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
29	Kecamatan Pacet	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
30	Kecamatan Cipanas	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
31	Kecamatan Sukaresmi	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga
32	Kecamatan Cikalongkulon	kualitas dan pembangunan Keluarga	kualitas dan pembangunan Keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga	Pengendalian, kualitas dan pembangunan keluarga

5.6. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi empat periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses

Adapun pentahapannya dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 5.17 Roadmap Pembangunan Database Kependudukan

Roadmap 2011-2015	Roadmap 2011-2015	Roadmap 2021-2025	Roadmap 2026-2030	Roadmap 2031-2035
Terciptanya tertib administrasi kependudukan	Terwujudnya pelayanan prima administrasi kependudukan.	Terwujudnya kondisi masyarakat berbasis database dn informasi kependudukan	Terwujudnya integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber dalam suatu data base dan bisa diakses masyarakat	Terwujudnya pendayagunaan data dan infromasi kependudukan sebagai system pendukung keputusan (DSS)

Tabel 5.18. Kondisi Yang Diinginkan Akhir Roadmap Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Database Kependudukan Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2037

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2022-2037					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Indikator Kualitatif						
Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep						
Government to Government (G2G), layanan masyarakat atau dikenal dengan istilah Government to Citizen (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2006. Pada periode ini juga mulai dikembangkan sistem identifikasi pengenalan tunggal dengan teknologi biometrik						
Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.						

Indikator/Parameter	Periode Roadmap 2022-2037					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.						
Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.						
Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan						
Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambilan kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat						
Indikator Kuantitatif						
Persentase penduduk dapat menunjukkan catatan sipil berupa akte kelahiran	50	60	65	70	80	90
Persentase penduduk menguasai akses database	10	20	30	40	50	60

5.7. Implikasi Kebijakan

Permasalahan kependudukan merupakan permasalahan wajib yang harus menjadi prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah di Kabupaten Cianjur. Selain itu, menjadi penting peranan pengeluaran pemerintah perkapita urusan kesehatan, hal lain yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor indikator pembangunan di Kabupaten Cianjur. Suatu kebijakan diperlukan pembangunan kependudukan yang ditujukan untuk lebih meningkatkan peranan faktor-faktor yang terkait didalamnya dengan harapan akan dapat memberikan solusi. Kebijakan yang dapat ditetapkan antara lain adalah sebagai berikut.

5.8. Kebijakan Pembiayaan

Peningkatan indikator pembangunan kependudukan secara kontekstual merupakan upaya secara bertahap dapat menjadi prioritas, dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk serta administrasinya. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan pemenuhan pembiayaan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai baik di tingkat kabupaten/kota, dan juga provinsi. Peningkatan pembiayaan untuk pembangunan sarana dan prasarana merupakan motor ini dapat memperbesar keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan serta keluarga berencana dan lembaga institusi masyarakat yang diharapkan mampu menghasilkan masyarakat

yang berkualitas, yang pada akhirnya menuju penduduk yang seimbang di wilayah tersebut.

Koordinasi dengan lintas sektor yang berkaitan dengan tata kota, pembangunan jalan, penyedia perumahan, atau penyedia air bersih, pendidikan dan kesehatan dan yang lainnya; perlu terus ditingkatkan untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan kependudukan. Sebagai contoh, infrastruktur di kebanyakan kab/kota di Provinsi Jawa Barat terutama jalan-jalan di pedesaan masih banyak yang kondisinya rusak sehingga menghambat kelancaran akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini mengakibatkan terlambat ditanganinya persalinan yang beresiko yang bisa menyebabkan kematian bayi. Hal ini diperlukan peran berbagai pihak demi kelancaran transportasi untuk akses pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Agar pembiayaan ini mampu mengatasi masalah yang ada, maka harus dimulai dengan perencanaan yang tepat sasaran, memiliki target yang jelas dan terukur, tidak *‘tumpang tindih’*, serta menerapkan sistem pengendalian dan pengawasan yang memadai.

5.9. Perluasan Akses Pelayanan Kesehatan

Akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau perlu diterapkan beberapa prioritas kebijakan, baik pengembangan dari kebijakan yang sudah ada maupun penerapan kebijakan baru. Perluasan akses pelayanan kesehatan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa perluasan akses dapat

dilakukan melalui keterjangkauan dari segi biaya, kecukupan pengetahuan, maupun keterjangkauan dari segi jarak tempuh ke fasilitas kesehatan.

Guna meningkatkan keterjangkauan dari segi biaya, hendaknya pemerintah melakukan pembebasan retribusi terhadap fasilitas kesehatan yang kemudian diikuti dengan jaminan kesehatan yang lebih baik dan meluas, terutama untuk masyarakat kurang mampu yang menggunakan fasilitas kesehatan. Peningkatan pengetahuan masyarakat juga antara lain dapat diupayakan melalui bantuan para kader kesehatan.

Oleh karena itu diperlukan penerapan suatu kebijakan untuk memantapkan upaya revitalisasi Posyandu melalui pemberian penghargaan berupa insentif bagi para kader kesehatan. Kemudian, karena wilayah Kabupaten Cianjur luas dan memiliki kondisi geografis beragam, maka diperlukan upaya prioritas pada daerah-daerah yang memiliki persebaran penduduk yang cukup tinggi, dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dan pemerataan persebaran tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Pada wilayah dengan geografis yang sulit, perlu upaya yang serius untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

5.10. Peningkatan Pendidikan Perempuan

Mengingat pentingnya peran ibu dalam kelangsungan hidup bayi, dan sebagai ujung tombak pembangunan keluarga, diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur yang lebih berpihak pada perempuan. Misalnya,

memberikan akses yang lebih mudah pada penduduk perempuan untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, memprioritaskan beasiswa pada penduduk perempuan, memperbanyak muatan kurikulum yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah yang dalam penerapannya melibatkan tenaga kesehatan, dan mengaktifkan kembali kegiatan penyuluhan oleh tenaga kesehatan terutama kepada perempuan usia reproduksi.

5.11. Kebijakan Keluarga Berencana Sebagai Basis Pembangunan Keluarga

Desentralisasi merupakan proses transfer otoritas dan kewenangan perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan dari pengendali organisasi di tingkat atas kepada tingkat yang ada di bawahnya. Pentingnya pelaksanaan desentralisasi program KB selain sebagai manifestasi responsibilitas/daya tanggap atas perubahan lingkungan strategis (arus demokratisasi dan HAM serta delegasi kewenangan pemerintahan dalam beberapa bidang), juga sangat penting dalam rangka:

1. mendekatkan pelayanan publik kepada pengguna layanan publik, yaitu warga negara sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan program KB yang bukan hanya sesuai dengan prosedur medis dan operasional lainnya tetapi juga kualitas pelayanan sebagaimana yang dikehendaki publik melalui penciptaan mekanisme dialog/interaksi antara *public servant* dengan *citizen*;

2. pemeratakan (distribusi) pelayanan program KB sehingga dapat memperkecil kesenjangan akses publik yang berada di daerah tertentu dengan daerah lainnya;
3. memungkinkan diakomodirnya strategi dan cara-cara tertentu dalam operasionalisasi program KB, terutama penggerakkan dalam upaya menciptakan demand terhadap program KB, yang disesuaikan dengan kondisi kesejarahan, kultur, dan geografis setempat;
4. memungkinkan penyelenggaraan program KB yang inklusif dan melibatkan banyak aktor (sektor) sehingga lebih prospektif dalam pencapaian sasaran bersama serta menjadi terintegrasinya program KB dengan program pembangunan lainnya di daerah;
5. efisiensi dalam pendanaan karena operasionalisasi program disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal (*bottom-up*) karena berbasis data peserta KB;
6. memperpendek alur birokrasi sehingga mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan dan mempermudah dalam manajemen supervisi dan informasi dibantu adanya lembaga-lembaga dan pranata sosial.

Bab VI

ROADMAP KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIANJUR 2022-2037

6.1. Pendahuluan

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Cianjur disusun untuk mengatur populasi penduduk sesuai dengan kemampuan wilayah dalam membangunnya agar seluruh penduduk dapat menjadi pelaku sekaligus menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemampuan suatu wilayah dalam mencukupi kebutuhan masyarakatnya sangat kompleks, antara lain infrastruktur yang mampu memberikan aksesibilitas dan komunikasi antar warga masyarakat sehingga ekonomi, pendidikan dan kesehatan berjalan dengan efektif dan efisien, produksi pertanian yang mampu mencukupi kebutuhan pangan dan kegiatan ekonomi produktif. Demikian juga pemerintah diharapkan mampu memberikan jaminan kegiatan ekonomi bagi masyarakatnya, pendidikan yang dapat dijangkau dan aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan. Faktor lain adalah kemampuan wilayah dalam menjamin keamanan, kenyamanan, kebersihan lingkungan, rumah tinggal, pangan



yang layak sehingga daerah dapat menciptakan kesejahteraan sosial bagi penduduknya.

Problem utama dalam pembangunan kependudukan adalah bagaimana pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, pembangunan sistem data dan informasi kependudukan. Pengendalian dimaksud adalah pembangunan kependudukan yang dapat memenuhi aspek penting penduduk seperti kecukupan pangan, keamanan dan kesehatan penduduk serta pendidikan. Agar penduduk pada tahun-tahun yang akan datang dapat dikendalikan bersamaan dengan program pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cianjur maka perlu disusun sebuah *roadmap* kependudukan.

Roadmap ini disusun dalam lima tahunan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun demi tahun. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk membaca capaian dan menganalisis apa yang perlu dilakukan pada tahapan berikutnya. Ilustrasi ini membutuhkan analisis matriks kontekstual untuk menganalisis setiap problem kependudukan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Cianjur pada saat ini.

Analisis matriks kontekstual merupakan bagian dari analisis kualitatif yang mendeskripsikan setiap kasus dalam suatu problem yang menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan yang akan disusun. Oleh karena itu dalam analisis ini diperlukan data-data valid untuk menggambarkan kondisi obyektif dari suatu kasus yang diisukan. Analisis kondisi disusun berdasarkan fenomena kondisi obyektif

yang diangkat untuk menggambarkan kondisi ideal. Apabila kondisi ideal telah disusun maka langkah berikutnya adalah mencari solusi yang tepat.

Solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan kependudukan memerlukan sumberdaya yang kuat untuk menyelesaikannya melalui perencanaan program sinergitas multi pihak. Anggaran pembangunan kependudukan disusun secara rapih dengan mengarusutamakan kebutuhan utama persoalan kependudukan, kemudian problem sekunder dan tersiernya dapat diselesaikan dengan membangun sinergitas antar *stake holder* kependudukan seperti bidang ekonomi termasuk pertanian, kesehatan, data dan informasi serta pendidikan.

Grand design pembangunan kependudukan ini mencakup kurun waktu 2022 sampai dengan 2037. Pada setiap periode lima tahun dari tahun 2022 akan dibuat peta arah (*Road Map*) untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas, mortalitas maupun persebaran. Seiring dengan pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah dapat mengukur indikator pemerataan dan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan kualitas penduduknya seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, ekonomi dan ketenagakerjaan serta pembangunan berwawasan lingkungan hidup. Dengan demikian tujuan dari *road map* ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana yang dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode. Atas sistematika tersebut maka kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan dalam pembangunan kependudukan menjadi lebih baik.

Pembangunan juga harus senantiasa memperhatikan empat isu strategis global dan nasional yang menjadi perhatian pemerintah dalam mengelola urusan publik. Kondisi strategis faktual yang dapat dijadikan acuan bertindak setiap aktor yang memiliki kepentingan terhadap suatu permasalahan atau isu publik dapat memutuskan untuk terlibat dalam pembuatan dan proses kebijakan. Keempat isu strategis tersebut adalah:

1. demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),
2. desentralisasi,
3. transisi demografis dan pengentasan kemiskinan, dan
4. kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Keempat isu strategis tersebut harus direspons sebagai bagian dari daya tanggap (*responsiveness*) pengelola kependudukan atas perubahan lingkungan strategis dalam mengelola urusan publik yang berhubungan dengan program pengendalian penduduk. Terkait isu strategis transisi demografis dan pengentasan kemiskinan serta kerusakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan adalah dampak pembangunan kependudukan yang telah dilakukan sebelumnya.

Prinsip dasar menjalankan *roadmap* kependudukan adalah *democratic-citizenship*. Prinsip tersebut tercermin dalam dua hal, yaitu :

1. Pembangunan akan memandang publik (pihak yang dilayani) sebagai *citizen* (warga negara) dengan segala hak dan kewajibannya.
2. Penduduk dan elemen masyarakat lain (termasuk *civil society* dan *privat sector*) yang memiliki kepentingan dengan urusan publik untuk berpartisipasi dalam

mengelola kependudukan secara sinergis dapat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kualitas pelayanan publik (yang mengetahui persis masalah yang menyangkut kepentingan publik adalah publik itu sendiri). Salah satu mekanisme yang inklusif dan partisipatoris tersebut dapat dilakukan dengan melakukan desentralisasi kepada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil dalam lingkup daerah (Norton, 1994, dalam Muluk, 2008).

Desentralisasi merupakan proses transfer otoritas dan kewenangan perencanaan, manajemen, dan pengambilan keputusan dari pengendali organisasi di tingkat atas kepada tingkat yang ada di bawahnya (Saltman, dalam Wilopo, 2007). Pentingnya pelaksanaan desentralisasi program kependudukan adalah meningkatkan responsibilitas/daya tanggap atas perubahan lingkungan penduduk untuk mendapatkan hak dasarnya seperti pangan, kesehatan, keamanan, jaminan akses pendidikan dan lain-lain.

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sudah diundangkan sejak sepuluh tahun lalu. Namun demikian, peraturan pendukung pelaksanaannya belum juga hadir. Akibatnya, pelaksanaan program terhambat di sana-sini. Padahal, seperangkat aturan pendukung tersebut sejatinya sudah ada selambatnya satu tahun setelah Undang-Undang diterbitkan. Merujuk pada substansi undang-undang tersebut, peraturan perundangan itu meliputi peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan menteri (Permen) atau peraturan kepala Lembaga Pemerintahan Nonkementerian, peraturan daerah (Perda) provinsi, dan Perda

kabupaten atau kota. Dari sederet peraturan yang disyaratkan, sampai saat ini baru terbit satu Perpres Nomor 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Perpres tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72, 82, dan 92.

Padahal, UU 52/2009 secara tegas memberi perintah kepada pemerintah daerah untuk mengambil peran yang strategis dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Salah satu poin penting dalam perintah tersebut antara lain pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) yang ikut bertanggung jawab bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam program kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pada kajian komprehensif ini, disajikan beberapa bidang yang secara umum pemerintah daerah berkewajiban mengurus bidang-bidang di bawah ini.

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan Dan Catatan Sipil;

- 
11. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 12. Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera;
 13. Sosial;
 14. Ketenagakerjaan Dan Ketrasmigrasian;
 15. Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
 16. Penanaman Modal;
 17. Kebudayaan Dan Pariwisata;
 18. Kepemudaan Dan Olah Raga;
 19. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri;
 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian;
 21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 22. Statistik;
 23. Kearsipan;
 24. Perpustakaan;
 25. Komunikasi Dan Informatika;
 26. Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
 27. Kehutanan;
 28. Energi Dan Sumber Daya Mineral;
 29. Kelautan Dan Perikanan;
 30. Perdagangan; Dan
 31. Perindustrian.

Dari 31 urusan tersebut, Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 menentukan urusan wajib. Yakni, urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib tersebut terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Pekerjaan Umum;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perumahan;
8. Kepemudaan Dan Olahraga;
9. Penanaman Modal;
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. Ketenagakerjaan;
13. Ketahanan Pangan;
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
16. Perhubungan;
17. Komunikasi dan Informatika;
18. Pertanian;

- 
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;
 21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 22. Sosial;
 23. Kebudayaan;
 24. Statistik;
 25. Kearsipan; Dan
 26. Perpustakaan.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat bagi pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah, bahwa setiap daerah harus menjalankan sebagai berikut :

1. Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan
2. Perencanaan, Pemanfaatan, Dan Pengawasan Tata Ruang;
3. Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
4. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Umum;
5. Penanganan Bidang Kesehatan;
6. Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Penanggulangan Masalah Sosial;

8. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
9. Fasilitas Pembangunan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
10. Pengendalian Lingkungan Hidup;
11. Pelayanan Pertanahan;
12. Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
13. Pelayanan Administrasi Umum Pemerintahan;
14. Pelayanan Administrasi Penanaman Modal;
15. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya; Dan
16. Urusan Wajib Lainnya Yang Damanatkan Oleh Peraturan Perundang-undangan.

Atas tugas tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Cianjur selayaknya dapat menjalankan kependudukan dalam paradigma pembangunan komprehensif sebagai berikut :

1. Membangun komitmen di kalangan pelaku pembangunan agar menerima dan menerapkan paradigma kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan.
2. Koordinasi antar OPD dan fasilitator dalam pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.
3. Menjamin terwujudnya penduduk tumbuh seimbang dengan menetapkan target dan waktu.

4. Memfasilitasi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar senantiasa terlindung dan semakin berdaya sehingga ketahanan dan kesejahterannya meningkat dari waktu ke waktu.

Berdasarkan ilustrasi di atas maka *roadmap* kependudukan disusun sebagai suatu kegiatan integratif yang melibatkan multisektoral untuk mewujudkan penduduk yang berkeadilan. Sektor-sektor penting dalam mewujudkan keselarasan penduduk adalah kesehatan, pendidikan, pangan, pertanian, ketenagakerjaan, ekonomi perdagangan dan lingkungan hidup serta usaha mikro untuk saling berkontribusi mewujudkan kepuasan harmonis pemanfaat pembangunan, oleh karena itu dalam pembangunan harus menempatkan penduduk sebagai obyek sekaligus pelaku setiap sektor pembangunan.

Penyusunan *roadmap* kependudukan integratif ini memerlukan analisis terlebih dahulu agar masing-masing sektor dapat berperan dalam koordinasi yang rapih dimana penduduk sebagai titik sentralnya. Berbagai analisis memiliki kecakapan dalam membedah, mengkonstruksi, merestrukturisasi dan memberi solusi atas permasalahan dan fenomena yang terjadi. Analisis ini memerlukan pandangan awal berupa harapan-harapan yang terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis proyeksi, maka penduduk kabupaten Cianjur pada tahun ke depan disajikan sebagai berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Kependudukan Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2037

INDIKATOR	PROYEKSI			
	2022	2027	2032	2037
KEMATIAN	27.094	32.691	39.668	48.383
KELAHIRAN	119.277	108.182	111.593	109.322
MIGRASI PENDUDUK	42.216	43.928	47.020	50.002
CDR	4,52	5,07	4,74	4,62
CBR	19,92	16,76	16,15	14,95
NMR	7,05	6,81	6,81	6,84
AKB	25	21	17	15
RLS	8,56	9,3	10,95	12
DEPENDENSI	0,46	0,47	0,47	0,46
AHH	71,6	72,5	73,4	74,3
LPP	2,4	2,25	2,04	1,88
CPR	74,4	76,8	78,2	79,9
UNMEET NEED	14,3	12,7	10,7	8,6
TFR.	2,38	2,3	2,26	2,18

Untuk menjalankan *roadmap* di atas maka diperlukan tahapan-tahapan pembangunan kependudukan. Tahapan tersebut disusun sesuai dengan arah sumberdaya manusia yang diinginkan, antara lain penguatan pendidikan dan ketrampilan, penciptaan lapangan kerja, membangun peluang usaha dan ekonomi lainnya, membangun ketahanan pangan, melengkapi fasilitas kesehatan dan pembangunan inklusif berbasis pembangunan keluarga.



Gambar 6.1 Road Map Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur 2022-2037

ROAD MAP PROGRAM PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2020 – 2035



Gambar 6.2 Capaian Roap Map Program Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cianjur 2022-2037

6.2. Analisi Matrik Kontekst Sebagai Dasar Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan di Cianjur

Tabel 6.2 Aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk (Aspek pengendalian kelahiran/ Natality)

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	Kabupaten Cianjur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak begitu besar, namun penyebarannya tidak merata	Jumlah penduduk Kab. Cianjur tahun 2020 mencapai 2.477.605 jiwa, dibandingkan 26 Kab/kota di Jawa Barat. Angka ini menunjukkan kondisi jumlah penduduk yang tidak terlalu tinggi di Jawa Barat. Faktor penyebab penduduk dengan kepadatan yang tidak merata, adalah kondisi geografis, hidrologis, infrastruktur menyebabkan arah mobilitas tidak dinamis. Hal ini berpengaruh terhadap laju TFR yang tinggi di beberapa tempat dan laju migrasi penduduk (orang datang) yang semakin tahun meningkat) di wilayah sumber ekonomi. Ditengah pandemi covid19, migrasi minus tidak bertambah sehingga tahun 2021 diperkirakan akan stabil.	Penduduk yang tinggal di Kabupaten Cianjur memiliki persebaran yang merata dan kuantitas yang terkendali. Jumlah penduduk yang tinggi di wilayah kota apabila diberdayakan kekuatannya maka menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah. Gelombang migrasi minus akibat covid 19 perlu disikapi dengan pengendalian TFR, pengetatan usia perkawinan, persebaran yang adil dalam revolusi industri pasca covid19.	1. Peningkatan kuantitas layanan umum, pendidikan, kesehatan dan ekonomi disesuaikan agar tidak mengalami problem sosial, khususnya di wilayah selatan, tengah dan barat daya 2. Peningkatan kapasitas data mobilitas penduduk, data kelahiran dan kematian IA 3. Implementasi Undang-undang Perkawinan dan penerapan Keluarga Berencana dalam Bangsa kencana 4. Peningkatan arah mobilitas penduduk 5. Perubahan pola ruang pemukiman dan industri menyambut revolusi 4.0

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cianjur mengalami penurunan selama sepuluh tahun terakhir (1,29) hingga di bawah rata-rata nasional yakni (1.56). Namun demikian kondisi LPP yang cukup ideal belum mampu mengendalikan jumlah penduduk yang semakin membengkak dan tidak berimbang antar wilayah	Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur yang cukup tinggi disebabkan oleh dominasi <i>in migrasi</i> yang tinggi dan emigrasi yang rendah. Pertambahan penduduk di masing-masing kecamatan sangat bervariasi dari aspek natalitas dan in migrasi. Wilayah yang memiliki LPP di atas 1.56 antara lain Kecamatan Sukaluyu, Karangtehgah dan Cilaku. Pada masa pandemic covid19 LPP menurun, hal ini karena banyak penduduk migran yang (baik dalam negeri maupun luar negeri) yang keluar dari Kabupaten Cianjur akibat krisis ekonomi.	Laju Pertumbuhan Penduduk disesuaikan atau dibawah 1,28 sampai mencapai 1,1. Laju migrasi pasca pandemi covid19 diatur persebarannya dengan mempersiapkan revolusi industri yang ekseleratif	1. <i>Updating</i> data pertambahan penduduk secara komprehensif 2. Penurunan LPP menjadi 1,1 secara bertahap dengan membuat regulasi yang efektif dalam mengendalikan <i>in migrasi</i> 3. Membuat pola mobilitas yang sesuai dengan penyeimbangan penduduk dengan merubah RTRW 4. Menekan angka kelahiran (natality) dengan mencegah perkawinan usia dini, menekan angka perceraian, menunda kehamilan muda, mengatur paritas, meningkatkan peserta KB baru dan keaktifan peserta KB lama

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
3.	Berdasarkan kepadatan penduduk, terdapat wilayah yang termasuk <i>warning habitat III</i> yaitu 2050 jiwa/km ² .	Wilayah padat penduduk melahirkan problem kependudukan yang tinggi, baik aspek lingkungan hidup, kesehatan lingkungan makro dan mikro, gangguan psikososial dan lain-lain. Wilayah padat penduduk yang masuk <i>Habitat III</i> di kabupaten Cianjur sering terjadi bencana seperti banjir, penularan penyakit (seperti DBD, Cikungunya, Ispa), dan gangguan sosial (seperti angka kriminalitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak). Kondisi padat penduduk tersebut terdapat di kecamatan Margaasih, Majalaya, Katapang Dayeuhkolot, rancaekek, Cileunyi dan Baleendah	1. Persebaran penduduk merata dengan daya dukung lingkungan dan pangan yang sesuai 2. Penduduk Kabupaten Cianjur harus sesuai dg luas wilayah (1:1500) 3. Zonasi sektor-sektor khusus , zona pemerintahan, industri, perdagangan, pemukiman. 4. Pencetakan sawah baru dapat menyebarkan penduduk	1. Perbaikan perencanaan tata ruang dan wilayah 2. Sebaran penduduk disesuaikan dengan daya tampung dan ketersediaan daya dukung (air, lahan, kesempatan kerja) 3. Pengendalian kepadatan penduduk dengan penerapan aturan zonasi hunian baru ,pemerintahan, rumah tinggal, perkampungan dan industry 4. Regulasi Moratorium atau penutupan hunian baru bagi wilayah <i>Habitat III</i> seperti kecamatan Cianjur dan Karangtengah 5. Pencetakan lahan pertanian baru di wilayah Cikadu, leles dan Pasirkuda.
4.	Laju orang datang (migrasi) penduduk di Kabupaten Cianjur masih tinggi dan massif seiring dengan ketahanan	1. Kondisi geografis, perkembangan infrastruktur aksesibilitas dan <i>Buffer zone</i> ekonomi dan perdagangan bagi Kota Bandung dan Jakarta	Kabupaten Cianjur perlu melakukan Konservasi, reklamasi, rezonasi wilayah agar persebaran penduduk merata. Penguatan	1. Penertiban KK, operasi Justisi dan peningkatan pelayanan perubahan domisili serta KTP 2. Membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah kecamatan Tanggeung, Cikadu,

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
	industry di masa pandemi. Pada masa pandemic covid19 migrasi cukup stabil.	seiring aksesibilitas tol, kereta cepat. 2. Cianjur dinilai menjadi tempat yang indah dan layak untuk tempat tinggal bagi warga yang bekerja di luar Kab. Cianjur 3. Migrasi warga dari luar Cianjur yang tinggi sebagai dampak dari industrialisasi dan perdagangan di wilayah penting seperti Rancaekek, Majalaya, Baleendah, dan Soreang.	infrastruktur jalan, kesehatan dan hidrologis bagi pertanian. Kebijakan terbuka untuk migran dilakukan dengan tertib administrasi	leles, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, pasirkudan dan Pagelaran. 3. Kerjasama lintas daerah Kab Cianjur dengan kabupaten sekiarnya dalam data kependudukan untuk memastikan jumlah penduduk yang secara hukum menempati wilayah kabupaten Cianjur
5.	Penduduk migran yang bekerja di luar Kabupaten Cianjur seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Sukabumi dan Kota Sukabumi bermigrasi menjadi penduduk Kabupaten Cianjur dalam rangka kepentingan pekerjaan sektor karyawan industri	Modus <i>in migrasi</i> penduduk tertumpuk di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Ciranjang, Cipanas dan Karangtengah. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain : 1. Kebijakan industrialisasi belum mempertimbangkan wilayah kosong, 2. RTRW yang dibangun perlu dievaluasi untuk pengembangan rencana induk investasi di kecamatan-kecamatan rendah penduduk dengan wilayah luas	Laju masuknya orang ke wilayah Cianjur dikendalikan dengan regulasi seperti penyebaran pabrik, perbaikan RTRW, daya dukung lahan sawah untuk kebutuhan pangan, dan sektor perumahan serta tempat tinggal yang berimbang dengan memperhatikan faktor resiko kebencanaan	1. Wilayah Kecamatan Cianjur dan Karangtengah serta Warungkondang perlu ditutup untuk sector property dan perumahan, hal ini dilakukan agar investor membangun property dan perumahan ke wilayah tengah dan selatan. 2. Pembuatan pabrik baru (dalam regulasi industri) diarahkan ke wilayah Campaka, Campakamulya, Cikokak, pagelaran, Sindangbarang dan Cidaun

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
		3. Kebijakan sector properti dan perumahan belum mempertimbangkan lahan produktif untuk pertanian tanaman pangan 4. Distribusi pabrik tidak merata Keempat faktor di atas menjadi pemicu masuknya orang ke wilayah Kabupaten Cianjur dengan modus yang tidak merata.		3. Restorasi rencana induk penanaman investasi daerah Kabupaten Cianjur
6.	Jumlah Penduduk yang tinggi berada di enam kecamatan, terbesar berturut-turut di Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Cibeber, Cipanas , pacet dan Cilaku	Enam wilayah memiliki jumlah penduduk yang tinggi, disebabkan sebagai berikut : a. Kecamatan Cianjur dan Karangtengah, <i>in migrasi</i> nya sangat tinggi, padahal wilayah ini memiliki natalitas termasuk kategori rendah b. Kecamatan Cibeber dan Cipanas, wilayah ini termasuk <i>warning population</i> , karena migrasi dan natalitas tinggi, bahkan laju natalitas di wilayah ini melebihi laju penduduknya c. Wilayah Pacet dan Cilaku, merupakan daerah dengan	Penduduk dengan laju natalitas tinggi menjadi prioritas program BANGGA KENCANA, SAPUJAGAT dan implementasi pencatatan sipil terintegrasi, penegakan peraturan perundangan terkait perkawinan, perlindungan perempuan dan anak.	1. Mendekatkan pelayanan publik kepada pengguna layanan publik dengan sifat interaktif khususnya dalam layanan KB, 2. Distribusi pelayanan program KB untuk memperkecil kesenjangan akses publik, 3. Penggerakkan dalam upaya menciptakan demand terhadap program KB, yang disesuaikan dengan kondisi kesejarahan, kultur, dan geografis setempat; 4. Penyelenggaraan program KB yang inklusif dan melibatkan banyak aktor

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
		jumlah penduduk paling padat, walaupun emigrasinya tinggi namun jumlah in migrasi juga tinggi dengan natalitas sangat tinggi melebihi laju penduduknya		5. Perbaiki alur birokrasi sehingga mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan dan mempermudah dalam manajemen supervisi dan informasi. a. Clustering kampung KB b. Jumlah tempat layanan KB c. Penyuluhan pola participatory d. Alat Kontrasepsi Gratis dan disesuaikan dengan keinginan masyarakat e. Penegakan Undang-undang Perkawinan f. Menurunkan angka perceraian g. Mengawal konsep SAPUJAGAT

Tabel 6.3 Aspek Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Jumlah, LPP dan Kepadatan)

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	<i>Total Fertility Rate</i> masih tinggi, yakni 2,43. Artinya setiap wanita usia subur melahirkan 2,43 anak. Di sisi lain angka kelahiran kasar (CBR) juga di atas 75,00	TFR di Kabupaten Cianjur masih tinggi disebabkan 1. Target Peserta KB belum tercapai 2. Jumlah peserta KB laki-laki masih rendah .dampaknya adalah jumlah kelahiran mencapai 26 kelahiran per 1000 penduduk. 3. Pembinaan PUS belum mencapai target 4. Pernikahan dini masih tinggi 5. Kesadaran umum masyarakat tentang KB	Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka TFR menjadi 2,1 pada tahun 2045 dan angka NRR sebesar 1,05 – 1,5 Penduduk PUS di Kabupaten Cianjur merupakan peserta aktif program KB, dengan layanan masyarakat yang disubsidi, komunikatif dan menjadi bagian dari program pokok kependudukan	Jumlah Peserta KB ditingkatkan mencapai 95%, 1. Restorasi komunikasi pemerintah dengan masyarakat tentang KB 2. Membangun sinergitas kampung KB dengan kekuatan social dan ekonomi masyarakat
2	Peserta KB aktif 16.677 orang . Capaian Peserta KB Baru (PB) di Kabupaten Cianjur hanya 99.446 tahun 2019. Perkiraan permintaan masyarakat (PPM) sebanyak 70.048 namun pencapaiannya hanya 17.773, artinya ada 42.275 yang tersisa.	Capaian peserta KB baru di beberapa kecamatan mengalami kendala, data menunjukkan terdapat angka PPM (perkiraan permintan masyarakat) dan capaian yang tidak seimbang, hal ini disebabkan oleh 1. Persepsi masyarakat ttg alkon yang membuat kegemukan, kekurusan dan lain-lain 2. Sosialisasi tidak tepat sasaran,	1. Pemahaman masyarakat tinggi tentang alkon dalam menjaga interval kelahiran 2. Sosialisasi, penyebaran alkon terjadwal, kontinyu dan sesuai kapasitas kelahiran 3. Setiap kecamatan mencapai PPM yang seimbang	1.SDM PLKB diperkuat dan ditambah, khususnya pemahaman tentang alkon modern melalui promosi dan edukasi masyarakat 2. Subsidi alkon MKJP modern

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
		3. Intensitas dan distribusi alkon ke daerah TFR perlu dievaluasi 4. SDM KB untuk responsibilitas masyarakat terhadap program KB masih rendah		3. Kualitas alkon diperbaiki
3	PB yang seharusnya diberi Informed Consent: berupa MOP, MOW, IUD, Implant, dan Suntikan berada di bawah rata-rata Jawa Barat, capaian Kabupaten Cianjur hanya 16.677 persen, sedangkan pada level provinsi mencapai 59.38 persen.	1. Peran informed consent yang tidak melanjutkan bimbingan pasca diseminasi informasi KB sehingga pemahaman petugas masih rendah 2. Intensitas dan frekuensi tenaga lapangan dalam informed consent serta pemahaman petugas tentang hal tersebut masih perlu ditingkatkan	1. Pengguna alkon MKJP meningkat 2. Obyek layanan KB harus mendapatkan informed consent agar obyek paham dalam memutuskan untuk ikut KB 3. Intensitas dan frekuensi tenaga lapangan dalam informed consent serta pemahaman petugas tentang hal tersebut terukur secara kualitas dan kuantitas	1. Pelayanan konsultasi online 2. Metode penyuluhan disesuaikan kondisi milenial. 3. Penguatan kapasitas PLKB (personal dan kelembagaan) 4. kewajiban petugas dalam informed consent sebelum penyuluhan 5. Pemerataan alkon MKJP
4	Terdapat Kecamatan-kecamatan yang tingkat partisipasi dan keikutsertaan dalam KB masih sangat rendah seperti Kecamatan Sukaluyu, Karangtengah dan	1. Biaya KB masih tinggi 2. Jangkauan faskes KB masih perlu ditingkatkan	1. Biaya KB disubsidi oleh pemerintah 2. Jangkauan faskes KB masih perlu ditingkatkan di setiap Desa dan Kelurahan	1. Subsidi alkon KB 2. Penyuluhan berkala dengan metode milenial

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
	Cilaku. Hal ini menyebabkan angka kelahiran bayi cukup tinggi di Kabupaten Cianjur.	3. Jumlah Kader Posyandu mengalami stagnasi seiring dengan pertumbuhan penduduk	3. Jumlah Kader Posyandu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk	3. Rekrutmen kader Posyandu ditingkatkan dengan pembentukan kampung KB di setiap desa dan kelurahan
5	Peserta KB aktif di Kab. Cianjur sebanyak 80 persen kurang terfokus pada MKJP, prosentase peserta MKJP hanya 24,99 persen sedangkan non MKJP 75,65 persen	1. Kontribusi peserta baru KB terhadap peserta aktif hanya 5,9 persen 2. Jumlah BKB mencapai 80 persen tapi jumlahnya hanya 111 dan keluarga (PUS) yang menjadi sasaran BKB hanya 22,9 persen, BKR hanya 7,31 persen	1. Peserta KB aktif diarahkan ke MKJP mencapai 80 persen 2. Jumlah kelompok Binaan meningkat 76 persen khususnya BKB, BKR dan UPPKS	1. Subsidi alkon KB untuk MKJP 2. Program penguatan kelembagaan untuk BKB, BKR dan UPPKS serta BKL dengan anggaran dan keterlibatan multipihak

Tabel 6.4 Aspek Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Mortality)

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	Angka kematian penduduk sudah terkendali, Angka kematian kasar (CDR) di Kabupaten Cianjur adalah di atas 9, artinya dari setiap 1000 orang penduduk terdapat kematian sebanyak 9 orang	Kematian penduduk di Kabupaten Cianjur Disebabkan Karena faktor penyakit, usia tua, dan <i>accident</i> . Untuk mengatasi penyakit maka perlu dibangun pola hidup sehat, untuk meningkatkan kualitas penduduk lanjut usia maka perlu dilakukan pelayanan lansia yang maksimal dan untuk menghindari <i>accident</i> maka perlu dibuat peraturan yang meminimalisir terjadinya kecelakaan di dunia kerja, jalan raya dan kenyamanan rumah tangga/lingkungan	Angka kematian penduduk lebih terkendali (di bawah 9). Oleh karena itu diperlukan data kematian dan penyebab kematian perlu dilengkapi untuk membuat program pengendalian penyakit, penanganan lansia dan aturan yang memberi kenyamanan penduduk terhindar dari kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan aspek rumah tangga	1. Perbaiki data kematian penduduk dengan mengintegrasikan pada data kependudukan yang lebih komprehensif. 2. Membangun program kesehatan lansia 3. Membuat aturan kesehatan lingkungan yang lebih ketat 4. Meningkatkan peran hukum untuk memberi kenyamanan pada dunia kerja, lalu lintas dan rumah tangga
2.	Prosentase Tenaga Kesehatan dalam menangani Angka Lahir Hidup (ALH) masih di bawah 94 persen,	Jumlah tenaga kesehatan yang menangani proses kelahiran hidup 64,537 tenaga medis, sedangkan non tenaga kesehatan sebanyak	Peran Tenaga medis mencapai 99 persen,	Penyebaran tenaga medis melahirkan dengan penambahan Polindes, bidan desa dan Puskesmas

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
	kecuali di Kecamatan pameungpeuk, Margahayu dan Cileunyi	5.582 orang. Jumlah ALH sebanyak 7.799 bayi.		
3	Angka kematian bayi (IMR) di Kabupaten Cianjur adalah 2.88, artinya pada setiap kelahiran 1000 bayi,terdapat bayi meninggal sebanyak 25 orang, artinya di atas rata-rata provinsi. Angka kematian balita lebih tinggi yakni 2,96	Kesehatan bayi dalam kandungan dipengaruhi oleh kesehatan lingkungan uterus ibu dan asupan gizi ibu hamil yang efektif digunakan untuk janin. Kesehatan kandungan dipengaruhi oleh usia ibu hamil, Rata-rata nikah pertama masih rendah, perempuan 18, 75 tahun dan laki-laki 23,11 tahun, hal ini berpengaruh terhadap kondisi anatomis uterus. Sedangkan asupan gizi janin dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Angka kematian bayi (IMR) akan menurun dari sekitar 2,8 kematian per 1000 kelahiran pada kurun waktu 2010 – 2015 menjadi sekitar 2,0 kematian per 1000 kelahiran pada periode tahun 2030 – 2035. Angka kematian Balita juga	IMR Angka kematian bayi menurun dibawah 2,0 Rata-rata nikah pertama perempuan 20 tahun dan laki-laki 24 tahun Gizi ibu hamil tercukupi (protein, lemak, vitamin dan mineral) bagi perkembangan janin dalam kandungan	1. Penyuluhan perbaikan usia nikah, kampanye kerugian nikah usia dini dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga/ pasutri 2. Meningkatkan peran PKH (program keluarga harapan) kearah perbaikan gizi, kualitas kesehatan dan pola hidup sehat bagi wanita hamil. 3. Meningkatkan peran POLINDES, bidan desa dan pos pelayanan kesehatan dalam mengintervensi ibu hamil secara intensif dan komunikatif.

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
		diharapkan menurun secara konsisten dari sekitar 2,96 per 1000 kelahiran pada kurun waktu 2010 – 2015 menjadi sekitar 13 per 1000 kelahiran pada periode 2030 – 2035.		
4.	Angka kematian Ibu 33,6, angka kematian Ibu Melahirkan; angka kematian pasca melahirkan; dan angka kematian Bayi dan Anak dan BBLR juga cukup tinggi. Di sisi lain layanan kesehatan Ibu hamil K4 masih rendah 88,79 (nomor tiga terendah setelah Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten Cianjur masih mengalami problem besar dalam menangani hal ini, kondisi ini dilihat dari beberapa infrastruktur kesehatan yang belum memadai, jumlah tenaga medis dan kualitasnya serta pelayanan kesehatan yang stagnan. Kondisi ini akan mempengaruhi angka berbagai kematian.	(1) Penurunan angka kematian Ibu Hamil; (2) Penurunan angka kematian Ibu Melahirkan; (3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan (4) Penurunan angka kematian Bayi dan Anak. (5) penurunan stunting dan BBLR)	(1) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (Pasutri); (2) keseimbangan Akses dan Kualitas KIE dan pelayanan; (3) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan (4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. (4) Peningkatan Dana Persalinan dan Faskes Milik Pemerintah
5.	Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak	Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik 185,316, 2 Hipertensi Primer (esensial) 106,787, 3	Penurunan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik, Hipertensi Primer	Pencegahan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak Spesifik, Hipertensi Primer

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
	Spesifik, Hipertensi Primer (esensial) dan Nasofaringitis Akuta (Common Cold)	Nasofaringitis Akuta (Common Cold) 133,370	(esensial) dan Nasofaringitis Akuta (Common Cold)	(esensial) dan Nasofaringitis Akuta (Common Cold) melalui pola hidup sehat dan lingkungan tanpa cemaran

Tabel 6.5 Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Kesehatan)

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	Rumah Sakit di Cianjur secara kuantitas mengalami stagnasi, yaitu 1 RSU dan 3 RSUD. Sementara wilayah selatan seperti Kecamatan Naringgul, Sindangbarang, Cikadu belum dilengkapi RSUD. Artinya penambahan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan jumlah rumah sakit yang memadai.	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten di Cianjur hanya 4 buah. Jumlah fasilitas RS yang rendah ini tidak sebanding dengan penambahan penduduk yang tajam, infrastruktur aksesibilitas yang belum terbangun dengan baik. hal ini dapat mempengaruhi angka kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan kematian penduduk dan kualitas layanan bagi masyarakat	Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Cianjur perlu di tambah baik unitnya, ruangnya, tenaga medisnya. Penambahan di wilayah selatan, barat daya dan wilayah tengah menjadi urgent bagi pembangunan kesehatan yang berkelanjutan	1. Penambahan kapasitas ruangan dan infrastruktur lain di dua rumah sakit yang sudah ada 2. Pendirian rumah sakit baru di wilayah selatan Kabupaten Cianjur, misalnya dengan meningkatkan kualitas Puskesmas menjadi RSUD.. 3. Penambahan tenaga medis, khususnya dokter psesialis dan bidan di RSUD 4. Membuat solusi strategis BPJS di RSUD
2.	Dinamika Angka harapan hidup . mur Harapan Hidup (UHH) sebagai salah satu dimensi dasar pembentukan IPM di Kabupaten Badung , menurut data dari Badan	Angka harapan hidup waktu lahir (<i>life expectancy at birth</i>) meningkat. Pada tahun 2010 – 2015 diharapkan angka harapan hidup diharapkan di atas 74,2 tahun (angka harapan hidup	Pada periode tahun 2020 – 2025 diperkirakan angka harapan hidup 72,6 tahun (angka harapan hidup laki-laki sebesar 69,1 tahun sedangkan perempuan 73,2 tahun). Kemudian pada	Perbaikan, peningkatan kapasitas, kelembagaan dan fasilitasi pada fasilitas kesehatan yang ada.

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
	Pusat Statistik (BPS), UHH Kabupaten Cianjur berada pada angka 70,13 pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019 pada angka 69,91, termasuk rendah di Jawa Barat.	laki-laki 73,1 tahun sedangkan perempuan 74,3 tahun).	periode tahun 2030 – 2035, angka harapan hidup mencapai 72,2 tahun dimana angka harapan hidup untuk laki-laki sebesar 72,8 tahun sedangkan untuk perempuan sebesar 74,6 tahun	
3.	Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas, Klinik kesehatan dan Poskesdes masih stagnan. Jumlah Puskesmas tidak sebanding dengan kepadatan penduduknya. Sampai tahun 2015 seluruh Puskesmas di Kabupaten Cianjur tidak dilengkapi dengan tenaga Dokter spesialis, dan Dokter gigi.	Tahun 2016 mempunyai 32 Puskesmas yang terdiri dari DTP puskesmas sebanyak 3 dan TTP puskesmas 29 buah. Puskesmas pembantu 13 dan Pusling 32 puskesmas, dan Puskesmas Pelayanan emergensi obstetrik dan Neonatal Dasar (Poned) sebanyak 24 puskesmas. Ratio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur pada Tahun 2019 adalah 1 : 77.425, yang artinya 1 puskesmas melayani 77.000 penduduk. Kondisi ini menjadi tidak ideal, terutama di Kecamatan Cianjur, Cipanas, Karangtengah, Warungkondang, Pacet dan Cikalong	Jumlah Faskes ideal berdasarkan kepadatan penduduk sebagai berikut : 1. Jumlah Puskesmas ditambah menjadi 50 unit agar mencapai jumlah ideal yaitu 1: 30.000 2. Perluasan kapasitas RS 3. Peningkatan Status Puskesmas di wilayah selatan menjadi RSUD	1. Jumlah Puskesmas ditambah di wilayah padat penduduk seperti Cianjur dan karangtengah 2. Setiap puskesmas dilengkapi dokter umum dan dokter gigi 3. Peningkatan Status Puskesmas di wilayah selatan menjadi RSUD seperti Sindangbarang, Naringgul, leles dan Cikadu 4. Jumlah Dokter Gigi ditambah di kecamatan Tanggeung, Cikadu, Cikokak, Pasirtengah, Pagelaran, Leles, Agrabinta dan Cidaun

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
		Jumlah Dokter Gigi masih kurang di kecamatan Tanggeung, Cikadu, Cikokak, Pasirtengah, Pagelaran, Leles, Agrabinta dan Cidaun		
4.	Tahun 2019 sebanyak 2.537 posyandu dengan kader aktif 25.529 kader. Rasio kader per posyandu 5,25 berarti rata-rata setiap posyandu mempunyai kader 5 orang.	Posyandu merupakan ujung tombak monitoring kesehatan ibu dan anak. Kesadaran ibu hamil dan menyusui ke posyandu semakin meningkat, hal ini dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mengakses posyandu. Pada titik-titik tertentu, posyandu mengalami <i>discommunication</i> . Kondisi ini menyebabkan jumlah posyandu dititik tersebut tidak aktif, sementara dititik padat penduduk yang lain posyandu perlu ditambah.	Kader posyandu ditiap desa selayaknya diperkuat dengan peningkatan kapasitas kelembagaan. Audit kader posyandu dilakukan secara sinergis dengan kegiatan PKH agar dapat disusun kebutuhan perluasan Posyandu baik dari aspek kader, fasilitas, dan aksesibilitas.	1. Membangun kelembagaan Posyandu yang bersinergis dengan PKH dan Dana Desa. 2. Peningkatan kapasitas Posyandu meliputi penambahan kader ditiap desa, membangun pola komunikasi Posyandu dengan masyarakat. 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan infra struktur dan implementasi IT untuk meningkatkan komunikasi Posyandu yang lebih efektif.
5	Fasilitas kesehatan di desa-desa masih mengalami kekurangan, hal ini menjadi penyebab beberapa kematian ibu, anak dan umur tertentu	Jumlah Poskesdes di Kabupaten Cianjur Tahun 2016 pencapaiannya Sebesar 81 unit poskesdes. Kondisi ini masih sangat kurang apabila	Jumlah Poskesdes selayaknya 336 buah dengan tenaga kesehatan yang <i>standby</i> setiap waktu.	1. Pembangunan Poskesdes di 221 desa, 2. Peningkatan layanan dengan menambah tenaga

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
	tidak terpantau dengan baik	dilihat dari jumlah penduduk dan persebaran desanya.	Informasi kesehatan dibangun secara terpadu dengan instansi kesehatan di tingkat yang lebih tinggi	medis yang <i>standby</i> setiap hari 3. membangun instalasi jaringan informasi data kesehatan secara terpadu lintas instansi kesehatan
6	Jumlah Polindes dan Bidan Desa telah mencukupi kebutuhan masyarakat, namun kasus penyakit dan kematian ibu dan anak masih cukup tinggi	Pada Tahun 2019 jumlah Polindes sebanyak 153 buah. Dari 270 desa/ 10 kelurahan terdapat 444 bidan di desa dari seluruh bidan sebanyak 535 orang.	Polindes di tiap desa bersinergis dengan Poskesdes, hal ini dilakukan dengan cara menambah fasilitas tenaga medis, bangunan dan layanan informasi.	Pembangunan Polindes terintegrasi dengan Poskesdes dan Posbidu Lansia serta jaringan informasi data terpadu.
7	Tenaga kesehatan di setiap Puskesmas Kabupaten Cianjur masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani	Tahun 2019 sebesar 19,6 artinya di setiap Puskesmas di Kabupaten Cianjur sudah tersedia sejumlah 19 orang tenaga kesehatan. Keadaan ini masih dibawah standar DSP (Daftar Susunan Pegawai) yaitu sebesar 25 orang/puskesmas untuk daerah pedesaan.	Tenaga medis disesuaikan dengan jumlah penduduk (1 : 2500) untuk dokter, dan medis lainnya	Penambahan tenaga medis, khususnya bidan, dokter gigi dan spesialis kandungan
8	Indikator Kinerja Utama Kesehatan pada beberapa rasio faskes belum terpenuhi.	1. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu, persatuan Penduduk : 1 : 13.808	1. Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu, persatuan Penduduk : (target 1: 13.000).	1. Peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas TTP

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
		2. Rasio rumah sakit persatuan penduduk: 1: 200.781 3. Rasio dokter persatuan penduduk :1: 1.820 4. Rasio tenaga medis persatuanPenduduk : 1: 2.563	2. Rasio rumah sakit persatuan penduduk (target 1:195.519) 3. Rasio dokter persatuan penduduk : (target 1:3.788) 4. Rasio tenaga medis persatuanPenduduk : (target 1: 2.000)	2. Peningkatan puskesmas DTP dan Poned menjadi RSUD

Tabel 6.6 Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Ekonomi Ketenagakerjaan)

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	Nilai partisipasi angkatan kerja di kabupaten Cianjur pada tahun 2019 mengalami penurunan. Kondisi ini ironis dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. Kondisi yang parah akan dialami pada tahun 2021 seiring dengan musibah Pandemi Covid19	Penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja sebanyak 1.054.579 orang atau 88.9 persen dari angkatan kerja sebanyak 1.711.830 terbagi menjadi pekerja formal dan informal. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (20-64 tahun) adalah 1.483.420 jiwa atau 60 persen penduduk. Melihat data penduduk yang bekerja informal mencapai 0,67 lebih menunjukkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur perlu diperbaiki, mengingat wilayah ini adalah wilayah industrialisasi di Jawa Barat.	1. Peningkatan rasio bekerja formal dalam sektor pertanian dan sektor lainnya. 2. Peningkatan kuantitas lulusan SMA ke atas agar serapan industry bagi penduduk Kabupaten Cianjur meningkat. 3. Pengendalian arus emigrasi dalam sektor tenaga kerja industry.	1. Pada sektor pertanian perlu diversifikasi usaha tani melalui integrasi pertanian-peternakan sehingga jam kerja petani meningkat dalam setiap tahunnya. 2. Pada pekerjaan sektor lainnya perlu diinventarisir untuk mendapatkan skala usaha pada setiap jenis usaha yang menyerap tenaga kerja. 3. Peningkatan kelembagaan pendidikan SMA terbuka dan atau Paket C untuk memperluas akses pendidikan. 4. Memperluas infrastruktur dan aksesibilitas lembaga sertifikasi kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. 5. Pemerintah secara intensif harus aktif menjalin korespondensi dengan indistri di luar Kabupaten Cianjur dan secara berkala
				melakukan program pameran kerja yang menyajikan lowongan-lowongan di luar Cianjur.

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
				Introduksi keterampilan barang dan jasa yang diperlukan dalam mendukung pariwisata Kabupaten Cianjur sehingga tercipta wirausahawan baru yang bersinergis dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur
2.	Tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung meningkat pada tahun 2018 sebesar 60,32 menjadi 69,25 di tahun 2020	Banyaknya orang tidak bekerja (11,1 %) dari jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data serapan tenaga kerja lulusan SMP dan SD yang tinggi dan lulusan SMA yang rendah menunjukkan bahwa potensi pengangguran terdapat pada lulusan SMA yang tidak dapat memasuki pekerjaan sektor industry. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penduduk usia produktif yang bekerja lebih banyak disektor informal, misalnya membantu orang tua bekerja di sawah/lading.	1. Jumlah pengangguran menurun. 2. Penyerapan tenaga kerja lulusan SMA meningkat. 3. Usia perkawinan dibatasi	1. Pemerintah wajib menginisiasi dan mengintrmediasi kemitraan industry dengan petani dalam konsep agroindustry. 2. SMA dan SMK wajib membangun kemitraan dengan industry untuk menjawab/memenuhi kebutuhan tenaga kerja lulusan SLTA yang berasal dari Kabupaten Cianjur. 3. Memperketat batasan usia nikah dan mengelola pasutri nikah usia dini.
3.	Rasio ketergantungan 62.14, setiap 100 orang usia produktif menanggung beban	Berdasarkan nilai rasio ketergantungan 62,14 menunjukkan adanya beberapa kondisi, antara lain jumlah anak rata-rata 2,6 orang per PUS masih termasuk kategori tinggi. Nila	Rasio ketergantungan menurun menjadi 36	1. Membatasi kelahiran. 2. Distribusi penduduk bergantung kearah peningkatan tingkat pendidikan.

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
	62 orang usia muda dan tua.	ketergantungan problem besar di Kabupaten Cianjur dalam mencukupi kebutuhan dasar kependudukan.		3. Transmigrasi profesional era milenial (Revolusi Industri 4.0)
4.	Rasio bekerja laki-laki perempuan 1:1,3	Modus perempuan bekerja lebih tinggi dari laki-laki pada lulusan SMA dan PT	Perempuan bekerja meningkat dengan rasio 1:1,5	Pemberdayaan perempuan di perdesaan kearah penciptaan sumber ekonomi baru desa

Tabel 6.7 Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Pendidikan)

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	Rata-rata lama sekolah sangat pendek (hanya 6.79 tahun) dari harapan 8,68 tahun pada tahun 2019.	Rata-rata lama sekolah yang pendek menjadi indicator rendahnya IPM untuk meningkat RLS maka perlu dibuka akses pendidikan non-reguler seperti Paket C dan SMA terbuka.	Lama sekolah menjadi 12 tahun	Aksesibilitas pendidikan ditingkatkan
2.	Masyarakat tidak tamat SMP masih tinggi			Sda
3.	Masyarakat tidak melanjutkan SMA masih tinggi			Sda
4.	Serapan lulusan SMA ke sektor industri cukup tinggi tetapi lulusan SMA banyak yang tidak bekerja	Faktor kompetensi lulusan, serapan lulusan SMA dan SMK harus bersaing dengan wilayah lain yang berebut pekerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur		Kemitraan pendidikan-industri dan kewirausahaan Pendidikan vokasi Sertifikasi ketrampilan pasca sekolah kejuruan

Tabel 6.8 Aspek Kewilayahan di Kabupaten Cianjur

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	Terdapat wilayah dengan kepadatan penduduk di atas ambang batas <i>habiyat III</i>. Di sisi lain pada wilayah Kosong seperti Leles, Cikadu, pasirkuda, Tanggeung, Agrabinta dan Cidaun memiliki penduduk yang jarang, hal ini disebabkan oleh hidrologi yang rendah, infrastruktur jalan, aksesibilitas fasilitas kesehatan masih kurang	Kepadatan penduduk di atas habitat III akan menyebabkan problem social, ekonomi, pangan dan kesehatan lingkungan. Penyebaran penduduk membutuhkan sumber-sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk berkayra berproduksi dan reproduksi. Kondisi wilayah kosong yang disebutkan menyebabkan penduduk enggan masuk wilayah ini bahkan generasi yang ada memilih keluar dari wilayah tersebut.	Jumlah Penduduk di ataur dalam 1000 orang /KM²	Membuat Moratorium perumahan, pemukiman dan property rumah tinggal dan pabrik. Wilayah moratorium adalah wilayah Cianjur dan Cipanas
2.	Jumlah Pabrik terkonsentrasi pada daerah tertentu (Kecamatan Cianjur, Warungkondang dan Karangtengah)	Kondisi ini menyebabkan arus penduduk yang menyebabkan kepadatan meningkat	Pabrik terdistribusi dengan baik. Wilayah kosong seperti katapang, Kertasari dan Arjasari layak direkomensi	Menyebarkan pabrik ke wilayah kosoong

Tabel 6.8 Aspek Kewilayahan di Kabupaten Cianjur

No	Kondisi Obyektif	Analisis Kondisi	Kondisi Ideal	Solusi
1.	Kebutuhan beras masih tercukupi bahkan surplus 21 % , namun di wilayah padat penduduk dan wilayah selatan berdasarkan perhitungan neraca energy mengalami penurunan. Secara umum luas lahan pertanian masih aman dalam mencukupi neraca pangan	Kekurangan beras disebabkan dua faktor 1. Ketidakmampuan wilayah dalam memproduksi beras akibat lahan kering, tegalan atau penyusutan lahan basah akibat alih fungsi lahan 2. Faktor daya beli masyarakat yang rendah	Harga beras terjangkau dan distribusi efektif	Menciptakan pertanian ramah padat penduduk Moratorium alih fungsi lahan basah Peningkatan ekonomi dan subsidi pemerintah untuk harga beras Jamian pembelian gabah petani
2.	Produksi daging ayam pedaging mencukupi kebutuhan penduduk, namun produksi daging sapi, ayam kampung dan telur masih rendah	Produksi sapi rendah karena populasi yang ada didominasi industry feedlot. Peternak rakyat dalam produksi sapi potong hanya 22 persen dari total kebutuhan populasi untuk dipotong di Kabupaten Cianjur	Kemandirian daging sapi melalui kemitraan industry-petani	Menciptakan kemitraan industry sapi potong dengan petani melalui berbagai pola yang tepat

6.3. Roadmap Kegiatan Pembangunan Kependudukan 2022-2037

6.3.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tabel 6.9 Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
1. Peningkatan kuantitas layanan umum, pendidikan, kesehatan dan ekonomi disesuaikan dengan orientasi pemerataan wilayah	1. Secara umum telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur	Multipihak	1. Tercapainya RPJMD 2025 dengan Jumlah Penduduk Yang sesuai dengan roadmap	1. Capaian proyeksi jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan dan tingkat ekonomi yang sesuai dengan daya tampung kuantitas penduduk
2. Peningkatan kapasitas data mobilitas penduduk, data kelahiran dan kematian IA	2. Pendataan dari berbagai lembaga antara lain BPS, Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan, Pertanian, DP3AP2KB, Kependudukan dan Migrasi terkoordinasi dengan baik	2. OPD Kependudukan, catatan sipil, Kesehatan, DP3AP2KB, BPS	2. Data Komprehensif dinamis dan akseleratif	2. —idem—

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
3. Implementasi Undang-undang Perkawinan dan Keluarga Berencana	3. Koordinasi Kemenag RI dengan Pemda Cianjur dan Pengadilan Agama	11. Kemenag, Pengadilan Agama dan Dinas terkait	3. Kesadaran menunda usia perkawinan dengan implementasi pendidikan 12 tahun	3. Usia perkawinan di atas UU Perkawinan dengan kesiapan material dan non material
4. <i>Updating</i> data penambahan penduduk secara komprehensif	4. Membuat Program Aplikasi Data Informasi Kelahiran dari kartu kendali kelahiran ke Polindes (faskes paling bawah), Catatan sipil, Rumah sakit, Desa, Puskesmas yang terpusat pada satu terminal data <i>natality</i> dan KB, terintegrasi GO, NGo dan LSM lainnya	4. OPD Informasi dan Komunikasi, OPD Kependudukan, OPD Kesehatan, BKKBD, LSM, Legislatif	12. . Kartu kendali kelahiran di tingkat KK (PUS) <i>terup date</i> sampai ke Dinas PPAPPKB. Laju Pertumbuhan Penduduk disesuaikan atau dibawah 1,1	13. Laju Pertumbuhan Penduduk disesuaikan atau dibawah 0.90

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
5. Penurunan LPP menjadi 1,10 tahun 2024. Tahun 2035 menjadi 0,9 secara bertahap dengan membuat regulasi yang efektif dalam mengendalikan <i>in migrasi</i> dan kelahiran (natality)	5. Menyusun Regulasi tentang <i>in-migrasi</i> , menyangkut kewilayahan, <i>cluster migrasi</i> dan <i>restorasi</i> kawasan industry di Rancaekek, Cileunyi dan Cicalengka serta Majalaya	5. Integrasi OPD Perindustrian, Kependudukan DP3AP2KB, Bappeda Litbang, PUPR, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Legislatif dan LSM	5. Tersusun Perda / Pergub tentang regulasi <i>in migrasi</i> , kewilayahan dan <i>restorasi</i> kawasan industry, pemerintahan, hunian baru perkampungan	5. Pengaturan migrasi penduduk dan tatanan industry ramah kependudukan dan kewilayahan secara disiplin
6. Proteksi wilayah <i>Habitat III</i> , a. Perbaikan perencanaan tata ruang dan wilayah Sebaran penduduk disesuaikan dengan daya tampung dan ketersediaan daya dukung (air, lahan, kesempatan kerja),	6. a. Menyusun Perda/Perbub Pencemaran air, udara, tanah, Pencegahan Bencana Alam dan sosial akibat <i>habitat III</i>	6. Multipihak GO dan Swasta	6. a. Terbentuk Perda/Perbub Pencemaran, Pencegahan Bencana Alam dan sosial akibat <i>habitat III</i>	6. a. Seluruh Kecamatan di Kab. Cianjur bebas bahaya <i>Habitat III</i>

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
b. Pengendalian kepadatan penduduk dengan penerapan aturan zonasi kesesuaian daya dukung wilayah seperti pemerintahan, rumah tinggal, perkampungan dan industrialisasi c. Moratorium perumahan baru, industry baru dan diiringi dengan perluasan industrialisasi d. Membangun infrastruktur aksesibilitas ekonomi, wilayah, pendidikan dan kesehatan serta peningkatan hidrologi di wilayah selatan dan barat daya	b. Program implementasi Perda/Pergub dengan membuat peta zonasi yang tersosialisasi dengan pihak swasta c. Wilayah tengah, selatan dan barat daya yang dikembangkan dengan peningkatan kapasitas hidrologis dan infrastruktur. d. Kecamatan Pasirtengah, Pagelaran, Tanggeung, Cidaun, Agrabinta, Leles dan Cikadu	Pemkab Cianjur	14. Peningkatan Investasi industry dan perdagangan yang terintegrasi dengan zonasi kesesuaian daya dukung wilayah 15. —sda— d. —sda--	16. Persebaran penduduk dengan kualitas baik dan seimbang dengan daya dukungnya 17. — sda – 18. —sda—

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
7. Kerjasama lintas daerah Kab. Cianjur dengan kabupaten/Kota/Provinsi sekitarnya dalam data kependudukan	7. Membangun jaringan sistem alur migrasi penduduk, menertibkan Kartu Keluarga, KTP dan data migrasi	Setda bagian Kerjasama, Bappeda Litbang, OPD Kependudukan Kab. Cianjur dengan OPD Kependudukan, Kab. Cianjur, Sukabumi dan OPD Kependudukan Sukabumi, KBB dan Purwakarta serta Bogor	Data Migrasi Penduduk terup <i>date</i> setiap saat	---idem--
8. Peningkatan laju <i>Emigrasi</i> bagi warga Kabupaten Cianjur melalui program transmigrasi terpadu profesional	1. Program transmigrasi dibangun melalui sinergitas dengan perusahaan kemitraan dan pimpinan daerah di wilayah kosong penduduk di Jawa	1. OPD Kependudukan 2. OPD Pendidikan 3. Bappeda Kabupaten Cianjur 4. OPD Perindustrian 5. OPD Tenagakerja	Laju <i>Emmigrasi</i> meningkat 10% melalui program transmigrasi profesional dan 20 % meningkat melalui program pemerataan sumber ekonomi	Laju <i>Emmigrasi</i> meningkat 40% melalui program transmigrasi profesional dan 20 % meningkat melalui program pemerataan sumber ekonomi

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
	Barat atau luar pulau Jawa . 2. Menyiapkan generasi terampil dalam berbagai bidang untuk mengisi kekosongan SDM di wilayah lain. 3. Transmigrasi Profesional dibangun dengan mencetak ketrampilan atau kompetensi profesi yang tersertifikasi bagi penduduk calon angkatan kerja yang mampu bersaing di luar Kab. Cianjur	6. Lembaga sertifikasi profesi dan ketrampilan khusus		
9. TFR menjadi 2,1 pada tahun 2025 dan angka NRR sebesar 0,9 dalam rangka menutupi peserta KB di tahun 2017	9. Peningkatan Jumlah Peserta KB mencapai 90%, kegiatan ini dilakukan dengan cara :	1. OPD Kependudukan 2. OPD Kesehatan 3. DP3AP2KB	TFR menjadi 2,1 pada tahun 2025 dan angka NRR sebesar 1,3-1,5	TFR menjadi 2,0 dengan angka NRR 1,05

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
sebanyak 559.114 PUS yang tidak tercapai (64,78%)	a. Restorasi komunikasi pemerintah dengan masyarakat tentang KB b. Membangun sinergitas kampung KB dengan kekuatan social dan ekonomi masyarakat c. Wilayah prioritas kebijakan yang ketat tentang KB di daerah padat penduduk	4. LSM 5. OPD Pemdes 6. Pemdes		
19. Pengendalian <i>natalitas</i> di wilayah cluster merah, antara lain : Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu	20. Clustering kampung KB di wilayah prioritas (item 1) dengan cara : a. Penambahan dan peningkatan	a. OPD Kependudukan b. OPD Kesehatan c. DP3AP2KB d. LSM	<i>Total Fertlity Rate (TFR)</i> = 2,1 anak per wanita usia subur <i>Net Reproduction Rate(NRR)</i> = 1,2-1,5	<i>Total Fertlity Rate (TFR)</i> = 2,1 anak per wanita usia subur <i>Net Reproduction Rate(NRR)</i> = 1,05

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
	kapasitas tempat layanan KB b. Penambahan Tenaga medis c. Penguatan kelembagaan KB melalui Penyuluhan pola participatory dan terintegrasi dengan kegiatan kemasyarakatan d. Alat Kontrasepsi Gratis dan disesuaikan dengan keinginan masyarakat e. Perbaikan alur birokrasi pengambilan keputusan dan manajemen supervisi dan informasi.		<i>Crude Birth Rate (CBR)</i> = 17,5 Kelahiran per 1000 Penduduk perempuan <i>Contraceptive Prevalence Rate(CPR)</i> = 75%	<i>Crude Birth Rate (CBR)</i> = 17,0 Kelahiran per 1000 Penduduk perempuan <i>Contraceptive Prevalence Rate(CPR)</i> = 75%

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
21. Peningkatan capaian Peserta KB Baru (PB) di Kabupaten Cianjur dan Perkiraan permintaan masyarakat (PPM) di semua kecamatan mencapai 92 persen	SDM PLKB diperkuat dan ditambah, khususnya pemahaman tentang alkon modern melalui promosi dan edukasi masyarakat Subsidi alkon MKJP modern berkualitas	DP3AP2KB	11. Jumlah PLKB terpenuhi di 320 Desa/kelurahan	11. Kompetensi PLKB dalam jaringan Pokmas di semua desa
22. PB diberi Informed Consent: berupa MOP, MOW, IUD, Implant, dan Suntikan dengan capaian 95 persen	Pelayanan konsultasi online dengan Metode penyuluhan disesuaikan kondisi milenial. Penguatan kapasitas PLKB (personal dan kelembagaan) melalui kewajiban petugas dalam informed consent sebelum penyuluhan	DP3AP2KB	a. Pengguna alkon MKJP 75 persen dengan informed consent. b. Intensitas dan frekuensi tenaga lapangan dalam informed consent 96 persen	a. Pengguna alkon MKJP 85 persen dengan informed consent. b. Intensitas dan frekuensi tenaga lapangan dalam informed consent 96 persen
23. Penguatan Kelembagaan Pokmas berbasis	Program penguatan kelembagaan untuk BKB, BKR dan UPPKS	DP3AP2KB	13. Peserta KB aktif diarahkan ke MKJP mencapai 70 persen	13. Peserta KB aktif diarahkan ke MKJP mencapai 75 persen.

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2025	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
Milenial dengan teknologi Rev. 4.0	serta BKL dengan anggaran dan keterlibatan multipihak		Jumlah kelompok Binaan meningkat 76 persen khususnya BKB, BKR dan UPPKS	Jumlah kelompok Binaan meningkat 76 persen khususnya BKB, BKR dan UPPKS
24. Produksi paket penyuluhan berbasis android dan implementasi Penyuluhan berkala dengan metode milenial dan Rekrutmen kader Posyandu ditingkatkan dengan pembentukan kampung KB di setiap desa dan kelurahan	25. Pembuatan aplikasi untuk 1. Penyuluhan Digital 2. Buku petunjuk elektronik 3. Layanan konsultasi 4. Sinergitas multi pihak	DP3AP2KB	14. Peserta pengguna aplikasi meliputi 50 persen pengguna android	14. Peserta pengguna aplikasi meliputi 65 persen pengguna android

6.3.2. Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Mortality)

Tabel 6.10 Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Pengendalian Mortalitas Penduduk di Kabupaten Cianjur

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2023	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2035	Prakiraan Anggaran (x 1000)
1. Pengendalian Angka kematian penduduk (di bawah 9). Sinergitas dan integrasi data kematian dan penyebab kematian untuk membuat program pengendalian penyakit, penanganan lansia dan regulasi penurunan angka kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan kekerasan dalam rumah tangga	1. Perbaikan data kematian penduduk dengan mengintegrasikan pada data kependudukan yang lebih komprehensif. 2. Membangun program kesehatan lansia 3. Membuat peraturan kesehatan lingkungan yang lebih ketat 4. peningkatan peran hukum untuk kenyamanan pada dunia kerja, lalu lintas dan kekerasan rumah tangga (advokasi, dan pelatihan)	1. OPD Kependudukan 2. OPD Kesehatan 3. Bappeda Kabupaten Cianjur 4. Polres Cianjur 5. LSM dan asosiasi advokat	1. Angka kematian penduduk lebih terkendali (di bawah 9). Dengan indikator sekunder antara lain a. penurunan angka kematian akibat kasus metabolic pada Lansia b. Indikator pencemaran air, dan udara menurun c. angka kecelakaan lalu lintas menurun		tidak terdeteksi

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2023	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2035	Prakiraan Anggaran (x 1000)
			d. angka kecelakaan kerja menurun e. angka kekerasan dalam rumah tangga menurun		
2. Penurunan angka kematian bayi 3. Peningkatan usia perkawinan 4. Membangun sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dengan kegiatan PKH, Dana Desa dan Perhutanan sosial untuk meningkatkan kualitas data dan peran bersama dalam peningkatan peran POLINDES, POSYANDU, POSBIDES	1. Penyuluhan perbaikan usia nikah, kampanye kerugian nikah usia dini dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga/pasutri 2. Peningkatan peran PKH (program keluarga harapan) dan Dana Desa kearah perbaikan gizi, kualitas kesehatan dan pola hidup sehat bagi wanita hamil. 3. Peningkatan peran POLINDES, bidan desa dan pos pelayanan kesehatan dalam mengintervensi ibu hamil	1. OPD Kependudukan 2. OPD Kesehatan 3. Bappeda Kabupaten Cianjur 4. Dinas Ketahanan Pangan 5. LSM dan asosiasi profesi kesehatan	1. IMR Angka kematian bayi menurun dibawah 3 2. Rata-rata nikah pertama perempuan 19 tahun dan laki-laki 23 tahun 3. Gizi ibu hamil tercukupi (protein, lemak, vitamin dan mineral) bagi perkembangan janin dalam kandungan		Rp1.000.000

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2023	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2035	Prakiraan Anggaran (x 1000)
	secara intensif dan komunikatif dengan introduksi makanan pendamping ibu hamil dan bayi				
6. Penurunan angka kematian Ibu Hamil, Penurunan angka kematian Ibu Melahirkan, Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan Penurunan angka kematian Bayi dan Anak.	(1) Penyuluhan Rumah Tangga (Pasutri) tentang kesamaan hak reproduksi bagi pasangan suami istri (Pasutri); (2) keseimbangan Akses dan Kualitas KIE dan pelayanan; (3) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan (4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan lingkungan	1. OPD Kependudukan 2. OPD Kesehatan 3. BKKBD 4. LSM 5. OPD Pemdes 6. OPD Informasi dan Komunikasi 7. Pemdes	Data angka kematian Ibu Hamil, angka kematian Ibu Melahirkan, Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan angka kematian Bayi dan Anak terintegrasi dengan data dalam Program Aplikasi Data Informasi Terintegrasi Kelahiran .		Rp200.000,0

6.3.3. Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Kesehatan)

Tabel 6.11 Pengendalian Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Kesehatan)

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
1. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Cianjur perlu di tambah baik sebarannya, unitnya, ruangnya, tenaga medisnya	1. Penambahan kapasitas ruangan dan infrastruktur lain di tiga rumah sakit yang sudah ada 2. Pendirian rumah sakit baru di wilayah selatan KABUPATEN CIANJUR, misalnya dengan meningkatkan kualitas Puskesmas menjadi RSUD, 3. Membangun regulasi tumbuhnya RSU swasta dan RS khusus di wilayah selatan 4. Penambahan tenaga medis, khususnya dokter spesialis dan bidan	1. Bappeda Kabupaten Cianjur 2. OPD Kesehatan 3. OPD Pekerjaan Umum	1. Kapasitas Tampung Rumah Sakit meningkat 30% 2. Terdapat RSUD baru dengan meningkatkan status dan kualitas Puskesmas menjadi RSUD. 3. Tenaga Medis, khususnya dokter dan bidan di RSUD meningkat 30%	1. Kapasitas Tampung Rumah Sakit meningkat 100% 2. Indikator kinerja utama kesehatan terpenuhi 100 %
2. Perbaikan angka harapan hidup	perbaikan fasilitas kesehatan	OPD Kesehatan	angka harapan hidup 70,13 (angka harapan hidup laki-laki sebesar 69,1 tahun	angka harapan hidup 73,1 (angka harapan hidup laki-laki sebesar 72,1 perempuan 74,2

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
			sedangkan perempuan 71,2 tahun).	
3. Peningkatan Tenaga Medis dan Faskes	Pemenuhan Dokter dan dokter gigi di seluruh Puskesmas, Penambahan Puskesmas di wilayah Lembang, Parongpong dan Batujajar	OPD kesehatan	1. Puskesmas Poned di 20 Puskesmas 2. Seluruh Puskesmas memiliki dokter , dokter gigi, bidan dan perawat yang sesuai dengan rasio penduduk	1. Puskesmas Poned di 30 Puskesmas 2. Seluruh Puskesmas memiliki dokter , dokter gigi, bidan dan perawat yang sesuai dengan rasio penduduk
4. Penguatan Kelembagaan Posyandu	1. Penambahan jumlah Posyandu di kawasan padat penduduk 2. Peningkatan kader Posyandu dan subsidi fasilitasnya 3. Membangun Program aplikasi android untuk Posyandu agar terintegrasi dengan seluruh Posyandu dan Puskesmas se Kab. Cianjur	OPD Kesehatan Dinas Informasi dan Komunikasi	1. Jumlah Posyandu 2857 unit 2. Kader Posyandu meningkat 31 ribu kader 3. Aplikasi Android untuk rekam dan sharing data Posyandu terintegrasi dengan Puskesmas se Kabupaten Cianjur	1. Jumlah Posyandu 2957 unit 2. Kader Posyandu meningkat 60% 3. Sinergitas Posyandu, Polindes dan POKMAS

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
5. Perbaikan fasilitas lingkungan hidup	Menyusun regulasi TPA, Sampah Rumah Tangga dan limbah industri	OPD Kesehatan dan Pekerjaan Umum	bebas dari limbah rumah tangga, TPA yang representative	1. terbangun Industri pengolahan sampah
6. Pembangunan Poskesdes di 356 desa, dengan Peningkatan layanan dengan menambah tenaga medis yang <i>standby</i> setiap hari serta terbangun instalasi jaringan informasi data kesehatan secara terpadu lintas instansi kesehatan	Persebaran tenaga medis untuk mencapai 1:2.500 penduduk melalui Poskesdes yang terintegrasi dengan Polindes, Posbides, Posyandu dan Pokmas	OPD Kesehatan Organisasi kepemudaan PIKR, BKR, BKL dan BKB	6. Integrasi data dan layanan di tingkat desa	6. Integrasi data dan informasi kesehatan terpusat dengan kabupaten

6.3.4. Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Ekonomi Ketenagakerjaan)

Tabel 6.12 Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Ekonomi Ketenagakerjaan di KABUPATEN CIANJUR

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
1. Peningkatan status kerja informal menjadi formal pada tenagakerja pertanian, jasa dan perdagangan	1. Diversifikasi pertanian-peternakan-perikanan 2. Membangun sinergitas BUMdes dengan kelompok tani, kelompok usaha dan perdagangan UMKM	1. OPD pertanian, peternakan, perikanan 2. OPD Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3. OPD Pemerintahan Desa 4. TA Kemendes	1. Peningkatan status tenaga kerja informal menjadi formal 30% 2. Penyerapan tenaga kerja professional di sektor industri	1. Peningkatan status tenaga kerja informal menjadi formal 70% 2. Penyerapan tenaga kerja professional di sektor industri
2. Membangun Kewirausahaan dan Pameran Lowongan Kerja	1. Pelatihan kewirausahaan berbasis kemitraan industri 2. Mengadakan <i>job fair</i> untuk industri di luar Kabupaten Cianjur rutin setiap tahun sekali	OPD Tenaga kerja dan transmigrasi	1. Peningkatan jumlah UKM yang berbasis mitra industri 2. Peningkatan migrasi penduduk untuk bekerja di luar Cianjur	1. Terbangun korporasi industri berbasis UMKM dan pertanian 2. SDM produktif di Kabupaten Cianjur terserap dalam industry global

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
3. Membangun kerja sama industri untuk penyerapan tenaga kerja lulusan SMA dan SMK	1. Menjalin kemitraan industri dan Sekolah untuk penyerapan lulusan di industri	1. Dinas Pendidikan dan 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Penyerapan tenaga kerja industri di Kabupaten Cianjur meningkat 30%	1. Penyerapan tenaga kerja industri di Kabupaten Cianjur meningkat 30%
4. Sertifikasi profesi atau keahlian khusus yang dibutuhkan industry di dalam dan luar negeri	1. Penguatan lembaga ketrampilan atau BLK tingkat kabupaten terintegrasi dengan lembaga sertifikasi profesi keahlian khusus dalam dan luar negeri	1. Lulusan SMK atau SMA tersertifikat dan terdistribusi di dunia industry atau perdagangan	1. Emigrasi penduduk usia produktif meningkat 20 persen dengan penyerapan tenaga kerja 100 persen	1. Emigrasi penduduk usia produktif meningkat 40 persen dengan penyerapan tenaga kerja 100 persen
5. Menurunkan Rasio ketergantungan	5. Program Membatasi kelahiran. Distribusi penduduk bergantung kearah peningkatan prosentase pendidikan.	OPD Pendidikan OPD tenaga kerja	sda- TFR	-sda- TFR

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
6. Jumlah Penduduk bekerja laki-laki lebih sedikit dari pada perempuan pada lulusan SD dan PT	6. Penyebaran lulusan pada wilayah yang membutuhkan	OPD Disnaker	-	-

6.3.5. Aspek Kualitas Penduduk di Kabupaten Cianjur (Aspek Pendidikan)

Tabel 6.13 Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Pendidikan di Kabupaten Cianjur

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027
1. Peningkatan lulusan SMP dan SMA untuk memperpanjang lama sekolah	fasilitasi aksesibilitas SMP dan SMA Terbuka atau Paket C di seluruh kecamatan	OPD Pendidikan	Angka Lama Sekolah meningkat menjadi 8 tahun	Angka Lama Sekolah meningkat menjadi 12 tahun
2. Peningkatan serapan lulusan SMA ke perguruan tinggi negeri	peningkatan kapasitas pembelajaran dengan kurikulum yang sudah ada	OPD Pendidikan	Serapan lulusan SMA ke PTN meningkat 30%	Serapan lulusan SMA ke PTN meningkat 60%
3. Peningkatan kualitas lulusan SMK untuk sertifikasi kerja	Perbaikan lembaga sertifikasi profesi untuk lulusan SMK baik negeri atau swasta Peningkatan dan fasilitasi program magang luar negeri	1. Dinas Pendidikan dan 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Lulusan SMK tersertifikasi sehingga siap kerja 2. Penyerapan kerja lulusan SMK meningkat 50%	1. Lulusan SMK tersertifikasi dan teradvokasi dalam profesi 2. Penyerapan kerja meningkat 50%

6.3.6. Aspek Kewilayahan di Kabupaten Cianjur

Tabel 6.14 Peningkatan Kualitas Kewilayahan di Kabupaten Cianjur

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
1. Regulasi distribusi penduduk	Membangun sumber ekonomi, infrastruktur dan aksesibilitas serta peningkatan hidrologis di wilayah Kecamatan Pasirkuda, Pagelaran, Tanggeung, leles, Agrabinta, Cikadu dan Cidaun.	Bappeda OPD kependudukan	Jumlah Penduduk di ataur dalam rata-rata 700 orang /KM ²	Jumlah Penduduk di ataur dalam rata-rata 1000 orang /KM ²
2. Pabrik terdistribusi dengan baik	Menyebarkan pabrik, pusat perdagangan, pemerintahan dan jasa ke wilayah kosong serta aksesibilitas ke jalur selatan	Bappeda OPD kependudukan OPD Pekerjaan Umum OPD Kehutanan	Perubahan RTRW untuk industri ke wilayah dengan daya dukung memadai	Perubahan RTRW untuk industri ke wilayah dengan daya dukung memadai

6.3.7. Aspek Ketahanan Keluarga di Kabupaten Cianjur

Tabel 6.15 Rantai Pasok Pangan Di Kabupaten Cianjur

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
1. Pangan dan pertanian	1. Menciptakan pertanian ramah padat penduduk 2. Peningkatan ekonomi dan subsidi pemerintah untuk harga beras 3. Jaminan pembelian gabah petani sesuai dengan kalkulasi budidaya padi 4. Diversifikasi pertanian-peternakan-perikanan dengan moratorium industrialisasi di wilayah irigasi kelas I	1. OPD Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 2. OPD Kehutanan 3. Dinas Pekerjaan Umum	1. Kecukupan Pangan (beras) di atas 70% 2. Lahan sawah baru dan sawah integrasi di Kecamatan Jasinga, Rumpin dan Tanjungsari 3. Distribusi pangan efektif 4. Terjalin kemitraan pertanian-agroindustry	- idem -
2. Produksi Ternak	1. Peningkatan populasi Sapi Potong melalui kemitraan industrial	4. OPD Peternakan	1. Produksi daging sapi di atas 30 persen dari total kebutuhan kabupaten Cianjur	Produksi daging tercukupi

Tabel 6.16 Penurunan Kriminalitas dalam Habitat III Di Kabupaten Cianjur

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
1. Penurunan gangguan psikososial sebagai dampak dari padat penduduk, tidak ada ruang terbuka hijau, ketimpangan ekonomi dan sosial serta pengangguran	1. Program psikososial diimplementasikan dengan melibatkan elemen masyarakat dan pemerintah 2. Regulasi ruang terbuka hijau, ramah anak , luasan lahan ideal. 3. Penambahan petugas keamanan yang sinergis dengan keterlibatan lembaga keagamaan dalam mengatasi kriminalitas 4. Penyuluhan pencegahan tindak kriminal khususnya pada usia anak-anak di tiap kelurahan (kerjasama, polisi-	Multipihak Kemenag RI Dinas Sosial POLRI TNI DPPKBP3A Organisasi Masyarakat	Penurunan angka kriminalitas 99 %	Penurunan angka kriminalitas 99 %

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
	dinas sosial dan masyarakat) 5. Program hunian baru vertikal yang terjangkau bagi masyarakat bawah, dilengkapi dengan fasilitas psikososial dan Pendidikan karakter seperti Madrasah, TPQ, Masjid , Kampung KB, PIKR dan rumah ibadah lainnya secara sinergis menumbuhkan keimanan, ketaqwaan dan kesalehan sosial termasuk toleransi dalam bermasyarakat.			

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
2. Perbaikan lingkungan pemukiman, kapasitas tampung hunian, pengelolaan limbah, sanitasi dan drainase pemukiman	Penyuluhan lingkungan sehat Kapasitas tampung rumah disesuaikan dengan penghuni rumah , Pembangunan drainase, revitalisasi sungai dan pengelolaan limbah rumah tangga di tiap RT	Multipihak	Desa Hijau, bersih dan sehat	Tidak terdeteksi
3. Penurunan angka perceraian	1. Program penyuluhan dan pemberdayaan RT Sakinah multi pihak KUA, Dinas sosial, Dinas PP dan KB serta Pokmas di tiap kelurahan 2. Implementasi UU Perkawinan dalam program ketahanan keluarga 3. Program pembagian Buku Pembekalan Keluarga	Koordinasi lembaga yang menangani keluarga (KUA, Dinas sosial, DP3AP2KB)	Angka perceraian menurun 80 persen	Tidak terdeteksi

Subyek Yang dibangun	Kegiatan Yang dilakukan	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2037
4. Penurunan pernikahan usia dini	Program PIKR (organisasi, kelembagaan, pendanaan dan keterlibatan semua unsur dalam pembinaan dan advokasi 3 A	DP3AP2KB	Usia pernikahan meningkat	Usia Pernikahan Meningkat
5. Penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	program koordinasi PTP2A , Polri dengan pokmas dalam pencegahan tindak kekerasan Dalam bimbingan ORTU-TOMAS-TOGA	DP3AP2KB POLRI TNI Dinsos		

6.3.8. Aspek Kesesuaian Road Map dengan Indikator Pembangunan Kabupaten Cianjur

Tabel 6.17 Kesesuaian Road Map dengan RPJMD Kabupaten Cianjur

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
1	Penurunan angka kelahiran sekaligus kematian ibu-bayi lahir melalui promosi dan advokasi kesehatan.	1. Melakukan Rakor dengan perangkat daerah untuk mendapat satu komitmen	Perangkat daerah		1. Indeks Kesehatan 2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3. Crude Birth Rate (CBR) 4. Angka Harapan Hidup (AHH)
		2. Pelayanan KB terutama MKJP	1. DP3AP2KB 2. DINKES 3. IDI 4. IBI 5. Rumah Sakit Swasta 6. LSM	1. MOP = 99 2. MOW = 694 3. IUD = 8.522 4. IMPLANT = 6733	
		3. Pembentukan dan pembinaan Kampung KB	1. Perangkat daerah 2. Instansi vertical 3. CSR	1. 1 Kecamatan 2 Kampung KB 2. 60% pembinaan Kampung KB	
2	Penguatan lini lapangan dalam pencapaian penurunan	1. Pertemuan petugas lini lapangan (PKB dan TPD)	DP3AP2KB	1. 12 Bulan (100%) 2. Jumlah 259 orang	1. Indeks Kesehatan

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
	kelahiran dan aksesibilitas program KKBPK.			3. Penambahan petugas 176 petugas	2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 3. Crude Birth Rate (CBR) 4. Angka Harapan Hidup (AHH)
		2. Penguatan IMP	Pos KB dan Sub Pos KB	1. 435 kader	
		3. Pembinaan petugas lini lapangan	DP3AP2KB	12 Bulan (100%)	
		4. Penyuluhan dan penguatan pengendalian penduduk melalui program KKBPK	1. Dinkes 2. Kemenag 3. Disdik 4. DPMD 5. Dinsos 6. Disduk Capil	40 x 12 = 480 kali (per tahun)	
3	Peningkatan Pendidikan fungsi Keluarga pada remaja, keluarga baru, BKB,BKR dan BKL.	1. Pelatihan kader BKB, BKR, BKL	1. DP3AP2KB 2. Disdik 3. Dinkes 4. Dinas Sosial	Terlatihnya (per tahun) : 1. Kader BKB = 120 orang 2. BKR = 120 orang 3. BKL = 120 orang	1. Indeks Kesehatan 2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
		2. Pembinaan kelompok BKB, BKR dan BKL		Terbinanya (per tahun) : 1. BKB = 64 kelompok 2. BKR = 34 kelompok 3. BKL = 35 kelompok	3. Crude Birth Rate (CBR) 4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 5. Angka Harapan Hidup (AHH)
		3. Pembinaan dan pembuntukan melalui PIK remaja	1. Disdik 2. DP3AP2KB 3. Dinkes 4. BNN (Kab Cianjur) 5. Dispora	1. Terbentuknya PIK Remaja 2. 1 kecamatan 2 PIK remaja	
4	Gerakan Pemberdayaan perempuan dengan pendekatan keluarga yang lebih merata.	Pelatihan pelaksanaan pengarusutamaan gender	1. DP3AP2KB 2. Disdik 3. Dinsos 4. Lembaga vertical 5. Kesbangpol 6. LSM	415 orang	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
5	Persiapan dan sosialisasi pembuatan Perbup <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan	1. Persiapan Perbup 2. Pembuatan Perbup 3. Sosialisasi Perbup	1. Setda Pemda Kabupaten Cianjur 2. Biro hukum Setda Pemda Kabupaten Cianjur 3. DP3AP2KB		Indeks Reformasi Birokrasi
6	Perilaku hidup sehat (PHBS, 48%): lahir dgn askes, layanan gizi, air bersih, sanitasi sehat, life style.				1. Indeks Kesehatan 2. Angka Harapan Hidup (AHH)
7	GERAKAN AYO KE PAUD & PARENTING untuk mempersiapkan anak yang berkualitas, anak yang lebih mandiri, mempunyai kematangan emosional sejak dini untuk mengikuti jenjang berikutnya dan pencegahan stunting.	1. Dengan adanya BOP agar dapat ditingkatkan dalam bidang sarana dan prasarana pada Lembaga PAUD di Kabupaten Cianjur. 2. Advokasi Peningkatan Tenaga Pengajar dan Orang Tua Siswa. 3. Peningkatan APK dan APM.	1. Kemendikbud 2. Kementerian PU 3. Bapedda Litbang 4. UNICEF 5. DP3AP2KB 6. HIMPAUDI 7. IGTKI 8. LSM	1 RW = 1 Lembaga PAUD	1. Indeks Pendidikan 2. RLS (Rata-rata Lama Sekolah) 3. HLS (Harapan Lama Sekolah) 4. Indeks Membaca

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
8	Peningkatan kualitas mental peserta didik (Sekolah/Madrasah/Pesantren)	Penguatan peserta didik berbasis Pontren	1. Disdik 2. Kemenag	50% dari total Madrasah/Pesantren	Indeks Pendidikan
9	Pecegahan masyarakat terkena dampak sosial.	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinsos	100% PMKS yang diberikan jaminan sosial	1. Indeks Ketimpangan Williamson 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial		37,26% PSKS yang dilatih	3. Indeks Kebahagiaan 4. Tingkat Kemiskinan
		3. Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat		56,76% PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS	5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
10	Penguatan ketahanan pangan daerah.	1. Program pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan • Pengelolaan dan Analisa peningkatan konsumsi pangan • Pengembangan penganekaragaman dan promosi pangan.	1. Distanhorbun 2. Diskanak 3. Diskop UKM 4. Disdagin 5. BPBD 6. Dinkes 7. Disdik 8. PD Pasar 9. Dinas PUPR 10. BPOM 11. BPS 12. Masyarakat terdampak bencana (alam/social)	1. Skor kecukupan energi (103,20%) 2. Skor kecukupan protein (112,206%)	Skor Pola Pangan Harapan
		2. Program pengembangan pengawasan, kerjasama dan informasi keamanan pangan • Pengawasan, pembinaan keamanan dan kelembagaan pangan.	13. Keluarga pra sejahtera 14. PKH 15. Pemerintah desa 16. Kelompok tani 17. Kelompok wanita tani 18. Kampung KB	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (93,50%)	

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
		Pengembangan kerjasama dan informasi keamanan pangan.			
		3. Program pengawasan dan pengujian pangan segar Penyelenggaraan UPT pengujian mutu pangan segar.		Keamanan pangan segar yang diuji (91,00%)	
		4. Program ketersediaan dan kerawanan pangan - Penanganan dan Analisa ketersediaan pangan. - Pengembangan system informasi ketahanan pangan. - Penanganan dan analisis kerawanan pangan		1. Ketersediaan energi (103,70%) 2. Ketersediaan Protein (145,20%) 3. Ketersediaan Pangan Utama (35,72%)	

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
		5. Program distribusi dan cadangan pangan. • Penanganan distribusi dan harga pangan • Pengelolaan cadangan pangan daerah.		1. Stabilitas harga dan pasokan pangan (93,50%) 2. Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah (100%)	
11	Peningkatan kesempatan kerja.	1. Pengelolaan informasi pasar kerja (bursa tenaga kerja) melalui BCC. 2. Pembentukan wirausaha baru (WUB)	1. Masyarakat pencari kerja (Usia produktif) 2. Perusahaan yang membutuhkan pekerja	1. 13.000 pencari kerja direkrut. 2. 250 orang wirausaha baru.	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Indeks Ketimpangan Williamson 3. PDRB Perkapita 4. Tingkat Kemiskinan 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
					6. PDRB atas dasar harga berlaku
12	Pengembangan usaha koperasi dan UKM untuk promosi ekonomi keluarga.	1. GEMASKOP (Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi)	1. Masyarakat di 40 Kecamatan dan Lembaga desa.	1. Jumlah masyarakat dan Lembaga desa yang mau berkoperasi (200 orang).	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2. Indeks Ketimpangan Williamson 3. PDRB Perkapita 4. Tingkat Kemiskinan 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6. PDRB atas dasar harga berlaku
		2. Pembinaan koperasi di lokasi P2WKSS dan lainnya	2. Masyarakat di 40 Kecamatan.	2. Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan (10 lokasi)	
		3. Pengembangan usaha koperasi pada komoditi unggulan.	3. Masyarakat yang mempunyai usaha.	3. Jumlah peserta pengembangan usaha (500 orang)	
		4. Pembinaan usaha mikro dan kecil.	4. Para usahawan mikro yang ada di 40 Kecamatan.	4. Jumlah usaha mikro kecil yang dibina (2370 orang)	

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
		5. Pengembangan kemitraan pemasaran usaha mikro.	5. Para UKM, Mitra promosi yang ada di 40 kecamatan.	5. Jumlah kemitraan pemasaran usaha mikro (400 orang)	
		6. Penumbuhan wirausaha baru.	6. Para calon wirausaha.	6. Jumlah calon wirausaha yang ikut pelatihan (2200 orang).	
		7. Gebyar motivasi usaha 1001 UKM.	7. Para UKM/Warausaha. 8. Masyarakat Kampung KB	7. Jumlah UKM/Wirausaha yang ikut motivasi usaha (5005 orang)	
13	Penguatan kualitas administrasi kependudukan terutama dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.	Penerbitan kartu identitas anak melalui pelayanan 3 in 1 yaitu : Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun mencapai >90%.	Indeks Kepuasan Masyarakat
		1. Penguatan komitmen lintas sector	1. Kemenag	Terbentuknya Kecamatan Layak	

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
		2. Sosialisasi perlindungan anak	2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3. Dinkes 4. Disdik 5. Dishub 6. DPKP 7. Pengadilan Negeri 8. Polres	Anak (KLA) di 15 Kecamatan	
14	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan SDM.	Perbaiki standar pelayanan yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan per jenis layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dipublikasi dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam layanan meningkat dan menurunnya keluhan dari masyarakat.	Indeks Kepuasan Masyarakat
15	Peningkatan pemanfaatan data kependudukan.	Pemanfaatan NIK dan data kependudukan secara nyata dalam pelayanan public	SKPD dan Lembaga yang tidak mempunyai	Meningkatnya kualitas database	Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Desain Program yang dibangun	Kegiatan Yang Terkait	Pihak Yang Terlibat	Indikator Capaian Kegiatan Akhir tahun 2027-2037	Indikator Pembangunan
		dengan Lembaga atau SKPD non-vertikal	hubungan vertical dengan Lembaga di tingkat pusat.	kependudukan nasional yang akurat.	
16	Perbaikan Infrastruktur Aksesibilitas wilayah tengah, selatan dan barat daya	Pembangunan akses dari wilayah tersebut ke jalur selatan	PUPR dan Kemendes	Kemudahan aksesibilitas wilayah terjal dengan jalur selatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	Indeks Pembangunan Ekonomi
17	Pembangunan kuantitas Hidrologi wilayah terjal topografis di Leles, Agrabinta, Cikadu, Tanggeung, Pasirkuda, Pagelaran dan Cidaun	Darma Tirta dan PDAM	PUPR	Perluasan areal dan pertanian industry baru	Indeks ketahanan pangan
18	Produksi Regulasi Pembangunan RSU swasta dan peningkatan kapasitas PUUSKESMAS menjadi RSUD di wilayah selatan	Regulasi Pencapaian Rasio parameter kesehatan dengan sebaran penduduk	Dinas Kesehatan	Terbentuk RSUD dari PUSKESMAS yang ditingkatkan kapasitasnya	Indeks kesehatan

Bab VII

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Grand Desain Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Barat tahun 2022-2037 disusun untuk menguatkan posisi Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dari aspek sumber daya manusia. Pengarus utamaan pembangunan penduduk selayaknya disusun dalam indeks pembangunan berwawasan kependudukan bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, atas dasar ini maka selayaknya setiap kabupaten memiliki GDPK yang terintegrasi dengan arah dan tujuan pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD kabupaten/kota. Oleh karena itu GDPK Kabupaten Cianjur selayaknya ditetapkan dalam perundangan ditingkat kabupaten.

Pada aspek pengendalian penduduk, masyarakat Kabupaten Cianjur selayaknya memiliki arah mobilitas dan persebaran yang merata. Hal ini dilakukan dengan penyebaran sumber ekonomi baru di wilayah selatan dan wilayah yang direncanakan dalam kawasan pengembangan strategis. Di sisi lain, SDM produktif Jawa Barat diarahkan untuk menjadi insan professional berpendidikan yang layak mengisi ruang-ruang penting di luar kabupaten Cianjur baik nasional maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan pengendalian kelahiran, melalui program Bangga Kencana diperoleh modus wilayah prioritas dalam implementasi *updating*



data penambahan penduduk, implementasi Undang-undang perkawinan yang ketat, dan kesertaan MKJP di atas 90 persen bagi PB sehingga diperoleh pertumbuhan penduduk seimbang dan adaptif dengan perkembangan pembangunan baik di Jawa Barat maupun provinsi tetangganya.

Pada Aspek peningkatan kualitas penduduk, focus daerah dalam aspek kesehatan adalah menurunkan kematian penduduk (di bawah 9). Sinergitas dan integrasi data kematian dan penyebab kematian untuk membuat program pengendalian penyakit, penanganan lansia dan regulasi penurunan angka kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja dan kekerasan dalam rumah tangga, penurunan angka kematian Ibu, anak dan bayi. Hal ini dilakukan melalui focus pada membangun sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan kegiatan PKH, Dana Desa dan Perhutanan sosial untuk meningkatkan kualitas data dan peran bersama dalam peningkatan peran POLINDES, POSYANDU, POSBIDES. Pengembangan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di wilayah selatan, tengah dan barat daya, diiringi dengan perbaikan lingkungan hidup di wilayah padat penduduk sekitar kota dan basis industri.

Peningkatan kualitas penduduk pada aspek ekonomi ketenagakerjaan difokuskan pada peningkatan status tenaga kerja non formal menjadi formal, membangun kewirausahaan dan tenaga kerja profesional, penyebaran usia produktif dalam kebutuhan industri. Hal ini dilakukan untuk menurunkan rasio ketergantungan, kesetaraan gender dalam distribusi kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Oleh karena itu pada aspek pendidikan menjadi penting di Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang rata-rata lama sekolahnya masih rendah. Peningkatan status lulusan dan distribusi lulusan di dunia kerja difokuskan pada pencapaian lulusan SMA dan SMK dan distribusinya dalam serapan tenaga kerja. Peningkatan SDM memerlukan faktor kecukupan dan ketahanan pangan, pewilayahan lahan pertanian untuk tanaman pangan seperti jagung, padi dan kedelai serta peningkatan populasi ternak dilakukan dengan memperluas masyarakat terhadap akses lahan, antara lain dengan memanfaatkan perhutanan social dan reformasi agraria.

Pada kondisi pendidikan dan pangan yang mapan diharapkan akan menurunkan berbagai gangguan social yang diakibatkan oleh rendahnya kualitas hidup. Penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga (pernikahan dini, perceraian dan pelecehan sexual), kriminalitas umum dan penyandang masalah kesejahteraan social menjadi focus dalam menghadapi perubahan wilayah ke metropolitan baru di wilayah pengembangan strategis.

Aspek keseimbangan mobilitas, peningkatan kualitas dan pengendalian penduduk tentunya dibangun dengan pembangunan keluarga yang baik. Keluarga menjadi tumpuan bagi pengembangan masa depan penduduk Jawa Barat. Keempat aspek ini diregulasi dalam system data dan informasi kependudukan yang komprehensif dan integratif melibatkan *stake holder*. Adapun multi pihak yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kependudukan adalah pemerintah baik pusat maupun daerah, elemen masyarakat dalam kekuatan dan kelembagaan social



serta pelaku industri dan pendidikan yang terlibat dalam pengelolaan produksi berbasis SDM.

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa berbagai aspek dalam pembangunan kependudukan akan berkontribusi bagi indikator-indikator pembangunan daerah. Penurunan angka kelahiran sekaligus kematian ibu-bayi lahir melalui promosi dan advokasi kesehatan, penguatan lini lapangan dalam pencapaian penurunan kelahiran dan aksesibilitas program KKBP, peningkatan pendidikan fungsi Keluarga pada remaja, keluarga baru, BKB, BKR dan BKL, Gerakan Pemberdayaan perempuan dengan pendekatan keluarga yang lebih merata, perilaku hidup sehat (PHBS, 48%): lahir dgn askes, layanan gizi, air bersih, sanitasi sehat, life style, Peningkatan kualitas mental peserta didik (Sekolah/Madrasah/Pesantren) Pencegahan masyarakat terkena dampak social, Penguatan ketahanan pangan daerah, Peningkatan kesempatan kerja, pengembangan usaha koperasi dan UKM untuk promosi ekonomi keluarga, penguatan kualitas administrasi kependudukan terutama dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan SDM, dan peningkatan pemanfaatan data kependudukan. Kegiatan pembangunan penduduk tersebut berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator utama dan indikator kinerja daerah di Kabupaten Cianjur serta percepatan terhadap peningkatan IPM dan SDGs yang ditargetkan dalam RPJMD.

Pustaka

1. Kabupaten Cianjur Dalam Angka, 2010 – 2020, Badan pusat Statistik Kabupaten Cianjur
2. RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021
3. Resnstra Pembangunan daerah pada SKPD Terkait
4. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat, 2021. BPS Jawa Barat
5. SDGs
6. BKKBN, 2019. Materi Estimasi Kependudukan berdasarkan sensus penduduk 2020. BPS Jawa Barat
7. BPS, 2019. Proyeksi Penduduk 2020-2045. BPS Nasional
8. Irfan. 2020. Pembangunan Berwawasan Kependudukan. BKKBN Jawa Barat
9. Hario, 2020. Proyeksi Data Kependudukan Berdasarkan Sensus 2020. Makalah. BPS Jawa Barat
10. Arifin. 2021. Dalil-dalil Hak Reproduksi. Makalah. Seminar KKI Provinsi Jawa Barat. Bandung
11. Arifin, 2020. Metodologi Penelitian Eksploratif. Makalah. Fakultas Peternakan UNPAD. Bandung



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR**

Jalan Raya Bandung No. 65 Kec. Karangtengah Kab. Cianjur
Telp. (0263) 280 645 - Fax: (0263) 280 645
Website: <http://bappeda.cianjurkab.go.id>
Email: bappeda@cianjurkab.go.id